



**TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)**

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENCETAKAN  
SAWAH BARU DI KABUPATEN  
KOTAWARINGIN BARAT**



**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi  
Bidang Minat Administrasi Publik**

**Disusun Oleh :**

**HAJAR SUGIHANDOYO**

**NIM: 018788318**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TERBUKA  
JAKARTA  
2014**

## ABSTRACT

### Implementation of New Field Mold Program in Kotawaringin Barat Regency

HAJAR SUGIHANDOYO  
Universitas Terbuka  
[hajarsugihandoyo@gmail.com](mailto:hajarsugihandoyo@gmail.com)

New Field Mold Program based the rule of Indonesian Republic President Number 24, 2010, and continued with the rule of Farm Ministry Number 61/Permentan/OT.140/10/2010 that was decided institution formalized that would be handle field and water resource energy management that was farm infrastructure and Medium General Directorate that assignment was implementation expansion of field. However, implementation in the field still found obstacle that was never optimum result because of 1) quantity aspect and SDM quality that was not enough, 2) Communication aspect that was not optimum aspect that was not optimum made doer of wisdom program less understand about socialization program, 3) Institutional did not to more supported the implementation of program and activity, 4) Disposition, caused program never gave positive impact to society that was accepted Mold Program New Field in Kotawaringin Barat Regency. From this condition that was be the focus of research to observed implementation process of wisdom contents from several aspects; Communication, Resource Energy, Attitude/Disposition, and Bureaucracy Structural.

This research used Approached descriptive qualitative concept with purposed gave representation How Implementation Program in Field then Analysis used Edward III Theory.

The conclusion of this research: 1) Communication aspects (transmission, distinctness, consistency, and coordination) very supported to implementation of mold program this new field, 2) Resource Energy Aspects (SDM, Information, authority, and facilities) half supported liked: good facilities of new opened area, supported to medium production liked seed of rice and herbicide that was suffice, along with authority and information that were less supported liked: SDM, network facilities of field water system, approach farm effort, tool and machine farm proponent. 3) Attitude aspects (Implementator Attitude, leadership support, incentive for implementer and transparency), enough relative supported in this program, and 4) bureau structural aspects (SOP and fragmentation) never to support in this implementation of Field Mold Program.

**Key words:** Implementation Program, New Field Mold Program

## ABSTRAK

### Implementasi Program Pencetakan Sawah Baru Di Kabupaten Kotawaringin Barat

HAJAR SUGIHANDOYO  
Universitas Terbuka  
[hajarsugihandoyo@gmail.com](mailto:hajarsugihandoyo@gmail.com)

Program Pencetakan Sawah Baru berdasar pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2010 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 yang telah menetapkan pembentukan institusi yang menangani pengelolaan sumber daya lahan dan air yaitu Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang salah satu tugasnya adalah melaksanakan perluasan sawah. Namun pada implementasinya dilapangan masih terdapat kendala sehingga hasil yang diharapkan masih belum optimal yang disebabkan oleh 1) Aspek jumlah dan mutu SDM yang belum memadai; 2) Aspek komunikasi yang belum optimal sehingga sosialisasi program kurang dipahami secara baik oleh pelaku kebijakan program; 3) Kelembagaan yang dimiliki belum mendukung dalam pelaksanaan program dan kegiatan; 4) Disposisi, menyebabkan program yang ada belum memberikan dampak yang cukup positif pada masyarakat penerima Program Pencetakan Sawah Baru di Kabupaten Kotawaringin Barat. Dari kondisi inilah yang menjadi fokus penelitian untuk melihat proses implementasi dari isi kebijakan program dari beberapa segi : Komunikasi, Sumberdaya, Sikap/Disposisi dan Struktur Birokrasi.

Penelitian ini menggunakan konsep pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan memberikan suatu gambaran bagaimana pelaksanaan program dilapangan kemudian dianalisis menggunakan Teori Edwards III.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa : 1) Aspek Komunikasi (Transmisi, Kejelasan, Konsistensi dan Koordinasi) sangat mendukung pada pelaksanaan Program Pencetakan Sawah Baru ini, 2) Aspek Sumber Daya (SDM, Informasi, Wewenang dan Fasilitas), sebagian mendukung seperti : fasilitas lahan bukaan baru yang baik, dukungan sarana produksi berupa benih padi dan herbisida yang mencukupi, serta wewenang dan informasi yang ada cukup baik, sedangkan beberapa aspek yang kurang mendukung diantaranya: SDM, fasilitas jaringan tata air persawahan, jalan usaha tani, alat dan mesin pertanian pendukung, 3) Aspek Sikap (Sikap Implementator, Dukungan Pimpinan, Insentif bagi pelaksana dan Transparansi), relatif cukup mendukung dalam Program ini, dan 4) Aspek Struktur Birokrasi (SOP dan Fragmentasi) masih belum mendukung dalam pelaksanaan Program Pencetakan Sawah Baru ini.

Kata Kunci : Implementasi Program, Program Pencetakan Sawah Baru

**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**PERNYATAAN**

TAPM yang berjudul **Implementasi Program Pencetakan Sawah Baru Di Kabupaten Kotawaringin Barat** adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jakarta, Agustus 2014  
Menyatakan,

METERAI  
TEMPEL

35197ACF56440652

6000

HAJAR SUGIHANDOYO  
NIM 018788318

**LEMBAR PERSETUJUAN TAPM**

Judul TAPM : Implementasi Program Pencetakan Sawah Baru di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Nama : HAJAR SUGIHANDOYO

NIM : 018788318

Program Studi : Magister Administrasi Publik

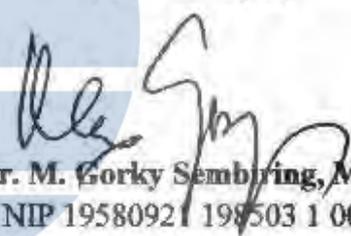
Hari/Tanggal : 24 Agustus 2014

Menyetujui:

Pembimbing I,

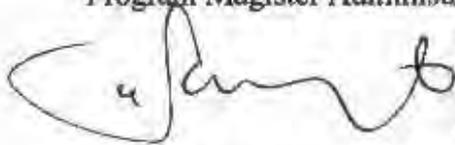
Pembimbing II,

  
**Dr. Sarwono, M.Si**  
 NIP 19570909 198403 1 002

  
**Dr. M. Gorky Sembiring, M.Sc**  
 NIP 19580921 198503 1 001

Mengetahui:

Jakarta, September 2014

  
**Dr. Darmanto, M.Ed**  
 NIP. 195910271986031003

Direktur Program Pascasarjana,

  
**Dr. Darmanto, M.Ed**  
 NIP. 195910271986031003

  
**Suciati, M. Sc., Ph.D**  
 NIP 19520213 198503 2 001

**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**PENGESAHAN**

**NAMA** : HAJAR SUGIHANDOYO  
**NIM** : 018788318  
**PROGRAM STUDI** : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK (MAP)  
**JUDUL TAPM** : **Implementasi Program Pencetakan Sawah Baru di Kabupaten Kotawaringin Barat**

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Program Studi Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada:

**Hari / Tanggal** : Minggu, 24 Agustus 2014

**Waktu** : 18.35 – 20.35 Wib

Dan telah dinyatakan **LULUS**

**PANITIA PENGUJI TAPM**

**Ketua Komisi Penguji:**

**Aminuddin Zuhairi, M.Ed., Ph.D**

**Penguji Ahli** :

**Prof. Dr. Sangkala, M.Si**

**Pembimbing I** :

**Dr. Sarwono, M.Si**

**Pembimbing II** :

**Dr. M. Gorky Sembiring, M.Sc**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan TAPM (Tesis) dengan judul "Implementasi Program Pencetakan Sawah Baru di Kabupaten Kotawaringin Barat" dengan baik dan lancar.

Penulisan TAPM ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains Bidang Minat Administrasi Publik Universitas Terbuka.

Dalam proses penulisan, saya banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memudahkan dalam menyelesaikan tepat pada waktunya. Pada kesempatan ini peneliti ingin memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka, Suciati, M.Sc., Ph.D;
2. Kepala UPBJJ-UT Palangkaraya, Prof. Dr. Holten Sion selaku penyelenggara Program Pascasarjana;
3. Pembimbing I, Bapak Dr. Sarwono, M.Si dan Pembimbing II, Dr. M. Gorky Sembiring, M.Sc yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan TAPM ini;
4. Bupati Kotawaringin Barat, Dr. H. Ujang Iskandar, ST.,M.Si yang telah memberikan ijin belajar kepada saya sebagai bentuk bantuan meningkatkan mutu sumber daya manusia dilingkungan PNS Kabupaten Kotawaringin Barat

5. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penelitian ini.

Dengan keterbatasan yang dimiliki serta terus berkembangnya ilmu pengetahuan maka apabila penelitian ini masih belum sempurna, peneliti dengan rendah hati berterima kasih atas segala saran dan kritik demi kesempurnaan hasil penelitian ini. Akhir kata semoga Allah Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga TAPM ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Jakarta, Agustus 2014

Hajar Sugihandoyo



## DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL .....	i
ABSTRACT .....	ii
ABSTRAK .....	iii
LEMBARAN PERNYATAAN .....	iv
LEMBARAN PERSETUJUAN .....	v
LEMBARAN PENGESAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR BAGAN .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kegunaan Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Kajian Teori .....	11
1. Teori Kebijakan .....	11
2. Teori Implementasi Kebijakan Publik .....	17
3. Teori Pembangunan Pertanian .....	20
4. Model-Model Implementasi Kebijakan Publik .....	27
5. Program Pencetakan Sawah Baru .....	35
B. Kajian Terdahulu .....	39
C. Kerangka Berpikir .....	44
D. Operasionalisasi Konsep .....	50

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>51</b>
A. Desain Penelitian .....	51
B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan.....	52
C. Instrumen Penelitian.....	54
D. Prosedur Pengumpulan Data.....	55
E. Metode Analisis Data.....	57
<b>BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>60</b>
A. Deskripsi Objek Penelitian .....	60
1. Kondisi Geografi .....	60
2. Demografi.....	66
3. Profil Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten. Kotawaringin Barat.....	67
B. Temuan .....	74
C. Pembahasan.....	111
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>120</b>
A. Kesimpulan .....	120
B. Saran.....	124
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>127</b>



## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Gambaran Kecukupan Pangan (Beras) Berbanding Dengan Luasan Sawah di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012	..... 7
Tabel 4.1	Luas Wilayah Per Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat	..... 60
Tabel 4.2	Tinggi dari permukaan laut dan persentase tingkat kemiringan menurut kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat.	..... 62
Tabel 4.3	Potensi lahan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat	..... 63
Tabel 4.4	Penyebaran Tekstur Tanah di Kabupaten Kotawaringin Barat	..... 64
Tabel 4.5	Penyebaran Faktor pembatas Kemampuan Lahan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat	..... 66
Tabel 4.6	Jumlah penduduk di tiap kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010	..... 66
Tabel 4.7	Realisasi Kelompok Tani Penerima Bantuan Sosial Perluasan sawah/ Cetak Sawah Tahun Anggaran 2013 berdasarkan SK Bupati Kotawaringin Barat Nomor : UKP.1220/521.a/TV/2013 tanggal 15 April 2013	..... 75
Tabel 4.8	Perkembangan Luasan Sawah Tahun 2012 dan Tahun 2013 Per Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat	..... 75
Tabel 4.9	Dukungan Peraturan/Landasan Hukum Terkait Program Cetak Sawah Baru tahun 2013	..... 80
Tabel 4.10	Hasil Analisa Tahap Implementasi Kebijakan Ditinjau dari Faktor Komunikasi.	..... 87
Tabel 4.11	Kualifikasi SDM di Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian dan Peternakan Tahun 2013	..... 89
Tabel 4.12	Hasil Analisa Tahap Implementasi Kebijakan Ditinjau dari Faktor Sumber Daya.	..... 96
Tabel 4.13	Hasil Analisa Tahap Implementasi Kebijakan Ditinjau dari Faktor Sikap (Disposisi).	..... 106
Tabel 4.14	Hasil Analisa Tahap Implementasi Kebijakan Ditinjau dari Faktor Struktur Birokrasi.	..... 111

**DAFTAR BAGAN**

	<u>Halaman</u>
Bagan 2.1 Model Pendekatan <i>Direct and Indirect Impact on Implementation</i> George Edward III .....	30
Bagan 2.2 Kerangka Pemikiran .....	44



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara Penelitian
- Lampiran 2 Sampel Transkrip Hasil Wawancara
- Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan pertanian dilaksanakan untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berorientasi agribisnis dengan mendorong partisipasi masyarakat, sedangkan pemerintah berperan dalam memfasilitasi, mendorong, dan memberdayakan kemampuan dan kreatifitas petani. Pembangunan pertanian kabupaten Kotawaringin Barat disusun sebagai refleksi dan implementasi dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap capaian dan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian yang bertumpu pada penguatan perekonomian rakyat melalui sektor basis, berdasarkan potensi sumberdaya yang tersedia (*available resources*).

Kebijakan umum pembangunan pertanian adalah menciptakan nilai tambah dan daya saing usaha pertanian dengan meningkatkan peran dan partisipasi dari masyarakat pertanian serta penerapan manajemen organisasi yang baik berlandaskan pada penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari kebijakan umum tersebut dapat dijabarkan kembali menjadi suatu kebijakan teknis yang dimana pelaksanaannya diselenggarakan dengan azas kebersamaan ekonomi, sehingga semua unsur kekuatan yang ada bersinergi satu sama lain.

Menurut Undang-undang No. 7 tahun 1996 Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya

pangan yang cukup, baik jumlah dan mutunya, aman, merata dan terjangkau. Ketahanan pangan dapat disederhanakan dengan menitikberatkan pada 3 dimensi yang berbeda namun saling berkaitan yaitu ketersediaan pangan (produksi), akses pangan oleh rumah tangga (distribusi), dan pemanfaatan pangan oleh individu (konsumsi).

Situasi konsumsi pangan nasional saat ini masih didominasi oleh konsumsi beras yang relatif tinggi, dimana beras merupakan makanan pokok yang paling penting dan sangat diperhatikan oleh pemerintah, baik stok/cadangannya maupun harga pasarnya, dimana pemerintah berperan sangat kuat dalam pengamanan produksi pangan ini. Maka untuk mengamankan keadaan pangan tersebut, salah satu langkah yang ditempuh oleh pemerintah yaitu dengan pelaksanaan program pencetakan sawah baru guna pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.

Ketahanan pangan masih akan menjadi aspek penting di dalam pembangunan di Indonesia dimana bahan pangan merupakan suatu produk yang tidak bisa disubstitusi, pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, kasus kerawanan pangan di sejumlah daerah yang masih terjadi walaupun secara nasional telah tercapai swasembada, degradasi lingkungan dan perubahan iklim yang menurunkan kapasitas produksi pangan, kompetisi pemanfaatan bahan pangan sebagai sumber energi, serta perkembangan perdagangan regional dan global tidak boleh menjadi sumber utama bagi pemenuhan pangan nasional.

Pembangunan pertanian pada hakekatnya merupakan rangkaian upaya untuk memfasilitasi, melayani dan mendorong berkembangnya sistem agribisnis pertanian dari hulu sampai ke hilir agar memiliki nilai tambah dan daya saing

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat, serta perekonomian wilayah dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Empat sukses pembangunan pertanian yaitu:

1. Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan
2. Peningkatan diversifikasi pangan
3. Peningkatan nilai tambah daya saing dan ekspor
4. Peningkatan kesejahteraan petani.

Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumberdaya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat .

Tatanan kehidupan mensyaratkan bahwa ketersediaan pangan merupakan kebutuhan yang fundamental. Tanpa pangan, manusia tidak dapat bertahan hidup. Namun demikian, budaya yang berkembang dalam kehidupan manusia menunjukkan bahwa ada jenis komoditi tertentu yang memang dianggap memiliki nilai sosial dan ekonomi yang tinggi. Oleh karenanya, tidak seluruh komoditi pertanian perlu untuk dibudidayakan.

Pertumbuhan pembangunan di segala bidang yang pesat terutama industri dan pemukiman sangat berpengaruh negatif terhadap pengembangan sektor pertanian khususnya produksi padi, karena menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian khususnya lahan sawah menjadi lahan non pertanian atau non

sawah yang dapat mengancam ketahanan pangan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka upaya untuk memperluas baku lahan pertanian menjadi sangat penting dengan memanfaatkan dan mengelola sumberdaya lahan dan air yang ada. Mengingat potensi lahan yang tersedia cukup luas, maka masih sangat dimungkinkan untuk melaksanakan kegiatan perluasan areal tanaman pangan dengan menambah luasan/ baku lahan, melalui kegiatan perluasan areal tanaman pangan yang sering disebut dengan perluasan sawah.

Dengan makin meningkatnya pertambahan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan telah mengancam daya dukung wilayah secara nasional dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Pencetakan sawah baru yang merupakan salah satu program pemerintah guna terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat pada tataran di lapangan masih banyaknya terdapat kendala, di Kabupaten Kotawaringin Barat sendiri hal yang paling pokok adalah mengenai kesesuaian lahan untuk tanaman padi, faktor kepemilikan lahan, serta kemampuan masyarakat dalam pembukaan lahan sawah baru, serta keberlanjutan penanaman pada lahan sawah yang telah dicetak tersebut untuk ditanami komoditas tanaman pangan.

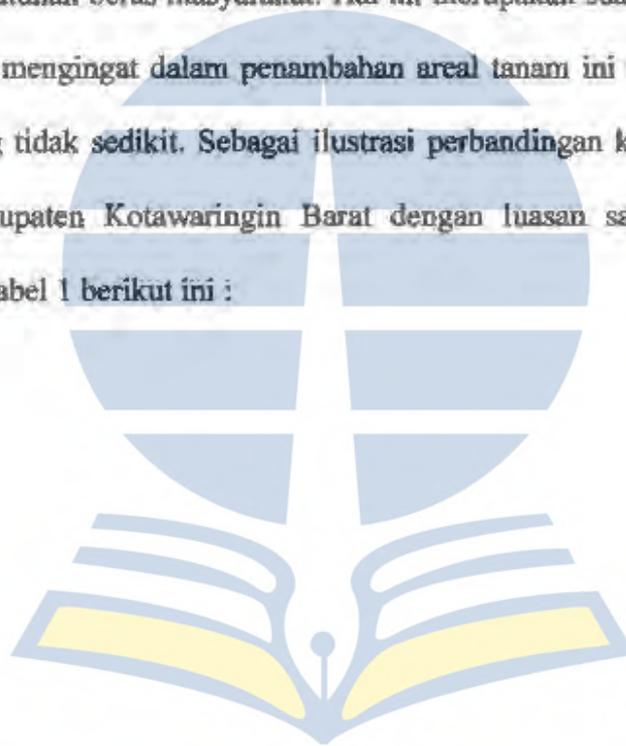
Program pencetakan sawah baru sangat baik diterapkan dalam rangka membantu petani dalam pembukaan dan pengolahan lahan pertanian yang dimilikinya yang pada umumnya masih berupa semak belukar dan hutan ringan. Pada awalnya khususnya di Kabupaten Kotawaringin Barat pembukaan lahan pertanaman padi masih dengan cara tradisional yaitu dengan menggunakan metode pembakaran lahan, namun hal ini telah dilarang oleh pemerintah daerah,

sehingga program pencetakan sawah baru ini mutlak diperlukan guna mencegah berlangsungnya pembukaan lahan dengan cara membakar lahan tersebut.

Program pencetakan sawah baru ini bertujuan untuk 1) meningkatkan areal tanam khususnya padi pada wilayah bukaan sawah baru, 2) terwujudnya peningkatan produksi tanaman pangan khususnya padi pada wilayah bukaan baru, 3) terwujudnya dukungan dalam penyediaan kecukupan pangan nasional dan 4) meningkatnya kesejahteraan dan pendapatan petani dengan adanya tambahan luas areal sawah baru yang selesai dicetak dan diusahakannya sesuai dengan luasan yang dimilikinya.

Kebutuhan beras masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat yang tiap tahun semakin meningkat menuntut adanya peningkatan produksi padi guna mencukupi kebutuhan lokal masyarakat. salah satu metode yang digunakan dalam peningkatan produksi padi yaitu Program Pencetakan Sawah Baru. Dengan rata-rata kebutuhan konsumsi beras nasional sebesar 121,76 kg perkapita pertahun dan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 241.383 jiwa maka konsumsi beras pertahun masyarakat di Kabupaten ini yaitu sebesar 29.390,79 Ton/tahun, namun hasil produksi beras petani di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat pertahun hanya sebesar 18.275,83 ton/tahun. Hal ini terlihat terjadi selisih antara kemampuan petani memproduksi beras dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 11.114,96 ton pertahun, sehingga terlihat bahwa kemampuan petani lokal dalam mencukupi kebutuhan beras di Kabupaten Kotawaringin Barat hanya sebesar 62 % dari kebutuhan yang ada. Untuk menanggulangi kerawanan pangan ini memang dalam jangka pendek dapat ditanggulangi dengan melakukan pemasukan beras dari daerah lain yang

surplus beras (terutama dari pulau Jawa) sehingga pemenuhan kebutuhan pangan daerah dapat tercukupi. Akan tetapi untuk program jangka panjang, pemerintah daerah diperlukan adanya terobosan untuk melakukan penanggulangan kerawanan pangan ini melalui program-program yang mendukung swasembada pangan, salah satunya yaitu Program Pencetakan Sawah Baru ini. Berdasarkan perhitungan yang ada, untuk wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat diperlukan adanya penambahan luas areal untuk bertanam padi minimal seluas 3.927,55 hektar guna mencukupi kebutuhan beras masyarakat. Hal ini merupakan suatu pekerjaan yang tidaklah ringan mengingat dalam penambahan areal tanam ini memerlukan dana dan upaya yang tidak sedikit. Sebagai ilustrasi perbandingan kecukupan pangan (beras) di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan luasan sawah tahun 2012 disajikan pada tabel 1 berikut ini :



Tabel 1.1. Gambaran Kecukupan Pangan (Beras) Berbanding Dengan Luasan Sawah di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012

No	Kecamatan	Luas Panen Padi (Ha)	Produktivitas (Ton/Ha)	Produksi Padi (Ton)	Produksi Beras (Ton)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Beras Konsumsi Per Tahun (Ton)*	Kelebihan/ Kekurangan Beras Per Tahun (Ton) (6-8)	Keperluan Penambahan Luasan Lahan Pertanian Padi (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kumai	3.107	3,03	9.405,04	5.900,72	47.461	5.778,85	121,87	-
2	Arut Selatan	3.603	3,03	10.933,20	6.859,49	100.361	12.219,95	-5.360,46	1.769,13
3	Pangkalan Banteng	667	2,82	1.880,15	1.179,61	31.559	3.842,62	-2.663,01	944,33
4	Kotawaringin Lama	1.137	2,72	3.093,37	1.940,78	17.100	2.082,09	-141,31	51,95
5	Pangkalan Lada	281	2,87	806,61	506,07	28.493	3.469,31	-2.963,24	1.032,49
6	Arut Utara	1.488	2,02	3.011,10	1.889,10	16.709	2.034,49	-145,39	71,98
	<b>Kotawaringin Barat</b>	<b>10.283</b>	<b>2,83</b>	<b>29.129,47</b>	<b>18.275,83</b>	<b>241.383</b>	<b>29.390,79</b>	<b>-11.114,96</b>	<b>3.927,55</b>

\*) Kebutuhan Beras Konsumsi Penduduk Per tahun didapat dari Jumlah Penduduk (7) X Kebutuhan Beras Perkapita Per Tahun (121,76 kg/kapita/tahun atau 0,12176 ton/kapita/tahun)



Pelaksanaan penambahan baku lahan tanaman pangan melalui pencetakan sawah sangat penting untuk mendukung pemantapan ketahanan pangan, mengingat kebutuhan produksi tanaman pangan terus meningkat sedangkan alih fungsi lahan sawah setiap tahun terjadi pada areal yang cukup luas. Pemanfaatan lahan sawah yang baru dicetak merupakan kegiatan yang sangat perlu diperhatikan mengingat pada lahan tersebut sangat mudah menyemak kembali. Oleh karena itu petani perlu dibina secara intensif dan difasilitasi dengan bantuan sarana produksi pertanian agar petani dapat segera mengusahakan lahan sawah tersebut secara berkelanjutan.

Namun pada hasil pelaksanaan program tersebut ditemukan permasalahan yaitu masih rendahnya aktivitas petani dalam mendukung keberlanjutan program tersebut, yang terlihat dengan kurang terawatnya lahan pertanian yang telah tercetak tersebut secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi program ini dilapangan belum optimal. Sebab dari belum optimalnya pelaksanaan program pencetakan sawah baru ini diantaranya : 1) Aspek kualitas SDM yang rendah dan kuantitas SDM yang ada tidak mencukupi atau kurang; 2) Aspek komunikasi yang tidak optimal sehingga sosialisasi program tidak dipahami dengan baik oleh pelaku kebijakan; 3) Disposisi, dengan program yang ada belum benar-benar memberikan manfaat dan dampak positif pada masyarakat petani tanaman padi sawah; 4) Struktur birokrasi atau kelembagaan yang ada kurang mendukung pelaksanaan tugas dalam rangka menjalankan program pencetakan sawah baru di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Program pencetakan sawah baru ini memiliki tujuan yaitu untuk untuk peningkatan produksi tanaman pangan khususnya padi pada wilayah bukaan baru melalui penanaman komoditas tanaman padi secara berkelanjutan. Keberhasilan dari implementasi program ini dapat dicapai secara optimal apabila ada dukungan sarana dan prasarana yang baik seperti irigasi, sumber dana yang optimal ( dana operasional untuk pembinaan petugas dilapangan), sumber daya manusia yang baik secara kualitas maupun kuantitas, sikap dari implementor, koordinasi yang baik antara pelaksana dilapangan, serta pembagian tugas yang jelas dari masing-masing pelaksana, dari hal tersebut peneliti pada implementasi program pencetakan sawah baru ini menggunakan Teori Edwards III disebabkan pada teori ini ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi suatu kebijakan, yaitu : 1) Komunikasi, 2) Sumber Daya, 3) Sikap/Disposisi dan 4) Struktur Birokrasi.

Dari penelusuran peneliti terhadap penelitian tentang Program Pencetakan Sawah Baru untuk Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang memakai teori Edwards III belum ditemukan peneliti yang melakukan penelitian yang sama terhadap penelitian yang dilakukan sehingga peneliti menjadi termotivasi untuk melaksanakan penelitian terhadap pelaksanaan program pencetakan sawah baru di Kabupaten Kotawaringin barat ini menggunakan teori Edwards III.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang diatas dan dari hasil pengamatan, maka perumusan masalah yang dihadapi adalah :

1. Seberapa Jauh Target/Realisasi Pencetakan Sawah Baru di Kabupaten Kotawaringin Barat?
2. Bagaimana membudidayakan sawah baru yang telah ada?
3. Bagaimana keberlanjutan produksi padi disawah yang telah dicetak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh penjelasan tentang:

1. Seberapa Jauh Target/Realisasi Pencetakan Sawah Baru di Kabupaten Kotawaringin Barat?
2. Bagaimana membudidayakan sawah baru yang telah ada ?
3. Bagaimana keberlanjutan produksi padi disawah yang telah dicetak?

### **D. Kegunaan Penelitian**

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu agar memberikan masukan/input kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat khususnya Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap pelaksanaan program pencetakan sawah baru serta dapat memberikan kontribusi yang positif guna mewujudkan pemenuhan kebutuhan pangan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Sedangkan manfaat akademik dari penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan, memperkaya konsep dan teori yang menyokong perkembangan ilmu pengetahuan pada Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka Palangka Raya, serta dapat dijadikan referensi lanjutan pada penelitian yang akan datang.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Teori Kebijakan Publik

Analisis kebijakan publik adalah kajian ilmu sosial terapan yang mempunyai tujuan memberikan rekomendasi kepada *public policy maker* dalam rangka memecahkan masalah-masalah publik. Di dalam analisis kebijakan terdapat informasi-informasi berkaitan dengan masalah-masalah kebijakan serta argumen-argumen tentang berbagai alternatif kebijakan sebagai bahan pertimbangan atau masukan kepada pihak pembuat kebijakan.

Dunn (1988) mengemukakan bahwa analisis kebijakan publik adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metodologi penelitian dan argumen untuk menghasilkan informasi yang relevan untuk memecahkan masalah-masalah kebijakan.

Analisis kebijakan bukanlah sebuah keputusan, sebagaimana dikemukakan oleh Weimer dan Vining, 1998-1: *The product of policy analysis is advice. Specifically, it is advice that inform some public policy decision.* Jadi, analisis kebijakan publik lebih merupakan nasihat atau bahan pertimbangan pembuat kebijakan publik yang berisi tentang masalah yang dihadapi, tugas yang mesti dilakukan oleh organisasi berkaitan dengan masalah tersebut, dan juga berbagai alternatif kebijakan yang mungkin dapat diambil dengan berbagai penilaiannya berdasarkan tujuan kebijakan.

Analisis kebijakan publik berhubungan dengan penyelidikan dan deskripsi sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan publik. Analisis kebijakan dapat menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan pada satu, beberapa atau seluruh tahap dari proses kebijakan tergantung pada tipe masalah yang dihadapi klien yang dibantunya. Analisis kebijakan dilakukan tanpa mempunyai pretensi untuk menyetujui atau menolak kebijakan.

Dunn (1998) mengemukakan bahwa hubungan antara informasi kebijakan dengan metode analisis kebijakan memberi landasan untuk membedakan tiga bentuk utama analisis kebijakan publik, yaitu : (1) Analisis kebijakan prospektif yang berupa produksi dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan. Analisis kebijakan di sini merupakan suatu alat untuk menyintesis informasi untuk dipakai dalam merumuskan alternatif dan preferensi kebijakan yang dinyatakan secara komparatif, diramalkan dalam bahasa kuantitatif dan kualitatif sebagai landasan atau penuntun dalam pengambilan keputusan kebijakan; (2) Analisis kebijakan retrospektif adalah sebagai penciptaan dan transformasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan. Terdapat 3 tipe analisis berdasarkan kegiatan yang dikembangkan oleh kelompok analisis ini, yakni analisis yang berorientasi pada disiplin, analisis yang berorientasi pada masalah dan analisis yang berorientasi pada aplikasi. Tentu saja ketiga tipe analisis retrospektif ini terdapat kelebihan dan kelemahan (3) Analisis kebijakan yang terintegrasi merupakan bentuk analisis yang mengkombinasikan gaya operasi para praktisi yang menaruh perhatian pada penciptaan dan transformasi informasi sebelum dan sesudah tindakan kebijakan diambil. Analisis kebijakan yang terintegrasi tidak hanya mengharuskan para analisis untuk mengaitkan tahap

penyelidikan retrospektif dan prospektif, tetapi juga menuntut para analis untuk terus menerus menghasilkan dan mentransformasikan informasi setiap saat.

Laswell dalam Dunn (1998) menyatakan bahwa analisis kebijakan merupakan aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam menciptakan pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan analisis meneliti sebab, akibat dan kinerja kebijakan dan program publik. Pengetahuan tersebut betapa pun tetap tidak lengkap, kecuali jika hal tersebut disediakan kepada pengambil kebijakan dan publik terhadap siapa para analisis berkewajiban melayaninya. Hanya jika pengetahuan tentang kebijakan dikaitkan dengan pengetahuan dalam proses kebijakan, anggota- anggota badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, bersama dengan warga negara yang memiliki peranan dalam keputusan- keputusan publik, dapat menggunakan hasil- hasil analisis kebijakan untuk memperbaiki proses pembuatan kebijakan dan kinerjanya. Oleh karena efektivitas pembuatan kebijakan tergantung pada akses terhadap stok pengetahuan yang tersedia, komunikasi dan penggunaan analisis kebijakan menjadi penting sekali dalam praktik dan teori pembuatan kebijakan publik.

Badjuri dan Yuwono (2002) mengemukakan lima argumen tentang arti penting analisis kebijakan publik, yakni

1. Dengan analisis kebijakan maka pertimbangan yang ilmiah, rasional dan objektif diharapkan dijadikan dasar bagi semua pembuatan kebijakan publik. Ini artinya bahwa kebijakan publik dibuat berdasarkan pertimbangan ilmiah yang rasional dan objektif bukan semata- mata pertimbangan sempit, mialnya pertimbangan untuk mengamankan kepentingan politik tertentu. Kondisi ini

- menjadi persoalan berat di Indonesia oleh karena kenyataan menunjukkan bahwa aspek politik sangat mempengaruhi pembuatan kebijakan publik baik di pemerintah pusat maupun daerah.
2. Analisis kebijakan publik yang baik dan komprehensif memungkinkan sebuah kebijakan didesain secara sempurna dalam rangka merealisasikan tujuan berbangsa dan bernegara, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum (*public welfare*). Hal ini karena analisis kebijakan harus mendasarkan diri pada visi dan misi yang jelas, yaitu mengatur sebuah persoalan agar tercipta tertib sosial menuju masyarakat yang sejahtera.
  3. Analisis kebijakan menjadi sangat penting oleh karena persoalan bersifat multidimensional, saling terkait (*interdependent*) dan berkorelasi satu dengan lainnya. Oleh karena kenyataan ini maka pihak analis kebijakan mestinya berupa sebuah tim yang multidisiplin yang meliputi berbagai bidang keahlian (*expertise*).
  4. Analisis kebijakan memungkinkan tersedianya panduan yang komprehensif bagi pelaksanaan dan evaluasi kebijakan. Hal ini disebabkan analisis kebijakan juga mencakup dua hal pokok, yaitu hal-hal yang bersifat substansial saat ini dan hal-hal strategis yang mungkin akan terjadi pada masa yang akan datang.
  5. Analisis kebijakan memberikan peluang yang lebih besar untuk meningkatkan partisipasi publik. Hal ini dikarenakan dalam metode analisis kebijakan mesti melibatkan aspirasi masyarakat. aspirasi masyarakat ini dapat diperoleh dari berbagai mekanisme, seperti melalui konsultasi publik, debat

publik, curah pikir bersama berbagai pihak terkait (stakeholders), delibrasi publik.

Analisis kebijakan akan sangat membantu menghindari suatu kebijakan yang hanya memakai pertimbangan sempit semata atau pertimbangan kekuasaan semata. Sebagaimana diketahui pertimbangan yang ilmiah dan rasional serta objektif dalam rangka pembuatan kebijakan publik kadang sulit diperoleh karena kenyataan menunjukkan bahwa aspek politik sangat mewarnai pembuatan kebijakan publik baik di pemerintah pusat maupun daerah. Dengan analisis kebijakan diharapkan dapat menghindari keadaan ini karena analisis kebijakan memberikan informasi dan argumen yang lebih komprehensif dan dapat diterima masyarakat.

Analisis kebijakan publik menghadapi suatu permasalahan yang sifatnya kompleks sehingga membutuhkan sebuah cara tertentu untuk menyederhanakan sesuatu yang kompleks tersebut. Apalagi mengingat tugas analisis kebijakan adalah menginformasikan segala fakta yang dibutuhkan untuk memperkuat hasil analisis sehingga dapat memberikan argumentasi yang lengkap atas alternatif kebijakan yang dihasilkan.

Model adalah alat atau cara untuk menyederhanakan sesuatu yang kompleks tersebut sehingga dengan model tersebut analisis dalam melaksanakan pekerjaannya menjadi lebih fokus dan sistematis. Inti dari setiap analisis kebijakan adalah pembentukan suatu proses yang dapat diatur, padat dan jelas, yang dirancang untuk menghasilkan informasi tentang serangkaian tindakan yang diajukan. Proses ini diberikan oleh satu model atau lebih, oleh alat-alat yang

beragam tidak sekedar imajinasi tentang situasi di benak analis saja, tetapi sampai dengan suatu simulasi yang melibatkan beberapa orang ataupun simulasi dalam program komputer.

Dikatakan oleh Dunn (2000) bahwa model kebijakan (*Policy models*) adalah representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari suatu kondisi masalah yang disusun untuk tujuan-tujuan tertentu. Persis seperti masalah-masalah kebijakan yang merupakan bangunan mental yang didasarkan pada konseptualisasi dan spesifikasi elemen-elemen kondisi masalah, model-model kebijakan merupakan rekonstruksi artifisial dari realitas dalam wilayah yang merentang dari energi dan lingkungan sampai kemiskinan, kesejahteraan dan kejahatan.

Model kebijakan dapat dinyatakan dalam bentuk konsep, diagram, grafik atau persamaan matematika. Ini semua digunakan tidak hanya untuk menerangkan, menjelaskan, dan memprediksikan elemen-elemen suatu kondisi masalah melainkan juga untuk memperbaikinya dengan merekomendasikan serangkaian tindakan untuk memecahkan masalah-masalah tersebut.

Quade (1994) mengemukakan bahwa suatu model merupakan suatu pengganti dari kenyataan; wakil realita yang diharapkan memadai untuk masalah yang sedang dihadapi. Model tersebut terbuat/terbentuk dari faktor-faktor yang relevan dengan situasi tertentu dan yang relevan dengan hubungan-hubungan diantaranya.

Pada kenyataannya, analisis kebijakan publik dapat lebih mudah menyampaikan argumentasi kebijakan yang diusulkan kepada decision maker

dengan pemakaian model kebijakan. Model adalah penting untuk analisis kebijakan publik meskipun kita tidak dapat memperkirakan akibat dengan adanya model ilmiah yang terbaik, model kebijakan memberi tahu pada kita tentang apa saja yang mungkin, yang didasarkan pada berbagai asumsi tentang faktor- faktor masalah, dan dengan demikian menghasilkan informasi yang membantu kita untuk memahami situasi dengan lebih jelas.

## 2. Teori Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye dalam Suwitri (2012) mengemukakan kebijakan publik sebagai apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Dalam upaya mencapai tujuan negara, pemerintah perlu mengambil pilihan langkah tindakan yang dapat berupa melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu. Tidak melakukan sesuatu apa pun merupakan suatu kebijakan publik karena merupakan upaya pencapaian tujuan dan pilihan tersebut memiliki dampak yang sama besarnya dengan pilihan langkah untuk melakukan sesuatu kepada masyarakat.

Senada dengan pandangan Dye adalah George C Edwards III dan Ira Sharkansky dalam Suwitri (2012) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan atau dalam policy statement yang berbentuk pidato- pidato dan wacana yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang segera ditindaklanjuti dengan program- program dan tindakan pemerintah.

Dari sudut pandang terhadap pengertian kebijakan publik, tampaknya bahwa kebijakan publik hanya dapat ditetapkan pemerintah, pihak- pihak lain atau yang lebih dikenal dengan sebutan aktor- aktor kebijakan publik hanya dapat mempengaruhi proses kebijakan publik dalam batas kewenangannya masing- masing. Menurut Thomas R Dye dalam Suwitri (2012), hal ini disebabkan oleh 3 hal dari kewenangan yang dimiliki pemerintah, yaitu berikut ini

1. Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk memberlakukan kebijakan publik secara universal kepada publik yang menjadi sasaran (*target group*).
2. Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk melegitimasi dan mengesahkan kebijakan publik sehingga dapat diberlakukan secara universal kepada publik yang menjadi sasaran (*target group*)
3. Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan kebijakan publik secara paksa kepada publik yang menjadi sasaran (*target group*).

Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan- badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Jadi kebijakan publik itu muncul dari serangkaian tindakan yang secara definitif itu berkaitan dengan tujuan yang dikehendaki. Pengertiannya adalah kebijakan publik itu tidak timbul secara mendadak, jadi melalui proses yang berkaitan dengan tujuan kebijakan. Kebijakan publik merupakan rangkaian tahapan- tahapan proses dan akan mempengaruhi proses tahapan- tahapan lainnya.

Proses kebijakan publik tersebut melewati empat tahap rangkaian tindakan pemerintah. Yang pertama, tahap persepsi/definisi agregasi, organisasi, representasi, dan penyusunan agenda, yang merupakan tindakan-tindakan yang membawa permasalahan kepada pemerintah. Kedua, tahap formulasi, legitimasi, dan penganggaran. Yang dasarnya merupakan suatu tindakan langsung pemerintah untuk mengembangkan dan mendanai program. Ketiga, tahap implementasi atau pelaksanaan ini adalah sebagai tindakan pemerintah untuk kembali pada permasalahan. Keempat, tahap evaluasi dan penyesuaian/terminasi ini dasarnya adalah kembalinya program kepada pemerintah untuk dilakukan peninjauan kembali atau perubahan-perubahan bilamana diperlukan. Tahap implementasi merupakan tahap terpenting karena diwaktu pelaksanaan kebijakan sering timbul masalah-masalah besar yang membatasi efektivitas kebijakan.

Dalam melaksanakan roda pemerintahan tentunya ada kebijakan alternatif. Alternatif kebijakan tidak dibatasi pada satu orang atau satu kelompok sebagai pelakunya. Untuk itu kemungkinan akan ada dua atau lebih kelompok yang merumuskan alternatif kebijakan yang saling bersaing untuk memberikan usulan. Persaingan tersebut membawa resiko ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang kalah. Maka dari itu peran analisis alternatif kebijakan sebagai subsistem kebijakan merupakan sistem politik yang juga merupakan keseluruhan sistem kelompok kepentingan (Sawitri, 2010).

Menurut R.A.W. Rhodes dalam Sawitri (2010), interaksi antara sejumlah departemen dan organisasi pemerintah dengan organisasi pemerintah dengan organisasi masyarakat merupakan *policy network* yang bersifat instrumental dalam proses kebijakan publik. Kekuatan *policy network* atau jaringan kebijakan

tergantung pada tingkat integrasi, kemampuan keanggotaan, sumberdaya dan hubungan baik antar jaringan kebijakan dengan publik.

### 3. Teori Pembangunan Pertanian

Menurut Sitorus (2004), sumberdaya lahan (*land resource*) adalah lingkungan fisik yang terdiri dari iklim, relief, tanah, air dan vegetasi serta benda yang ada di atasnya sepanjang ada pengaruhnya terhadap penggunaan lahan. Dalam hal ini lahan juga mengandung pengertian ruang (*space*) atau tempat. Sumberdaya lahan merupakan sumberdaya alam yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia karena sumberdaya lahan diperlukan dalam setiap kegiatan manusia. Penggunaan sumberdaya lahan khususnya untuk aktifitas pertanian pada umumnya ditentukan oleh kemampuan lahan atau kesesuaian lahan, dan untuk penggunaan daerah industri, pemukiman dan perdagangan ditentukan oleh lokasi ekonomi yaitu jarak sumberdaya lahan dari pusat pasar.

Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian (2008), mendefinisikan lahan potensial untuk pertanian dan lahan tersedia untuk pengembangan pertanian. Lahan potensial untuk pertanian adalah lahan yang secara biofisik terutama dari aspek topografi/lereng, iklim, sifat fisika, kimia, dan biologi tanah sesuai atau cocok dikembangkan untuk pertanian. Sesuai atau cocok berarti lahan tersebut secara teknis-agronomis mampu mendukung pertumbuhan tanaman dan/atau perkembangan ternak secara optimal. Jika lahan tersebut dikelola dengan baik tidak akan mengganggu kelestarian sumberdaya dan lingkungan. Lahan potensial belum mempertimbangkan aspek sosial dan hukum, seperti status kepemilikan

lahan dan peruntukannya, namun sudah mempertimbangkan penetapan kawasan hutan konservasi dan hutan lindung. Lahan tersedia untuk pengembangan pertanian adalah lahan potensial (sesuai) secara fisik untuk pertanian yang saat ini belum dimanfaatkan baik untuk pertanian maupun non pertanian, yaitu lahan yang ditumbuhi oleh alang- alang atau semak belukar. Sama dengan lahan potensial, lahan tersedia juga belum mempertimbangkan status kepemilikan, baik secara adat maupun undang- undang agraria. Oleh sebab itu lahan potensial dan lahan tersedia dapat berada pada kawasan budidaya yang dapat berupa lahan basah (sistem sawah) dan lahan kering yang sudah diusahakan, atau berada pada kawasan budidaya hutan (hutan produksi atau hutan konversi, hutan tanaman industri atau kawasan Hak Pengusahaan Hutan), baik yang dikelola Perhutani dan Perkebunan Negara maupun swasta.

Sistem keterkaitan konversi lahan dengan berbagai komponen sistem ketahanan pangan nasional merupakan sistem dengan keterkaitan yang sangat kompleks. Kebijakan yang terkait dengan pengendalian konversi lahan pada sisi produksi pangan ditentukan oleh luas lahan produksi dan produktivitas lahan, sedangkan luas lahan produksi pertanian ditentukan oleh pengembangan atau pemeliharaan irigasi dan pembukaan, pencetakan lahan baru yang selanjutnya ditentukan oleh ketersediaan lahan potensial yang belum dikembangkan dan lahan pertanian kering serta kebijakan perencanaan zonasi/ tata ruang/ sistem keagrariaan. Ketersediaan lahan pertanian kering akan mempengaruhi kegiatan konversi lahan pertanian. Selanjutnya sistem produktivitas lahan ditentukan oleh kapasitas SDM pertanian dan fragmentasi lahan pertanian selanjutnya menentukan *land rent* lahan pertanian dan pendapatan petani (Rustiadi dan Wafda, 2008).

Pembangunan dan pertanian dapat berjalan berdampingan hanya jika kebijakan perencanaan penggunaan lahan diberlakukan dengan ketat. Kebijakan pelestarian lahan pertanian akan efektif, jika dapat mempengaruhi dan meningkatkan nilai *land rent* dalam empat cara, yaitu: (1) Dapat meningkatkan nilai produktif lahan pertanian, (2) Dapat menstabilkan, mengurangi, atau menghilangkan nilai konsumtif atas lahan pertanian, (3) Dapat menghilangkan nilai spekulatif lahan pertanian yang tidak efisien, yang bisa terjadi hanya jika nilai spekulatif dihubungkan dengan dampak situasi perkotaan, tidak efisiennya subsidi pembangunan perkotaan, dan kurang menghargai penyediaan barang publik sumberdaya lahan dan (4) Dapat menghilangkan sindrom kefanaan, yaitu ketidakpercayaan dikalangan petani pada sektor pertanian.

Tersedianya sumber daya lahan pertanian tanaman pangan yang berkelanjutan merupakan syarat untuk ketahanan pangan nasional. Ketersediaan lahan pertanian pangan sangat berkaitan erat dengan beberapa hal, yaitu ; (1) Potensi sumber daya lahan pertanian pangan, (2) Produktivitas lahan, (3) Fragmentasi lahan pertanian, (4) Skala luasan penguasaan lahan pertanian, (5) Sistem irigasi, (6) *Land rent* lahan pertanian, (7) Konversi, (8) Pendapatan petani, (9) Kapasitas SDM pertanian serta, (10) Kebijakan di bidang pertanian (Rustiadi dan Wafda, 2008).

Nelson (1992) menyatakan bahwa pembangunan dan sektor pertanian dapat berjalan berdampingan hanya jika kebijakan perencanaan penggunaan lahan diberlakukan dengan ketat. Undang- Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diharapkan menjadi salah

satu kebijakan yang dapat mengatur tentang perencanaan penggunaan lahan, khususnya lahan pertanian pangan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang dimaksud dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kewasannya secara berkelanjutan. Undang- undang ini digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melindungi lahan pertanian pangan dalam rangka ketahanan dan kedaulatan pangan nasional (Rustiadi et al, 2010)

Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan berdasarkan perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang meliputi: (1) kawasan pertanian pangan berkelanjutan, (2) lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan (3) lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan. Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan berjenjang, dimana rencana PLPPB nasional menjadi acuan pada perencanaan PLPPB provinsi. Sedangkan rencana PLPPB provinsi dijadikan acuan dalam perencanaan PLPPB kabupaten/ kota (Rustiadi et al, 2010).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, lahan pertanian dan lahan cadangan yang berada di dalam dan/ atau diluar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) ditentukan dengan menggunakan beberapa kriteria, yaitu:

- Kesesuaian lahan, KP2B ditetapkan pada lahan yang secara biofisik terutama dari aspek kelerengan, iklim, sifat fisik, kimia dan biologi cocok untuk dikembangkan pertanian pangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.
- Ketersediaan infrastruktur, KP2B dengan memperhatikan ketersediaan infrastruktur pendukung kegiatan pertanian pangan, diantaranya sistem irigasi, jalan dan jembatan.
- Penggunaan lahan aktual (kondisi existing), kriteria lain yang digunakan dalam menetapkan KP2B adalah dengan melihat bentuk/ kondisi penutupan permukaan lahan atau pemanfaatan lahan yang merupakan bentuk alami maupun buatan manusia.
- Potensi teknis lahan, merupakan salah satu kriteria yang harus diperhatikan dalam menetapkan KP2B. Yang dimaksud dengan potensi teknis lahan adalah lahan yang secara biofisik, terutama dari aspek topografi/ lereng, iklim, sifat fisika, kimia dan biologi tanah sesuai atau cocok dikembangkan pertanian.
- Luasan satuan hamparan lahan, dalam menetapkan KP2B dilakukan dengan mempertimbangkan sebaran dan luasan hamparan lahan yang menjadi satu kesatuan sistem produksi pertanian yang terkait sehingga tercapai skala ekonomi sosial budaya yang mendukung produktivitas dan efisiensi produk.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, disebutkan bahwa kawasan yang dapat ditetapkan menjadi KP2B harus memenuhi

kriteria : (a) memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, (b) menghasilkan pangan pokok dengan tingkat produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pangan sebagian besar masyarakat setempat, kabupaten/ kota, provinsi dan/atau nasional.

Wafida (2008) berpendapat bahwa dari perspektif sistem geopolitik global dan perkembangan teknologi seperti saat ini hingga beberapa dekade yang akan datang, pemenuhan kebutuhan pangan merupakan tuntutan yang masih harus terus dipertahankan secara kolektif. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang ketahanan pangan menyatakan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Ketahanan pangan mencakup tiga aspek, yaitu: (1) Ketersediaan, bahwa pangan tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik jumlah maupun mutunya serta aman, (2) Distribusi, pasokan pangan dapat menjangkau seluruh wilayah sehingga harga stabil dan terjangkau oleh rumah tangga, (3) Konsumsi, yaitu setiap rumah tangga dapat mengakses pangan yang cukup dan mampu mengelola konsumsi sesuai kaidah gizi dan kesehatan serta preferensinya.

Menurut Suryana (2005), permasalahan utama yang dihadapi dalam mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia saat ini adalah bahwa pertumbuhan permintaan pangan yang lebih cepat dari pertumbuhan penyediaan. Permintaan yang meningkat merupakan resultante dari peningkatan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya beli masyarakat, dan perubahan selera. Sementara itu, pertumbuhan kapasitas produksi pangan nasional cukup lambat dan

stagnan, karena: (a) Adanya kompetisi dalam pemanfaatan sumberdaya lahan dan air, serta (b) Stagnansi pertumbuhan produktivitas lahan dan tenaga kerja pertanian. Ketidakseimbangan pertumbuhan permintaan dan pertumbuhan kapasitas produksi nasional mengakibatkan kecenderungan pangan nasional dari impor meningkat, dan kondisi ini diterjemahkan sebagai ketidakmandirian penyediaan pangan nasional. Dengan kata lain hal ini dapat diartikan pula penyediaan pangan nasional (dari produksi domestik) yang tidak stabil.

Menurut Sumardjo (2009), kebijakan pangan tampaknya perlu mengarah pada:

- a. Terjaminnya pangan secara nasional (*food availability*), baik dari perspektif produksi, ketersediaan, dan distribusi, maupun diversifikasi konsumsi pangan.
- b. Terjaminnya ketahanan pangan (*food security*) yang mampu mengatasi gejolak ketidakpastian faktor alam maupun pengaruh dari luar negeri, sehingga perlu upaya tertentu yang dapat menjamin kestabilan harga.
- c. Terjaminnya akses rumah tangga terhadap kebutuhan pangan (*food assesibility*) sesuai daya beli sehingga menjamin ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga
- d. Terjaminnya mutu makanan masyarakat dengan konsumsi gizi yang seimbang (*food quality*) melalui diversifikasi tingkat produksi, pengolahan maupun distribusi.
- e. Tercapainya penyediaan pangan yang aman (*food safety*) agar terhindar dari bahan- bahan yang merugikan lingkungan maupun kesehatan masyarakat.

#### 4. Model- Model Implementasi Kebijakan Publik

Model adalah abstraksi dari realita yang ada. Mustopadijaya dalam Sawitri (2010) merumuskan model adalah penyederhanaan dari kenyataan persoalan yang dihadapi, diwujudkan dalam hubungan-hubungan kausal atau fungsional. Model dapat digambarkan dalam bentuk *skematik model* (seperti *flowchart* dan *arrow diagram*), *fisika model* (seperti *miniature*), *game model* (seperti latihan kepemimpinan, latihan manajemen), *simbolik model* (seperti *ekonometrika* dan program komputer).

Merencanakan suatu kebijakan publik ini akan lebih mudah apabila menggunakan model. Karena dengan model penggambaran secara abstrak dari realita rencana kebijakan publik tergambar. Sebab kebijakan publik juga akan lebih mudah dimengerti ataupun dipelajari dengan bantuan menggunakan model. Model adalah merupakan alat bantu dalam perumusan dan pembuatan kebijakan publik. Adapun manfaat dari penggunaan model adalah mempermudah deskripsi persoalan secara struktural. Artinya dapat membantu dalam melakukan prediksi akibat- akibat yang timbul dari perubahan- perubahan karena adanya faktor penyebab. Ada beberapa model implementasi kebijakan, diantaranya:

##### a. Model Van Meter dan Van Horn

Ada empat variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

- 1) Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi
- 2) Karakteristik agen pelaksana/implementor didukung sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*nan-human resources*).

- 3) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi.
- 4) Kecenderungan (*disposition*) pelaksanaan/implementor.

#### b. Model Hogwood dan Gunn

Para pakar ini mensyaratkan bahwa untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat, yaitu:

- 1) Jaminan kondisi eksternal lembaga implementor tidak akan menimbulkan masalah besar.
- 2) Tersedianya sumberdaya yang memadai, termasuk sumberdaya waktu
- 3) Keterpaduan kerjasama sumberdaya dan sumber aktor.
- 4) Kebijakan memiliki hubungan kausal yang handal
- 5) Semakin sedikit hubungan kausalitas yang terjadi.
- 6) Hubungan saling ketergantungan tergolong kecil.
- 7) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
- 8) Tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam tempat yang benar
- 9) Komunikasi dan koordinasi sempurna
- 10) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

#### c. Model Mazmanian dan Sabatier

Model ini mengklasifikasikan implementasi kebijakan kedalam tiga variabel, yaitu:

- 1) variabel independen,
- 2) variabel intervening, dan
- 3) variabel dependen

#### d. Model Goggin

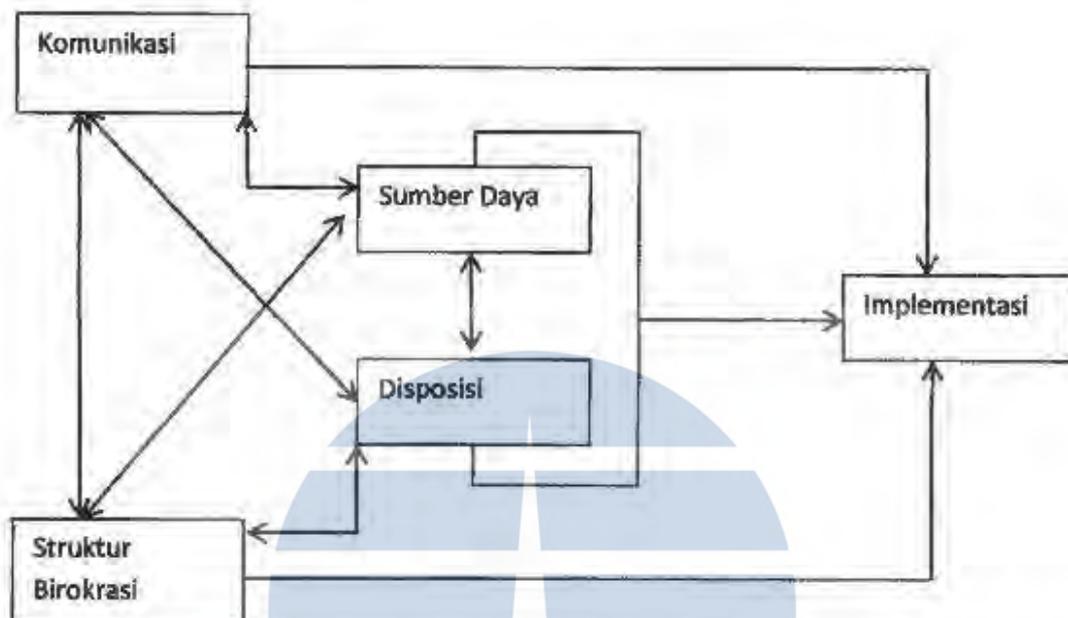
Goggin menyebutnya sebagai *communication model* untuk implementasi kebijakan sebagaimana Model Mazmanian dan Sabarotier dengan tiga variabelnya, Goggin menambahnya dengan faktor komunikasi sebagai penggeraknya

#### e. Model Edward III

Pada penelitian ini, untuk menganalisis implementasi program ini, peneliti melakukan penelitian dengan pendekatan model implementasi kebijakan George C. Edwards III. Menurut Edwards III (1980) dalam Winarno (2012), studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi *public administration* dan *public policy*. Dalam mengkaji implementasi kebijakan, Edwards mulai dengan mengajukan dua pertanyaan : prakondisi- prakondisi apa yang diperlukan sehingga suatu implementasi kebijakan berhasil?, Hambatan- hambatan utama apa yang mengakibatkan suatu implementasi gagal?, Edwards berusaha menjawab dua pertanyaan itu dengan membicarakan empat faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik. Keempat faktor atau variabel ini harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamik yang meliputi interaksi banyak faktor. Variabel- variabel yang dimaksud oleh Edwards III adalah:

1. Komunikasi (*Communications*)
2. Sumber Daya (*Resources*)

3. Sikap (*Dispositions/Attitudes*)
4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)



Bagan 2.1. Model Pendekatan *Direct and Indirect Impact on Implementation* George Edward III

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut George C Edward dalam Agustino (2002) adalah komunikasi. Komunikasi, menurutnya lebih lanjut, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan di dan para implementor akan

semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut, yaitu :

- a. Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (*miskomunikasi*), hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.
- b. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.
- c. Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Variabel atau faktor kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumberdaya. Sumberdaya merupakan

hal penting lainnya. Indikator sumber-sumberdaya terdiri dari beberapa elemen, yaitu :

- a. Staf, sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
- b. Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
- c. Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi

kebijakan. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Disatu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan; tetapi disisi lain, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

- d. Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut George C Edward III, adalah :

- a. Pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan

oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pegangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih khusus lagi pada kepentingan warga.

- b. Insentif, Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

Variabel keempat, menurut Edward III, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebarkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat

mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Dua karakteristik, menurut Edward III yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah lebih baik, adalah melakukan *Standar Operating Prosedures (SOPs)* dan melaksanakan *Fragmentasi*. SOPs adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administratur/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga). Sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

##### **5. Program Pencetakan Sawah Baru**

Kegiatan pencetakan sawah diarahkan pada lahan irigasi, lahan rawa dan lahan tadah hujan dengan mengikuti norma, standar teknis, prosedur dan kriteria tertentu. Untuk Program Pencetakan Sawah di Kabupaten Kotawaringin Barat kegiatan pencetakan sawah lebih diarahkan pada daerah lahan rawa dan lahan tadah hujan. Pencetakan sawah pada lahan rawa merupakan upaya untuk menambah baku lahan sawah yang dilakukan didaerah rawa yang sudah mempunyai dan atau rencana pengembangan jaringan drainase sampai pada tingkat tersier, serta lahan harus berada pada kawasan budidaya dan bukan berada pada kawasan hutan lindung. Sedangkan pencetakan sawah pada lahan tadah hujan merupakan upaya untuk menambah baku lahan sawah yang dilakukan

didaerah tadah hujan yang belum dimanfaatkan dan mempunyai curah hujan yang cukup untuk pertumbuhan tanaman padi serta potensi sumber-sumber air lainnya yang dapat dikembangkan untuk mendukung pengairan pada lokasi tersebut, serta lahan harus berada pada kawasan budidaya dan bukan berada pada kawasan hutan lindung.

Untuk standar teknis lokasi pencetakan sawah yaitu berada pada satu hamparan, luas satu hamparan  $\geq 10$  hektar, dekat dengan pemukiman, untuk lahan rawa kedalaman pirit dengan kisaran minimal antara 50-60 cm, sedangkan untuk lahan tadah hujan lebih diutamakan/diprioritaskan pada lahan dengan kemiringan lahan  $< 5\%$ .

Untuk kriteria Program Pencetakan Sawah pada lahan rawa yaitu lahan sesuai untuk tanaman padi sawah rawa pasang surut dan atau lebak berdasarkan ketentuan dan kriteria yang berlaku, sudah ada petani dalam suatu wadah kelompok, status petani jelas bisa pemilik penggarap atau penggarap, luas lahan pemilik penggarap atau penggarap maksimum 2 ha/KK, petugas lapangan sudah ada, serta lokasi mudah diakses atau dekat jalan desa.

Sedangkan kriteria Program Pencetakan Sawah untuk lahan tadah hujan yaitu mempunyai bulan basah  $> 3$  bulan terutama yang tersedia air untuk 1 kali tanam setahun, lahan sesuai untuk tanaman padi sawah tadah hujan berdasarkan ketentuan dan kriteria yang berlaku, sudah ada petani dalam suatu wadah kelompok, status petani jelas bisa pemilik penggarap atau penggarap, luas lahan pemilik penggarap atau penggarap maksimum 2 ha/KK, petugas lapangan sudah ada, serta lokasi mudah diakses atau dekat jalan desa.

Kegiatan pencetakan sawah di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2013 dibiayai dari dana Tugas Pembantuan (TP) pada tahun anggaran 2013 berada pada Akun Belanja Bantuan Sosial dengan kategori bantuan sosial untuk pemberdayaan sosial dalam bentuk uang. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kegiatan dengan akun belanja ini dapat dilaksanakan melalui pola transfer uang (ditransfer ke rekening kelompok sasaran) atau melalui pola transfer barang (pengadaannya melalui pola kontraktual oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)). Khusus untuk Program Cetak Sawah tahun anggaran 2013, pola pelaksanaannya menggunakan pola transfer uang ke rekening kelompok.

Dalam jadwal pelaksanaan kegiatan pencetakan sawah melalui pola transfer uang (transfer ke rekening kelompok) perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penetapan koordinator lapangan/ tim teknis bantuan sosial pencetakan sawah
2. Sosialisasi dan *up-dating* data calon petani/calon lokasi dalam hal jumlah petani dan tenaga kerja yang tersedia di wilayah tersebut, infrastruktur yang ada seperti sarana jalan (dapat tidaknya dilalui oleh kendaraan roda 4 atau peralatan berat lainnya untuk menuju ke lokasi tersebut) dan jaringan irigasi maupun drainase.
3. Penetapan kelompok sasaran diarahkan kepada kelompok tani yang benar-benar membutuhkan kegiatan pencetakan sawah dengan kondisi lahan sesuai dengan persyaratan teknis yang telah ditetapkan.

4. Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) pencetakan sawah dilaksanakan bersama-sama oleh kelompok secara musyawarah yang dipandu oleh koordinator lapangan/tim teknis dengan mendasarkan kepada hasil SID. (Penyusunan RUKK paling lambat 5 hari kerja).
5. Pembuatan dan penandatanganan naskah perjanjian kerjasama antara KPA dan kelompok tani
6. Pembuatan rekening kelompok juga harus memperhatikan jarak tempuh kelompok tersebut dengan Bank yang terdekat.
7. Iklim (datangnya musim hujan dan kemarau serta lamanya musim ini terjadi di wilayah setempat) serta waktu musim tanam pada wilayah tersebut perlu menjadi perhatian agar pelaksanaan konstruksi tidak banyak terganggu dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan.
8. Informasi tentang keberadaan dan jumlah perusahaan penyewaan peralatan berat seperti bulldozer, excavator dan lain-lain perlu dimiliki baik oleh petugas maupun oleh kelompok.
9. Atas dasar poin 1 sampai dengan poin 8, maka pelaksanaan pekerjaan konstruksi pencetakan sawah harus sudah dimulai begitu DIPA dan POK diterima.
10. Pekerjaan konstruksi harus sudah selesai pada akhir musim kemarau yang dapat dilanjutkan dengan penanaman pada saat awal musim hujan atau disesuaikan dengan iklim di wilayah setempat.

## **B. Kajian Terdahulu**

### **1. Strategi Pemanfaatan Sawah Bukaan Baru (Kasus di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat) oleh Edi Basuno, M. Sofyan Sour, dan Chairul Muslim**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi strategi pemanfaatan sawah bukaan baru di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Sawah bukaan baru tidak secara otomatis menjadi sawah yang siap digarap, tetapi memerlukan berbagai upaya khusus, baik dari aspek teknis maupun non teknis. Aspek teknis dikembangkan dengan melakukan berbagai ujicoba teknologi melalui suatu pengkajian secara bertahap, sedangkan non teknis berkaitan dengan mempersiapkan kelembagaannya.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu berbagai upaya dalam mengantisipasi pencetakan sawah baru di Kabupaten Sumbawa Besar telah diungkapkan. Agar pencapaian target dari kegiatan pencetakan sawah baru tercapai, maka penanganan sawah bukaan baru ternyata tidak hanya mencakup berbagai aspek teknis, tetapi juga aspek sosial kelembagan. Pembentukan dan penguatan kelompok kooperator yang dilakukan dari awal kegiatan menjadi kunci terpenting dari optimalisasi penggunaan sawah bukaan baru tersebut. Melalui kelompok, berbagai tahapan pengkajian dapat dilaksanakan dengan baik, mulai dari memperkenalkan varietas baru, memperkenalkan jarak tanam, pemupukan sampai pada terbentuknya koperasi. Disamping itu petani kooperator juga disiapkan menjadi petani yang mampu menjadi penyuluh bagi petani nonkooperator.

## **2. Analisis Akses Petani Terhadap Lahan Cetak Sawah Baru Pada Program Perluasan Lahan Sawah di Kenagarian Tapakis Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman oleh Syahrial**

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan akses petani terhadap Program Perluasan Lahan Sawah dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perbedaan perolehan luas lahan antar masing-masing petani peserta pada program sawah cetakan baru di Kenagarian Tapakis Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan Juli 2011.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Responden dalam penelitian ini adalah kelompok tani peserta program perluasan lahan sawah tahun anggaran 2009 sebanyak 30 % dari 123 orang yang terbagi dalam 3 kelompok tani dengan cara *Stratified Random Sampling* dan petani non peserta sebanyak 30 orang. Data dianalisa secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Perluasan Lahan Sawah di Kenagarian Tapakis Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman dapat diakses oleh petani yang merupakan keluarga *saparuik* dalam suku Chaniago sebagai pemegang hak ulayat. Petani lain yang bisa bergabung dalam program ini adalah orang-orang yang memiliki hubungan dengan suku Chaniago yaitu mereka yang memiliki hubungan karena pernikahan dua keluarga. Disamping itu, petani yang bergabung dalam program juga telah memenuhi persyaratan yang diajukan pemerintah seperti memiliki luas lahan yang kecil sebelum program, petani yang telah bergabung dalam anggota kelompok penerima progra serta petani yang membutuhkan lahan sebagai

pendapatan utama keluarga. Sebagian anggota kaum Chaniago yang seharusnya mengelola tanah ulayat mereka ternyata tidak ikut berpartisipasi dalam Program Cetak Sawah Baru. Hal ini disebabkan antara lain sebagian anggota kaum Chaniago memiliki pekerjaan utama tidak sebagai petani, sebagian dari anggota kaum Chaniago telah pergi merantau ke daerah lain, sebagian anggota kaum Chaniago telah memiliki lahan lain yang sudah diolah. Selain itu tingkat produktivitas lahan bukaan baru juga masih rendah sehingga turut berpengaruh pada minat petani untuk menggarap lahan tersebut. Bertolak dari hal tersebut, maka diberilah kesempatan bagi petani lain di luar kaum Chaniago untuk menggarap tanah mereka dengan status sebagai petani penggarap.

### **3. Potensi dan Kendala Pengembangan Sumber Daya Lahan untuk Pencetakan Sawah Irigasi di Luar Jawa oleh Hikmatullah, Sawiyo, dan Nata Suharta.**

Pada Penelitian ini peneliti membahas mengenai alih fungsi lahan sawah irigasi di Jawa yang terus berlangsung dan sulit dihindari, berdampak serius terhadap penyediaan beras nasional. Salah satu alternatif untuk mengatasi penciutan lahan sawah tersebut adalah melaksanakan program ekstensifikasi pertanian melalui pencetakan sawah di luar Jawa, terutama di daerah yang telah memiliki jaringan irigasi. Untuk mengurangi risiko kegagalan akibat faktor tanah, maka sejak awal perlu diketahui sifat-sifat dan penyebaran jenis-jenis tanah, kesesuaian lahan dan kendalanya. Kendala pencetakan sawah irigasi terdiri atas faktor topografi atau lereng dan faktor

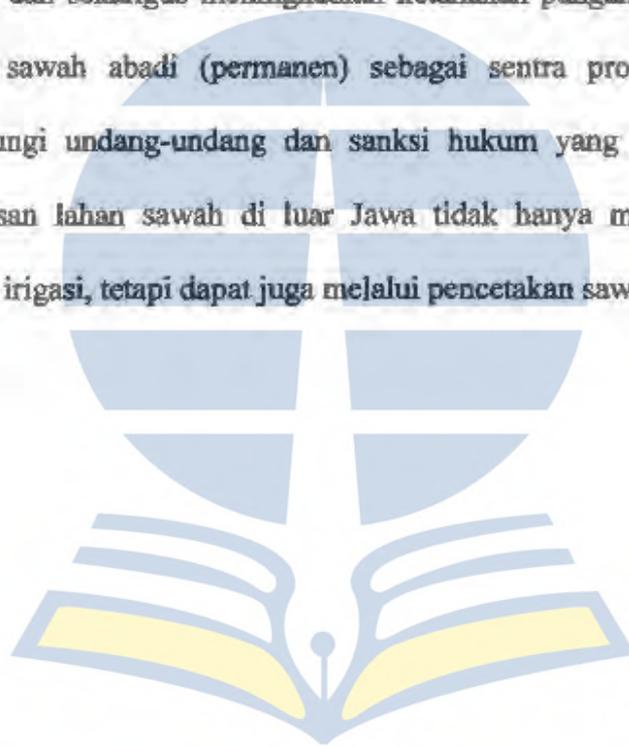
tanah yang menonjol adalah laju infiltrasi, drainase, dan kesuburan tanah. Kendala kesuburan tanah yang menonjol adalah rendahnya kadar C organik, kekahatan unsur hara terutama fosfat, KTK dan kejenuhan basa rendah, reaksi tanah masam, dan keracunan Al dan Fe. Kendala yang muncul apabila lahan kering digenangi untuk dibuat sawah adalah pada tahun-tahun pertama akan timbul perubahan sifat-sifat kimia tanah, yaitu bentuk reduksi Fe dan Mn dalam konsentrasi tinggi yang dapat menimbulkan keracunan pada tanaman padi. Penggenangan pada lahan sawah bukaan baru dapat mempengaruhi kesuburan tanah, baik bersifat positif maupun negatif. Pada lahan basah atau rawa, yang didominasi oleh tanah gambut, kendalanya adalah kelebihan air/genangan sehingga perlu drainase. Tanah gambut tidak cocok untuk sawah irigasi karena bersifat sarang dan mudah kekeringan, kecuali gambut dangkal yang berada diatas lapisan tanah mineral bertekstur liat masih mungkin dikembangkan untuk sawah irigasi. Lapisan tanah mineral tersebut dapat mengurangi kehilangan air dan unsur hara.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu :

- 1) Untuk mengantisipasi penciutan lahan sawah irigasi di Jawa, program pencetakan sawah irigasi di luar Jawa dapat dilakukan baik pada lahan kering maupun lahan basah. Pencetakan terutama diarahkan pada daerah-daerah yang telah memiliki jaringan irigasi, infrastruktur, dan dekat pemukiman penduduk, sehingga dapat menghemat biaya pembangunan bendungan dan saluran irigasi baru.
- 2) Kendala penggunaan lahan yang menonjol dilokasi calon pencetakan sawah irigasi adalah kesuburan tanah rendah, topografi/lereng curam, dan

laju infiltrasi cepat. Hal tersebut dapat diatasi dengan pemupukan, terasering dan pelumpuran.

- 3) Produktivitas lahan sawah irigasi di luar Jawa yang lebih rendah daripada di Jawa, dapat ditingkatkan dengan menerapkan paket teknologi, seperti pemupukan dengan takaran tinggi, penambahan bahan organik melalui pengembalian sisa-sisa tanaman, dan pengaturan pemberian air irigasi.
- 4) Untuk mempertahankan dan melindungi lahan sawah irigasi dari alih fungsi dan sekaligus meningkatkan ketahanan pangan, perlu ditetapkan lahan sawah abadi (permanen) sebagai sentra produksi padi, yang dilindungi undang-undang dan sanksi hukum yang tegas. Selain itu, perluasan lahan sawah di luar Jawa tidak hanya melalui pencetakan sawah irigasi, tetapi dapat juga melalui pencetakan sawah tadah hujan.



### C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah:



Bagan 2.2. Kerangka Pemikiran

Adanya keinginan pelaksana program untuk pengimplementasian program pencetakan sawah baru untuk pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat serta keinginan masyarakat untuk pengoptimalan program pencetakan sawah baru mendorong pelaksana dan pelaku program untuk melihat dan menelaah faktor- faktor yang belum mantap diantaranya komunikasi, sumberdaya, sikap, dan struktur birokrasi agar terjadinya perubahan faktor- faktor tersebut menjadi lebih mantap,

sehingga hasil yang diharapkan adalah optimalnya program pencetakan sawah baru untuk pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat. Adapun faktor- faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program tersebut berikut penjelasannya :

1. Komunikasi, pada suatu implementasi kebijakan/program, komunikasi yang baik sangat diperlukan sehingga apa yang harus dilakukan oleh implementator dapat dipahami dengan baik. Indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut, yaitu :

- a. Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.
- b. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureauacrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

- c. Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.
  - d. Koordinasi, agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan koordinasi yang baik antara sesama pelaksana kebijakan dilapangan.
2. Variabel atau faktor kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumberdaya. Sumberdaya merupakan hal penting lainnya. Indikator sumber-sumberdaya terdiri dari beberapa elemen, yaitu :
- a. Staf/Sumber Daya Manusia (SDM), sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
  - b. Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan.

Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

c. Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Disatu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan; tetapi disisi lain, efektivitas akan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

d. Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah disposisi atau sikap. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut George C Edward III, adalah :

- a. Sikap implementator, untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka diperlukan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan untuk dapat mensukseskan kebijakan tersebut
- b. Dukungan Pimpinan, hal ini sangat diperlukan dalam implementasi suatu program, apabila ada suatu dukungan yang kuat dari pimpinan maka pelaksanaan suatu program akan lebih mantap.
- c. Insentif, Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana

kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

d. Transparansi, hal ini diperlukan agar dalam pelaksanaan suatu program, tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang berakibat dapat mengganggu dalam melaksanakan program tersebut.

4. Variabel keempat, menurut Edward III, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebarkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Dua karakteristik, menurut Edward III yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah lebih baik, adalah melakukan *Standar Operating Procedures (SOPs)* dan melaksanakan *Fragmentasi*. SOPs adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai

(atau pelaksana kebijakan/administratur/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga). Sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

#### **D. Operasionalisasi Konsep**

Pada proses implementasi program ini dengan model Edward III, beberapa hal yang menjadi operasionalisasi konsep dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Apakah dalam pelaksanaan Implementasi Program Pencetakan Sawah Baru ini adanya suatu komunikasi yang baik antara sesama implementator.
2. Apakah dalam pelaksanaan Implementasi Program Pencetakan Sawah Baru ini aspek sumberdaya dapat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan ini
3. Apakah dalam pelaksanaan Implementasi Program Pencetakan Sawah Baru ini aspek disposisi/karakter implementator dapat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program ini.
4. Apakah dalam pelaksanaan Implementasi Program Pencetakan Sawah Baru ini aspek struktur birokrasi dapat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program ini

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Desain Penelitian

Untuk melakukan penelitian yang dapat mencapai sasaran dan lebih terarah sesuai yang diinginkan, diperlukan suatu metode yang tepat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang mendalam mengenai implementasi program pencetakan sawah baru untuk pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat. Tipe penelitian yang dipergunakan yaitu tipe deskriptif eksploratif dengan metode kualitatif.

Pertimbangan penulis menggunakan penelitian kualitatif ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Lexy Moleong:

1. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apa bila berhadapan dengan kenyataan ganda
2. Metode ini secara tidak langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden
3. Metode ini lebih peka dan menyesuaikan diri dengan manajemen pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Pengambilan sampel dilakukan secara purposive. Responden adalah pemilik dan orang yang mengetahui seluk beluk lahan pertanian di Kabupaten Kotawaringin Barat. Analisis secara induktif untuk memahami fenomena yang terjadi dengan menghasilkan konsep. Konsep disarikan dari tema-tema dan unit-

unit informasi yang didasarkan pada hasil wawancara. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.

Menurut Keirl dan Miller dalam Moleong (2012) yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah “tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia pada kawasannya sendiri, dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya”. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

## **B. Sumber informasi dan Pemilihan Informan**

Kondisi lapangan yang sangat bervariasi, menyebabkan apa-apa yang seharusnya dilakukan oleh pewawancara menjadi kurang atau bahkan tidak terjadi. Pewawancara tidak sekedar harus mengerti apa yang seharusnya dilakukan, tetapi juga harus kreatif menangani persoalan yang muncul di lapangan. Tidak jarang responden memberikan respons yang tidak sesuai dengan harapan pewawancara. Tugas pewawancara tidak hanya bertanya, tetapi juga mendengarkan dengan seksama, merekam apa yang didengarnya, dan melakukan

pertanyaan ulang dan mendalam jika diperlukan. Lebih mudah membicarakan teknik wawancara dibanding dengan melaksanakannya.

Supaya tugas tersebut dapat dilakukannya dengan baik, maka pewawancara harus melatih diri dan mempersiapkan proses wawancara sebaik mungkin. Di bawah ini disajikan tahapan-tahapan yang secara umum dilakukan oleh sebagian besar pewawancara pada saat mereka berupaya mencari informasi dari responden penelitiannya. Setiap interaksi yang berlangsung dalam situasi sosial yang berbeda mempunyai dampak psikologis yang berbeda pula. Artinya walau pewawancara sudah mempunyai pengalaman dalam mewawancarai responden, namun penyelenggaraan pelatihan buat pewawancara masih diperlukan. Sasaran yang ingin dicapai oleh pelatihan wawancara adalah memberikan bekal kepada pewawancara berbagai pengetahuan dan ketrampilan dalam melaksanakan wawancara yang sesuai dengan karakteristik penelitian. Soal waktu, tempat, dan hal-hal yang bersifat teknis proses pelatihan, sangat relatif. Yang bersifat prinsip adalah isi pelatihan itu sendiri. Beberapa butir isi pelatihan yang umumnya disarankan adalah :

1. Penjelasan tentang tujuan dan kegunaan penelitian
2. Penjelasan tentang karakteristik (umum) responden yang akan diwawancarai. Usia, jenis kelamin, pendidikan, budaya, kondisi ekonomi, status sosial, dan lain sebagainya
3. Penjelasan peran apa yang harus dibawakan oleh pewawancara
4. Penjelasan tentang konsep penelitian
5. Penjelasan tentang butir-butir pertanyaan yang akan diajukan (maksud pertanyaan tersebut apa?)

6. Penjelasan tentang cara pencatatan, perekaman jawaban responden
7. Penjelasan tentang cara pengisian dan arti semua tanda yang ada dalam daftar pertanyaan
8. Prosedur wawancara, mulai dari memperkenalkan diri sampai dengan menutup wawancara.
9. Antisipasi menghadapi masalah yang tidak diinginkan.

### C. Instrumen Penelitian

Arikunto (2002) membagi data menjadi tiga kelompok besar yang pertama yaitu *person* atau data yang berupa yang memiliki kompetensi terhadap masalah yang diteliti, yang kedua yaitu *place* atau tempat dan alat yang digunakan dalam penelitian, atau kinerja dan aktifitas yang ada di dalamnya dan yang ketiga yaitu *paper* atau data yang bersumber dari dokumen. Dalam penelitian ini penulis lebih banyak menggunakan Narasumber yang berupa *person* atau responden sebagai informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Untuk menentukan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik dan tujuan-tujuan tertentu (*purposive sampling*), dengan cara bola salju (*snow ball*) yaitu menelusuri terus data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan yang ada.

Informan dalam penelitian ini dibedakan menjadi :

1. Informan Kunci (*Key Informan*)

Informan kunci dalam penelitian ini adalah petani yang berada di Kecamatan Arut Selatan dan Kecamatan Kumai.

## 2. Informan Pendukung

Informan pendukung dalam penelitian ini terdiri dari Tim Teknis Perluasan Sawah, yaitu diantaranya:

- Kepala Seksi Pengembangan Lahan dan Sumberdaya Air Distanak
- Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian dan Peternakan Distanak
- Kepala Bidang Pengembangan Produksi Pertanian Distanak
- Petugas Penyuluh Pertanian di wilayah penelitian
- Dan informan lain yang dirasakan perlu.

Selain informan pendukung penulis juga menggunakan sumber data yang berupa *place* atau *paper* untuk mendukung data yang bersumber dari *person* atau responden. Setelah memperoleh data dari informan peneliti melakukan *membercheck* atau pencocokan data yang didapatkan dari beberapa sumber sehingga data lebih valid dan lebih objektif.

## D. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan atau memperoleh data, menggunakan beberapa prosedur yaitu :

### 1. Observasi

Suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan atau fenomena-fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat disebut juga dengan observasi. Teknik observasi dalam penelitian adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi objek yang diteliti. Notoatmojo (2002) mengatakan bahwa observasi dalam penelitian adalah suatu hal perbuatan jiwa

secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya rangsangan pengindraan yang dilanjutkan dengan adanya pengamatan.

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang :

- a. Gambaran umum tentang keadaan pencetakan sawah baru.
- b. Gambaran tentang pengimplementasian program dalam rangka pencetakan sawah baru.

## 2. Interview/Wawancara

Interview adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti. Disamping itu juga Wawancara merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara bercakap-cakap, bersua muka dengan responden (*face to face*) wawancara adalah percakapan duabelah pihak dengan maksud tertentu. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi antara peneliti dengan responden.

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara yang bebas terpimpin, sebab sekalipun wawancara dilakukan secara bebas tetapi sudah dibatasi oleh struktur pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data sebagai berikut :

- a. Tujuan Implementasi Program Pencetakan Sawah Baru untuk pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.
- b. Bentuk-bentuk Implementasi Program Pemerintah Daerah dalam pencetakan sawah baru untuk pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan melihat dan menyelidiki data-data tertulis yang ada dalam buku, majalah, dokumen, surat-surat, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. Selain itu Dokumentasi merupakan suatu cara untuk memperoleh data yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat dokumenter, seperti kondisi persawahan, serta fasilitas-fasilitas yang dimiliki, jumlah petani, luasan lahan, dan hal-hal penting lainnya yang mendukung terhadap kelengkapan data.

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang :

- a. Kondisi dan Gambaran Umum Wilayah Lokasi Penelitian.
- b. Program Pencetakan Sawah Baru untuk Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat.
- c. Sarana dan Prasarana pendukung dalam rangka implementasi Program Pencetakan Sawah Baru untuk Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat

### D. METODE ANALISIS DATA

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Dalam hal ini Nasution (1988) menyatakan "Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan , dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Data yang telah terhimpun kemudian diklarifikasikan untuk dianalisa dengan menggunakan pendekatan analisa induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang khusus konkrit itu ditarik

generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. Selanjutnya menggunakan analisa data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, dengan tiga jenis kegiatan, yaitu; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar (Rosidi, 2009).

Alur pertama adalah reduksi data, merupakan kegiatan pemilihan, pemilahan, penyederhanaan dan transformasi data kasar yang berasal dari lapangan. Reduksi data berlangsung selama proses penelitian sampai tersusunnya laporan akhir penelitian. Sejak tahap ini analisa data sudah dilaksanakan karena reduksi data juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari analisis data. Alur kedua adalah penyajian data yang merupakan sekumpulan informasi yang tersusun dalam teks naratif. Penyusunan informasi tersebut dilakukan secara sistematis dalam bentuk tema-tema pembahasan sehingga mudah difahami makna yang terkandung di dalamnya. Alur ketiga adalah menarik kesimpulan atau verifikasi dari semua kumpulan makna setiap kategori, peneliti berusaha mencari makna esensial dari setiap tema yang disajikan dalam teks naratif yang berupa fokus penelitian. Selanjutnya ditarik kesimpulan untuk masing-masing fokus tersebut, tetapi dalam suatu kerangka yang sifatnya komprehensif. Ilustrasi dari prosedur di atas adalah pertama, peneliti mengadakan pengumpulan data di lapangan dengan menggunakan pedoman yang sudah disiapkan sebelumnya. Pada saat itulah dilakukan pencatatan dan tanya jawab dengan informan. Dari informasi yang diterima tersebut seringkali memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru, baik pada saat wawancara berlangsung maupun sudah berakhir atau disebut proses wawancara mendata.

Setelah data dilacak, diperdalam dan diuji kebenarannya, selanjutnya dicari maknanya berdasarkan kajian kritik yang digunakan, dengan cara pemilihan, pemilahan, dan penganalisaan data. Langkah selanjutnya data ditransformasikan dan disusun secara tematik dalam bentuk teks naratif sesuai dengan karakter masing-masing. Terakhir, dicari makna yang paling esensial dari masing-masing tema berupa fokus penelitian yang dituangkan dalam kesimpulan



## BAB IV

### TEMUAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Objek Penelitian

##### 1. Kondisi geografis

##### a. Luas Wilayah dan Letak Geografi

Luas Kabupaten Kotawaringin Barat adalah 10.759 km<sup>2</sup> terdiri dari 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Arut Selatan, Kumai, Kotawaringin Lama, Arut Utara, pangkalan Banteng dan Pangkalan Lada. Dua kecamatan terakhir adalah hasil pemekaran dari Kecamatan Kumai. Luas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat menurut Kecamatan dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 4.1. Luas Wilayah Per Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat

Kecamatan	Luas		Jumlah Desa/ Kelurahan
	km <sup>2</sup>	%	
1. Arut Selatan	2.400	22,31	20
2. Kumai	2.921	27,15	18
3. Kotawaringin Lama	1.218	11,32	17
4. Arut Utara	2.685	24,96	11
5. Pangkalan Lada	229	3,08	11
6. Pangkalan Banteng	1.306	10,21	17
<b>KOTAWARINGIN BARAT</b>	<b>10.759</b>	<b>100</b>	<b>94</b>

Sumber : Kotawaringin Barat Dalam Angka 2013

Kabupaten Kotawaringin Barat terletak antara 110°25'26" - 112°50'36" Bujur Timur (BT) dan antara 1°19'35" - 3°36'59"

Lintang Selatan (LS). Secara administratif letak geografisnya berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lamandau
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Seruyan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sukamara

#### **b. Topografi**

Keadaan topografis Kabupaten Kotawaringin Barat dapat digolongkan menjadi 4 (empat) bagian, yaitu dataran, daerah datar berombak, daerah berombak berbukit dan daerah berbukit- bukit yang terdiri dari :

- Sebelah utara adalah pegunungan dan macam tanah Latosol tahan terhadap erosi
- bagian tengah terdiri dari tanah Podsolik Merah Kuning juga tahan terhadap erosi.
- Sebelah selatan terdiri dari danau dan rawa- rawa Alluvial/ Organosol banyak mengandung air.

#### **c. Geomorfologi**

Keadaan geomorfologi/bentuk lahan terhadap ketinggian dari permukaan air laut dan persentase tingkat kemiringan menurut kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel 4.2. berikut ini.

Tabel 4.2. Tinggi dari permukaan laut dan persentase tingkat kemiringan menurut kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Kecamatan	Ketinggian (MDPL)	Kemiringan (%)
1. Arut Selatan	0- 500	0- 40
2. Kumai	0- 500	0- 40
3. Kotawaringin Lama	7- 100	0- 2 dan 15- 40
4. Arut Utara	25 – (>500)	2- (>40)
5. Pangkalan Lada	0- 500	0- 40
6. Pangkalan Banteng	0- 500	0- 40

Sumber : Kotawaringin Barat Dalam Angka 2013

#### d. Iklim

Faktor pembentuk iklim adalah curah hujan, suhu udara, kecepatan angin dan kelembaban. Iklim daerah Kabupaten Kotawaringin Barat secara umum beriklim tropis yang dipengaruhi oleh musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau pada bulan juni sampai dengan september sedangkan musim penghujan bulan oktober sampai dengan bulan mei. Suhu maksimum berkisar 31,0°C – 33,8°C dan suhu minimum antara 21,3°C – 23,4°C, kelembaban udara berkisar 85,58%.

#### e. Potensi Lahan

Jenis lahan/tanah pada suatu kawasan wilayah sangat berpengaruh terhadap pengalokasian lahan yang dialokasikan penggunaannya oleh Pemerintah Daerah dalam pengembangan pembangunan kawasan seperti pertanian, perkebunan, kehutanan dan perumahan.

Demikian pula dalam penggunaan tanah yang merupakan indikator intensitas pemanfaatan ruang.

Penggunaan tanah yang kompleks akan menunjukkan intensitas pemanfaatan ruang yang tinggi. Di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat tampilan lahan (*land cover*) masih didominasi oleh corak alamiah yaitu berupa hutan. Penggunaan lahan didominasi oleh perkebunan rakyat, perkebunan besar, sawah, ladang/tegalan, kebun campur, permukiman dan lain-lain.

Tabel 4.3. Potensi lahan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Peruntukan	Luas (Ha)	%
1	Konsesi kehutanan	565.028	52,52
2	Konsesi transmigrasi	28.641	2,66
3	Kawasan Pengembangan		
	A. Konsesi Perkebunan		
	- Cadangan	120.807	11,23
	- Tertanam	160.973	14,96
	B. Konsesi Non Perkebunan	191.309	17,78
4	Danau dan Sungai	9.142	0,85
	Jumlah	1.075.900	100,00

Sumber : Kotawaringin Barat Dalam Angka 2013

Tanah merupakan unsur penting dalam rangka budidaya pengembangan komoditas pertanian. Berdasarkan data statistik (BPS, 2011) bahwa keadaan tanah di wilayah Kotawaringin Barat kondisinya sangat bervariasi dengan tingkat kesuburan yang sangat terbatas.

Keadaan tanah di Kabupaten Kotawaringin Barat termasuk klasifikasi tanah kelas IV sampai dengan kelas VII (yaitu keadaan tanah yang mempunyai kadar hambatan yang sedang sampai tinggi). Dilihat dari tekstur tanah, umumnya wilayah Kotawaringin Barat sebagian besar disominasi oleh tekstur tanah lempung berpasir/tekstur tanah halus.

Tabel 4.4. Penyebaran Tekstur Tanah di Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Kecamatan	Tekstur (ha)				Jumlah
		halus	sedang	Kasar	Lain-lain	
1	Arut Selatan	139.704	34.320	65.976	-	240.000
2	Arut Utara	266.271	-	2.229	-	268.500
3	Ktw. Lama	79.468	25.152	17.186	-	121.800
4	Kumai	83.639	193.168	79.183	89.610	445.600
5	P. Lada					
6	P. Banteng					
	<b>Jumlah</b>	<b>569.076</b>	<b>252.640</b>	<b>164.574</b>	<b>89.610</b>	<b>1.075.900</b>
	<b>%</b>	<b>52,89</b>	<b>23,48</b>	<b>15,30</b>	<b>8,33</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Kantor wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah, 2008

Jenis tanah di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

- Tanah Alluvial, yaitu tanah yang merupakan endapan tanah yang berasal dari sungai pada waktu banjir. Tanah tersebut sebagian besar terdapat di daerah pinggiran aliran sungai dan rawa-rawa.
- Tanah Organosol, adalah jenis tanah yang terdiri dari bahan organik yang terdapat didaerah dataran rendah.
- Tanah Latosol dan Tanah Podsolik Merah Kuning yang lebih banyak terdapat pada wilayah perbukitan. Jenis tanah ini lebih

tahan erosi dan lebih cocok untuk budidaya pengembangan komoditas pertanian.

Secara umum terdapat 8 jenis tanah di Kotawaringin Barat dengan dominan Podsolik Merah Kuning (51,51%) Yaitu :

- Podsolik Merah Kuning	: 554.242	ha
- Laterit	: 59.012	ha
- Regosol Podsol	: 110.206	ha
- Latosol	: 50.230	ha
- Alluvial	: 85.680	ha
- Organosol	: 112.669	ha
- Komplek Podsolik Merah Kuning Podsol	: 97.247	ha
- Rawa	: 6.614	ha
Jumlah	: 1.075.900	ha

Faktor pembatas kemampuan lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah lahan gambut dan pasir seluas 120.753 ha, sekitar 11,22 % dari luas wilayah dan terbanyak di wilayah Kecamatan Kumai yang terperinci seperti yang disajikan pada tabel 6 berikut ini.

Tabel 4.5. Penyebaran Faktor pembatas Kemampuan Lahan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Kecamatan	Tekstur (ha)			
		Gambut	Pasir	Batu	Jumlah
1	Arut Selatan	17.040	1.229	-	18.268
2	Arut Utara	-	813	-	813
3	Ktw. Lama	16.553	4.980	-	21.513
4	Kumai	68.865	11.273	-	80.138
5	P. Lada			-	
6	P. Banteng			-	
	<b>Jumlah</b>	<b>102.458</b>	<b>18.295</b>	<b>-</b>	<b>120.753</b>

Sumber : Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah, 2010

## 2. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2010 sebanyak 241.383 jiwa, dengan rincian sebagaimana tabel 7 berikut ini

Tabel 4.6. Jumlah penduduk di tiap kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010

No	Kecamatan	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah
1	Arut Selatan	52.246	48.115	100.361
2	Kumai	24.617	22.544	47.461
3	Kotawaringin Lama	9.062	8.038	17.100
4	Arut Utara	9.654	7.055	16.709
5	Pangkalan Lada	15.158	13.335	28.493
6	Pangkalan Banteng	17.012	14.547	31.559
	<b>Jumlah</b>	<b>127.746</b>	<b>113.634</b>	<b>241.383</b>

Sumber : Kotawaringin Barat Dalam Angka 2010

Pertambahan dan pertumbuhan penduduk biasanya lebih tinggi pada kawasan/daerah yang prasarana dan sarana dasar serta fasilitas umumnya cukup tersedia, selain daripada hal tersebut diatas

pertambahan penduduk biasanya terpusat pada sentra-sentra tertentu seperti : tempat usaha/bekerja, pasar, pelabuhan, terminal dan sebagainya.

### **3. Profil Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat**

Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah salah satu Dinas yang melaksanakan fungsi teknis dalam jajaran Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpegang kepada Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan teknis kebijakan daerah serta desentralisasi dibidang pertanian dan peternakan serta melaksanakan fungsi merumuskan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Dinas Pertanian dan Peternakan tahun 2012- 2016 mempunyai visi “ Terwujudnya pertanian yang tangguh berwawasan agribisnis untuk peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui pengelolaan sumberdaya pertanian secara optimal”.

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat telah menetapkan misinya sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional.
2. Mendorong pembangunan pertanian menuju pertanian yang tangguh berwawasan agribisnis, berdaya saing, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
3. Mewujudkan ketahanan pangan daerah melalui peningkatan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan peternakan serta diversifikasi usahatani
4. Meningkatkan produk pangan segar dan olahan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) dikonsumsi.
5. Memfasilitasi pelaku usaha pertanian dan peternakan melalui pengembangan teknologi tepat guna (spesifik lokasi), pembangunan sarana prasarana, pembiayaan, pemasaran dan kemitraan usaha.
6. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia serta mendorong tumbuh dan berkembangnya kelembagaan petani.
7. Mendorong penyediaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Menumbuhkembangkan usaha pertanian dalam rangka memacu aktivitas ekonomi kerakyatan, menciptakan lapangan kerja, peningkatan ketahanan pangan, pendapatan dan kesejahteraan petani.
- b. Meningkatkan produksi, produktivitas, nilai tambah dan daya saing produk pertanian.
- c. Memanfaatkan sumberdaya pertanian secara optimal melalui penerapan teknologi yang tepat guna (spesifik lokasi).
- d. Meningkatkan kualitas SDM pertanian dan membangun kelembagaan pertanian yang kuat dan berfungsi sehingga dapat berperan dalam melindungi dan memperjuangkan kepentingan petani.

Sasaran Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam periode 2012 sampai dengan tahun 2016 sebagai berikut :

- a. Berkembangnya usaha-usaha pertanian, penyedia jasa dan pengolahan hasil pertanian dan peternakan seperti usaha perbenihan, kios pupuk, jasa alsintan, industri pengolahan pangan dan produk pertanian serta peternakan.
- b. Meningkatnya produksi tanaman padi 12 % pertahun, palawija 5-7 % pertahun, sayur- sayuran 3-5 % pertahun dan buah- buahan 5-7 % pertahun.
- c. Meningkatnya populasi ternak sapi 13 % pertahun dan ternak lainnya sebesar 6-12 % pertahun.
- d. Meningkatnya produksi daging sapi 6 % pertahun dan daging ternak lainnya 5-8 % pertahun, serta produksi telur 8-12 % pertahun.
- e. Menurunnya angka pasokan beras dari luar daerah, kekurangan kebutuhan beras rata-rata 8 % pertahun.

- f. Meningkatnya SDM dan kemandirian petani dalam melaksanakan kegiatan usahatani.
- g. Meningkatnya dinamika kelembagaan pertanian seperti kelompok tani, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), asosiasi setiap komoditas dan organisasi agribisnis lainnya.

Program yang akan dilaksanakan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2012-2016 :

- a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
- b. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
- c. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian
- d. Program Peningkatan Produksi Pertanian
- e. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
- f. Program Peningkatan Produksi Peternakan
- g. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- h. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana struktur organisasi, susunan organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretaris, dengan staf;
- 3. Bidang;
  - a. Bidang Pengembangan Produksi Pertanian :
    - Seksi Pengembangan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
    - Seksi Pengembangan Benih dan Bibit TPH

- Seksi Pembinaan dan Kelembagaan Usaha Tani
  - b. Bidang Pengembangan Produksi Peternakan;
    - Seksi Pengembangan Produksi Ternak
    - Seksi Pengembangan Bibit Ternak
    - Seksi Pengembangan Kelembagaan Usaha Peternakan
  - c. Bidang Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian & Peternakan
    - Seksi Pengembangan Lahan dan Sumberdaya Air
    - Seksi Penerapan Teknologi
    - Seksi Pengembangan Sarana
  - d. Bidang Kesehatan Hewan dan Perlindungan Tanaman;
    - Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
    - Seksi Pengawasan dan Perlindungan
    - Seksi Kesehatan Masyarakat Peternakan dan Veteriner
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
5. Kelompok Jabatan Fungsional
- Kepala Bidang Sarana Prasarana Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, membina, mengatur, melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan sarana prasarana pertanian dan peternakan.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana uraian diatas, maka Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian dan Peternakan mempunyai fungsi antara lain :

1. Merumuskan kebijakan dibidang pengembangan sarana prasarana pertanian dan peternakan
2. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan dibidang pengembangan sarana prasarana pertanian dan peternakan
3. Melaksanakan program dan kegiatan dibidang pengembangan sarana prasarana pertanian dan peternakan
4. Pembinaan dan bimbingan teknis dibidang pengembangan sarana prasarana pertanian dan peternakan
5. Pengawasan dan pengendalian dibidang pengembangan sarana prasarana pertanian dan peternakan
6. Monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan sarana prasarana pertanian dan peternakan.

Sedangkan tugas masing- masing seksi pada Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian dan Peternakan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Seksi Pengembangan Lahan dan Sumberdaya Air

Tugas pokok Kepala Seksi Pengembangan Lahan dan Sumberdaya Air mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun, melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis, mengidentifikasi, menelaah, memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan pengembangan lahan dan sumberdaya air.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pengembangan Lahan dan Sumberdaya Air mempunyai fungsi :

1. menyiapkan bahan dan menyusun penerapan pedoman teknis pengembangan lahan dan sumberdaya air;

2. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan lahan dan sumberdaya air;
3. melaksanakan identifikasi, penelaahan dan pengendalian pengembangan lahan dan sumberdaya air;
4. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

## 2. Kepala Seksi Penerapan Teknologi

Tugas pokok Kepala Seksi Penerapan Teknologi mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun, melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis, mengidentifikasi, menelaah, memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan penerapan teknologi dibidang pertanian dan peternakan

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Penerapan Teknologi mempunyai fungsi :

1. menyiapkan bahan dan menyusun penerapan pedoman teknis penerapan teknologi dibidang pertanian dan peternakan
2. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis penerapan teknologi dibidang pertanian dan peternakan
3. melaksanakan identifikasi, penelaahan dan pengendalian penerapan teknologi dibidang pertanian dan peternakan
4. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporn pelaksanaan tugas

## 3. Kepala Seksi Pengembangan Sarana

Tugas pokok Kepala Seksi Pengembangan Sarana mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun, melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis, mengidentifikasi, menelaah, emonitoring, mengevaluasi dan melaporkan pengembangan sarana pertanian dan peternakan

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pengembangan Sarana mempunyai fungsi :

1. menyiapkan bahan dan menyusun penerapan pedoman teknis pengembangan sarana pertanian dan peternakan
2. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan sarana pertanian dan peternakan
3. melaksanakan identifikasi, penelaahan dan pengendalian pengembangan sarana pertanian dan peternakan
4. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

## **B. Temuan**

Program Pencetakan Sawah Baru digulirkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian. Program Pencetakan Sawah Baru ini bertujuan untuk 1) meningkatkan areal tanam khususnya padi pada wilayah bukaan sawah baru, 2) terwujudnya peningkatan produksi tanaman pangan khususnya padi pada wilayah bukaan baru, 3) terwujudnya dukungan dalam penyediaan kecukupan pangan nasional dan 4) meningkatnya kesejahteraan dan pendapatan petani dengan adanya tambahan luas areal sawah baru yang selesai dicetak dan diusahakannya sesuai dengan luasan yang dimilikinya.

Tabel 4.7. Realisasi Kelompok Tani Penerima Bantuan Sosial Perluasan sawah/ Cetak Sawah Tahun Anggaran 2013 berdasarkan SK Bupati Kotawaringin Barat Nomor : UKP.1220/521.a/IV/2013 tanggal 15 April 2013

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Kelompok Tani	Luas Areal (Ha)	Jumlah Bantuan (Rp)
1	Kumai	Kubu	Harapan Kita	20	200.000.000
2	Kumai	Kubu	Terbitan Baru	40	400.000.000
3	Kumai	Sungai Tendang	Sungai Tendang Permai	40	400.000.000
4	Arut Selatan	Natai Raya	Padi Waringin	20	200.000.000
5	Arut Selatan	Sulung	Sinar Kalimantan	40	400.000.000
6	Arut Selatan	Kenambui	Bina Karya	40	400.000.000
7	Arut Selatan	Mendawai Seberang	Mufakat Mandiri II	40	400.000.000
8	Arut Selatan	Mendawai	Klampan Sejahtera	40	400.000.000
9	P. Banteng	Marga Mulya	Sumber Rezeki	20	200.000.000
10	P. Banteng	Karang Sari	Karang Asih	40	400.000.000
11	Ktw. Lama	Ktw Hulu	Selasih 3	40	400.000.000
12	Ktw Lama	Ktw Hulu	Unggul Jaya	40	400.000.000
13	Ktw. Lama	Rungun	Rumbiya Raya	40	400.000.000
14	Ktw. Lama	Lalang	Bunga Mawar	40	400.000.000

Tabel 4.8. Perkembangan Luasan Sawah Tahun 2012 dan Tahun 2013 Per Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat

No	) sebagai Luas	Luas Sawah Tahun 2012 (Hektar)	Luas Sawah Tahun 2013 (Hektar)	Luasan Program Pencetakan Sawah Tahun 2013 ( Hektar)	Penambahan Luasan Sawah Non Program Pencetakan Sawah Tahun 2013 (Hektar)
1	Kumai	1.827	2.708	100	781
2	Arut Selatan	2.781	3.099	180	138
3	P. Banteng	228	432	60	144
4	Ktw. Lama	690	975	160	125
5	P. Lada	316	318	-	2
6	Arut Utara	150	80	-	-70
	Jumlah	5.992	6.992	500	500

Dari tabel diatas diketahui bahwa dari enam kecamatan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat hanya empat kecamatan yang mendapatkan bantuan program cetak sawah yaitu Kumai, Arut Selatan, Pangkalan Banteng, dan

Kotawaringin Lama, sedangkan dua kecamatan yang lain yaitu Kecamatan Pangkalan Lada dan Arut Utara tidak dialokasikan bantuan program tersebut. Sedangkan untuk penambahan luas areal sawah ditahun 2013 terlihat cukup signifikan yaitu seluas 100 hektar dimana yang melalui Program Pencetakan Sawah Baru yang dibiayai oleh pemerintah melalui Kementerian Pertanian sebanyak 500 hektar, dan melalui swadaya maupun dari pihak lain baik itu dari lembaga pemerintah maupun dari petani mandiri sebanyak 500 hektar.

Pertumbuhan pembangunan disegala bidang yang pesat terutama perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Barat sangat berpengaruh negatif terhadap pengembangan sektor pertanian tanaman pangan khususnya produksi padi, karena menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian khususnya lahan sawah menjadi lahan non pertanian yang dapat mengancam ketahanan pangan daerah dan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, maka upaya untuk memperluas baku lahan pertanian tanaman pangan menjadi sangat penting dengan memanfaatkan dan mengelola sumberdaya lahan dan air yang ada. Melalui Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2013, Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Pedoman Teknis Perluasan Sawah tahun 2013, serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/1/2013 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2013 diharapkan adanya suatu peningkatan produksi padi dalam rangka mendukung peningkatan ketahanan pangan daerah. Ketidakmampuan sebagian petani di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam membuka dan mencetakan sawahnya disebabkan karena terkendala

mahalnya investasi dalam pencetakan sawah baru. Jadi apabila tidak adanya bantuan program cetak sawah ini para petani membuka lahan pertaniannya dengan metode membakar lahan yang berakibat kerusakan lingkungan dan polusi udara yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat.

Di Kabupaten Kotawaringin Barat, budidaya padi baik itu padi sawah maupun padi ladang sudah cukup lama dibudidayakan. Bila dibandingkan antara budidaya padi sawah dan padi ladang maka yang dominan dilakukan di Kabupaten Kotawaringin Barat pada saat ini adalah padi ladang, karena padi ladang lebih mudah dalam perawatannya dan tidak memerlukan investasi yang mahal, sedangkan padi sawah masih terbatas kendala berupa lahan yang telah tercetak

- **Analisis Program dengan Model Edwards III**

Manfaat suatu program akan dapat dirasakan bila program tersebut dapat diimplementasikan dengan baik. Implementasi suatu program adalah proses dinamik yang meliputi interaksi banyak faktor. Secara teoritik, menurut Edwards III ada 4 variabel yang mempengaruhi implementasi suatu program, yaitu komunikasi, sumberdaya, sikap dan struktur birokrasi.

- a. Komunikasi (*Communications*)**

Menurut Edwards III, ada 3 hal penting yang dapat dibahas dalam proses komunikasi program, yaitu transmisi, kejelasan (*clarity*) dan konsistensi.

## 1. Transmisi

Syarat awal untuk implementasi program yang efektif yaitu bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus dilakukan. Keputusan dan perintah didalam program harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan dan perintah itu dapat diikuti. Komunikasi harus akurat dan dimengerti dengan seksama oleh para pelaksana. Berkaitan dengan Program Pencetakan Sawah Baru di Kabupaten Kotawaringin Barat dan berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian dan Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat diketahui bahwa pelaksanaan program di Kabupaten Kotawaringin Barat telah mengetahui dan memahami apa yang harus dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan program Pencetakan Sawah Baru ini.

Dalam wawancaranya, beliau mengatakan bahwa,

*“Kementerian Pertanian selaku pembuat kebijakan telah memberi informasi yang jelas mengenai tujuan dari program pencetakan sawah baru ini melalui pemberian Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pencetakan Sawah yang mencakup tujuan, sasaran, spesifikasi teknis, lokasi, dan kriteria penerima bantuan Program Pencetakan Sawah Baru, dan juga telah dilakukan sosialisasi melalui rapat-rapat dan pertemuan di Tingkat Provinsi”.*

Berdasarkan pendapat yang disampaikan tersebut menyatakan bahwa dengan adanya pedoman umum dan petunjuk teknis tersebut menggambarkan bahwa Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pertanian dan Peternakan yang dalam hal ini sebagai penerima langsung pelaksanaan program Cetak Sawah ini telah memahami

secara baik tentang bagaimana seharusnya program cetak sawah ini dilakukan supaya tidak bergeser dari tujuan yang telah ditetapkan. Pada pedoman teknis pencetakan sawah tersebut disebutkan : kriteria calon petani dan calon lokasi, survei/investigasi, penetapan lokasi, desain, konstruksi pencetakan sawah, pengawasan dan penyerahan hasil pekerjaan, pemanfaatan lahan sawah setelah dicetak, dan pelaporan kegiatan serta sumber anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program ini.

## 2. Kejelasan (*Clarity*)

Kejelasan informasi mengenai sasaran dan tujuan program Cetak Sawah, berarti pihak yang merumuskan kebijakan dalam hal ini Pemerintah Pusat melalui Menteri Pertanian harus memberikan penjelasan secara terperinci tentang tujuan yang ingin dicapai pada program cetak sawah baru ini. Berdasarkan hasil pengamatan aturan-aturan mengenai pelaksanaan program ini telah dijelaskan secara rinci melalui Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2013, Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Pedoman Teknis Perluasan Sawah tahun 2013, serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/1/2013 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2013. Melalui Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah, Permentan, Pedum dan Juknis perluasan sawah

tersebut sudah disampaikan ke Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten penerima Program Cetak Sawah, yang salah satu diantaranya adalah Kabupaten Kotawaringin Barat. Pedoman umum dan petunjuk teknis merupakan suatu hal yang penting dalam proses komunikasi, karena merupakan arahan kepada pelaksana program dalam melaksanakan suatu program.

Tabel 4.9. dibawah ini merupakan aturan-aturan yang dapat digunakan dalam implementasi program cetak sawah baru tahun 2013 di Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga pada pelaksanaannya dilapangan dapat sesuai dengan tujuan yang diharapkan, dan dengan informasi ini pula pelaksanaan program cetak sawah dapat disampaikan secara jelas.

Tabel 4.9. Dukungan Peraturan/Landasan Hukum Terkait Program Cetak Sawah Baru tahun 2013

No	Dukungan Peraturan/ Landasan Hukum	Penerima Peraturan
1	Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2013	Sudah
2	Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Sudah
3	Pedoman Teknis Perluasan Sawah tahun 2013	Sudah
4	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/1/2013 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2013	Sudah

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Peternakan, implementasi program Cetak Sawah Baru ini telah diterima oleh pelaksana di seksi pengembangan lahan dan sumberdaya air dan dimengerti cukup jelas mengenai maksud dan tujuan dari program cetak sawah baru ini.

Dalam wawancaranya, beliau mengatakan bahwa,

*“Kementerian Pertanian selaku pembuat kebijakan telah memberi informasi yang jelas mengenai tujuan dari program pencetakan sawah baru ini melalui pemberian Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pencetakan Sawah yang mencakup tujuan, sasaran, spesifikasi teknis, lokasi, dan kriteria penerima bantuan Program Pencetakan Sawah Baru, dan juga telah dilakukan sosialisasi melalui rapat-rapat dan pertemuan di Tingkat Provinsi”.*

Dan lebih lanjut beliau mengatakan :

*“Sudah, Kementerian Pertanian telah memberikan penjelasan dalam petunjuk teknis dan kami rasa sudah cukup jelas dengan adanya juknis tersebut yang didalamnya tercantum tujuan, sasaran, spesifikasi teknis, lokasi, dan kriteria penerima Cetak Sawah”*

Senada dengan Kepala Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Peternakan, Kepala Seksi Pengembangan Lahan dan Sumber Daya Air Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat menyatakan bahwa

*“Ya, saya mengetahui adanya program cetak sawah baru dan informasi ini kami dapat dari sosialisasi yang dilakukan sebelum program ini berjalan melewati Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya”.*

Dari tabel diatas dan pendapat yang dikemukakan oleh pelaksana kebijakan yaitu Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian dan Peternakan beserta Kepala Seksi Pengembangan Lahan dan Sumberdaya Air Dinas Pertanian dan Peternakan

Kabupaten Kotawaringin Barat dapat disimpulkan bahwa informasi yang disampaikan oleh Kementerian Pertanian selaku pembuat program kepada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Dinas Pertanian dan Peternakan sudah diterima dan dipahami dengan jelas.

### 3. Konsistensi

Bila implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, perintah pelaksanaan harus jelas dan konsisten dan perintah tidak boleh saling bertolak belakang. Perintah pelaksanaan program cetak sawah di Kabupaten Kotawaringin Barat yang diterima oleh pelaksana sudah cukup dimengerti dan jelas serta tidak saling bertolak belakang. Pihak yang berkepentingan untuk menjalankan program ini sudah cukup konsisten dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Pada hasil wawancara yang dilakukan terlihat tidak ada suatu tanggapan dan pernyataan yang bersifat bertolak belakang dengan pelaksanaan program cetak sawah baru yang telah digulirkan ini dan terlihat dari tanggapan yang dikemukakan oleh beberapa informan yang ada yang menunjukkan bahwa pelaksana program konsisten untuk melaksanakan program cetak sawah baru sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat berikut,

*“ Saya selaku Kepala Bidang sangat konsisten mendukung program ini. Dengan adanya program ini maka kebiasaan petani untuk*

*membuka lahan pertaniannya dengan cara membakar dapat secara signifikan dikurangi. Dari segi keuangan daerah, program ini sangat membantu daerah dalam kemampuan daerah mencetak sawah melalui APBD Kabupaten. Memang setiap tahun kami dari APBD Kabupaten juga menganggarkan program pencetakan sawah baru juga, namun jumlahnya sangat sedikit luasannya dibandingkan dengan luasan yang dicetak melalui anggaran kementerian pertanian. Jadi bila dilihat dari tujuan program ini, program ini sangat baik dan perlu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.”*

Pernyataan ini pula didukung oleh Kepala Seksi Pengembangan Lahan dan Sumberdaya air berikut ini,

*“Kami selaku pelaksana program dilapangan dengan adanya program ini sangat baik dan menerima, hal ini dikarenakan sangat membantu petani dengan adanya program ini. Disamping program ini merupakan salahsatu dari Tupoksi saya selaku kepala seksi, sehingga kami berkeinginan kuat untuk mensukseskan program cetak sawah ini”.*

Dari pendapat yang telah dikemukakan diatas terlihat bahwa pelaksana program cukup konsisten dan mendukung pelaksanaan program ini dan tanggapan yang disampaikan sangat positif dan tidak bertentangan dengan keinginan dari Kementerian Pertanian selaku pembuat program cetak sawah. Ini dikarenakan program yang dilaksanakan merupakan suatu program yang cukup baik dan sesuai dengan keadaan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat dan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka menyiapkan lahan sawah baru bagi petani.

#### 4. Koordinasi.

Agar program Pencetakan Sawah Baru dapat didukung dan diimplementasikan secara efektif, koordinasi dengan

dinas/lembaga/instansi terkait dengan pelaksana program Cetak Sawah mutlak diperlukan. Berdasar pengamatan dilapangan, dinas yang sangat terkait adalah Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan (KPPKP) karena dalam struktur birokrasi di Kabupaten Kotawaringin Barat, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) berada di dalam organisasi KPPKP, sedangkan untuk melaksanakan kegiatan baik itu pembinaan dan pengawasan yang berhubungan dengan petani adalah PPL setempat.

Koordinasi pelaksanaan implementasi program cetak sawah baru telah terjalin cukup baik, sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat,

*"dalam pelaksanaan program cetak sawah baru di Kabupaten Kotawaringin Barat ini, koordinasi antar instansi sudah cukup baik, terutama koordinasi dengan instansi KPPKP dengan rutinitas pertemuan yang dilakukan baik di Dinas Pertanian maupun di tiap BPP kecamatan".*

Pernyataan ini didukung oleh Kepala Seksi Pengembangan Lahan dan Sumberdaya Air berikut,

*"kami telah melaksanakan koordinasi secara intensif dengan instansi terkait dalam melaksanakan program cetak sawah ini, seperti Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan (KPPKP) dikarenakan pelaksanaan program dilapangan berkaitan dengan instansi ini khususnya petugas yang berada di bawah naungannya yaitu Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) agar pelaksanaan program ini tidak rancu dilapangan"*

Sedangkan menurut beberapa PPL yang telah diwawancarai mengatakan sebagai berikut :

1. PPL Desa Mendawai, mengatakan bahwa kejelasan informasi tentang program cetak sawah ini telah mereka ketahui seperti yang mereka katakan :

*“ saya mendapatkan informasi program ini dari petugas dari dinas pertanian dan peternakan melalui sosialisasi dan pertemuan yang dilaksanakan sebelum dan pada saat program ini dilaksanakan, sehingga secara umum kami cukup memahami tujuan dari program ini. Disamping itu pada pertemuan bulanan di BPP Arut Selatan, kami juga dijelaskan oleh koordinator BPP Arut Selatan akan pentingnya program ini, terutama dari faktor teknis kesiapan lokasi di lapangan”.*

2. PPL Desa Kubu,

*“informasi yang kami dapatkan sebagai PPL yaitu melalui sosialisasi dan pertemuan yang diadakan pihak dinas pertanian dan peternakan kabupaten sebelum program ini dilaksanakan dan kami tindaklanjuti dengan pertemuan didesa binaan kami untuk mempersiapkan kelompok-kelompok mana yang telah siap dan mampu untuk melaksanakan rogram ini”.*

Sedangkan menurut ketua kelompok tani Mendawai Raya II

Kelurahan Mendawai Kecamatan Arut Selatan mengatakan bahwa:

*“kami diberitau ibu PPL kalo ada program cetak sawah untuk kelompok tani kami, penjelasan lengkap sudah dijelaskan oleh ibu PPL, jadi kami mengerti dan menyiapkan hal-hal yang diperlukan untuk mengikuti program ini”.*

- Hasil Analisis

Dalam suatu implementasi program kebijakan, komunikasi yang baik mutlak diperlukan karena akan mempengaruhi pada hasil implementasi program tersebut dilapangan. Pada pelaksanaan implementasi Program Cetak Sawah Baru ini, berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dilapangan bahwasanya transmisi, kejelasan, konsistensi dan koordinasi telah dapat terlaksana secara baik antara pelaksana program dilapangan dan pembuat program. Hal ini dapat

diketahui bahwa sebagai pembuat program kebijakan, Kementerian Pertanian melalui buku Pedoman Teknis Perluasan Sawah tahun 2013 dan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian dan Peternakan, Kepala Seksi Pengembangan Lahan dan Sumberdaya Air, Penyuluh Pertanian Lapangan, dan petani penerima bantuan Program Cetak Sawah tersebut. Dari hasil informasi yang diperoleh terlihat bahwa informasi mengenai Program Cetak Sawah Baru sudah sangat jelas diberikan dari pembuat program yaitu Kementerian Pertanian kepada pelaksana program yaitu salah satunya Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat. Dari dinas Pertanian dan Peternakan kabupaten, informasi kemudian diteruskan kepada instansi/badan/lembaga terkait program ini melalui pertemuan sosialisasi dan koordinasi di tingkat kabupaten yang dilaksanakan di Dinas Pertanian dan Peternakan, setelah itu juga dilaksanakan pertemuan teknis dengan mengundang koordinator BPP, Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan, beserta ketua kelompok tani yang terpilih untuk mengikuti program cetak sawah baru ini. Untuk informasi di tingkat petani disampaikan melalui pertemuan kelompok yang dihadiri oleh Petugas Penyuluh Pertanian Desa setempat didampingi oleh Ketua Kelompok tani untuk menyampaikan kepada anggota kelompok mengenai program ini.

Jadi pada pelaksanaan Program Cetak Sawah Baru ini, menurut pandangan peneliti dari faktor informasi dari segi kejelasannya sudah sangat jelas dari tingkat Kabupaten sampai kepada petani penerima bantuan program cetak sawah dan dari hasil wawancara yang dilakukan

tidak adanya suatu pertentangan pendapat antara para pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pembuat program.

Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kondisi komunikasi baik dari aspek transmisi, kejelasan, konsistensi, dan koordinasi dalam kondisi yang baik.

Tabel 4.10. Hasil Analisa Tahap Implementasi Kebijakan Ditinjau dari Faktor Komunikasi.

No	Indikator	Hasil Analisis	Faktor Penyebab
1	Transmisi	Berkaitan dengan Program Cetak Sawah Baru ini, Pelaksana telah cukup memahami tindakan apa yang harus dilakukan untuk melaksanakan program ini dengan baik dilapangan	Keputusan Program dan perintah telah diteruskan dari Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2013, Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Pedoman Teknis Perluasan Sawah tahun 2013, serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/1/2013 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Belanja Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2013
2	Kejelasan	Pelaksana sudah memperoleh kejelasan mengenai tujuan dari program ini	Penjelasan melalui Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2013, Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Pedoman Teknis Perluasan Sawah tahun 2013, serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT. 140 /1/2013 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Belanja Sosial Kementerian Pertanian

			Tahun Anggaran 2013
3	Konsistensi	Seluruh pihak yang melaksanakan program ini sudah konsisten dengan perintah pelaksanaan tujuan program	Perintah pelaksanaan yang diterima cukup jelas dan tidak bertentangan
4	Koordinasi	Koordinasi antar dinas/instansi/lembaga terkait telah dilaksanakan secara baik.	Dilakukan koordinasi formal (sosialisasi, pertemuan, koordinasi, pemberian juknis) dan informal berupa pertemuan dengan anggota kelompok tani dilapangan

### b. Sumber Daya (*Resources*)

Komponen pokok sumber daya meliputi sumber daya manusia (SDM) baik jumlah staf dan keahlian, informasi yang relevan, kewenangan dan fasilitas. Keadaan sumber aya terkait dengan program Pencetakan Sawah Baru di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan kunci dalam pelaksanaan implementasi program. Sumber daya manusia merupakan faktor aktif yang berperan memberdayakan serta mengelola faktor-faktor yang ada. Ketersediaan anggaran yang cukup serta sarana dan prasarana yang lengkap tanpa dukungan sumber daya manusia yang profesional membuat implementasi program tidak akan berhasil. Berkaitan dengan implementasi program Pencetakan Sawah Baru di Kabupaten Kotawaringin Barat, menurut Kepala Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat, bahwa secara jumlah dan mutu belum memadai dan mencukupi. Jumlah staf

yang dimiliki sangat terbatas jumlahnya sehingga mereka belum bisa fokus untuk menangani program Pencetakan Sawah Baru karena beban tugas lain yang ada pada bidang tersebut.

Kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Peternakan selaku pelaksana program Cetak Sawah Baru ini sebanyak 11 orang. Berdasarkan jabatan struktural sebagai berikut: Kepala Bidang 1 orang, Kepala Seksi 3 orang, Staf 7 orang. Sedangkan kategori sumber daya manusia berdasarkan latar belakang pendidikan formal adalah Pasca Sarjana (S2) 1 orang, Sarjana (S1) 7 Orang, D3 2 orang, dan SMA 1 orang.

Tabel 4.11. Kualifikasi SDM di Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian dan Peternakan Tahun 2013

No	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah (Org)
1	Kepala Bidang	Sarjana (S1)	1
2	Kepala Seksi	Pasca Sarjana (S2)	1
		Sarjana (S1)	2
3	Staf PNS	Sarjana	4
		Diploma III	2
		SMA	1

Dari tabel 4.11 dapat diketahui bahwa dari segi jumlah memang belum optimal jika dikaitkan dengan jumlah tugas dan kegiatan yang harus mereka selesaikan, baik beban kerja yang bersumber dari APBD maupun APBN. program Pencetakan Sawah Baru merupakan salah satu program yang bersumber dari APBN dan perlu penanganan yang baik sehingga hasil yang diperoleh harus sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Sehingga pada pelaksanaan program ini, sumber daya manusia harus memahami dan

mengerti target yang hendak dicapai dari program ini. Berikut ini adalah hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Kabid Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Peternakan, Kasi Pengembangan Lahan dan Sumberdaya Air yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program ini.

Menurut Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian dan Peternakan *“Dari segi jumlah dan mutu, sumber daya manusia yang terdapat dalam bidang ini sangat minim, sedangkan pekerjaan yang harus dilaksanakan bukan saja pencetakan sawah baru, namun tugas lain berupa tugas rutin yang lain juga harus dilakukan, sehingga dengan tugas lain yang harus dilaksanakan oleh staf yang tersedia, maka dalam melaksanakan pekerjaan program pencetakan sawah baru ini masih belum fokus”*

Menurut Kasi Pengembangan Lahan dan Sumberdaya Air mengatakan bahwa,

*”masalah sumber daya manusia yang ada masih kurang dan perlu adanya penambahan staf lagi mengingat tugas yang ada cukup berat dikarenakan medan dari program ini yang tersebar di beberapa kecamatan, sehingga perlu kontrol yang intensif demi suksesnya program ini.*

Dari penjelasan diatas terlihat bahwa jumlah sumber daya manusia yang ada dari segi jumlah dapat dikatakan relatif minim. Dari tabel yang telah disajikan, jumlah sumber daya manusia yang ada hanya berjumlah 11 (sebelas) orang termasuk kepala bidang dan kepala seksi, sedangkan pekerjaan yang harus mereka selesaikan selain pelaksanaan program pencetakan sawah baru mereka harus menyelesaikan tugas lain di luar program pencetakan sawah baru. Seperti yang disampaikan oleh kepala bidang dan kepala seksi diatas yang menyatakan bahwa memang dari segi jumlah yang ada masih kurang sedangkan pekerjaan yang bukan hanya

program pencetakan sawah baru saja tetapi masih ada beban kegiatan rutin lain. Dalam pelaksanaan implementasi program pencetakan sawah baru yang mereka laksanakan tersebut, tidak melibatkan seksi lain yang ada pada bidang tersebut dan bidang lain di luar bidang pengembangan sarana dan prasarana pertanian dan peternakan, menurut peneliti kemungkinan hal tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu aktivitas pada seksi atau bidang lain diluar seksi Pengembangan Lahan dan Sumberdaya Air.

Dari uraian tersebut diatas dan berdasarkan pendapat yang telah disajikan tidak adanya pelatihan khusus bagi sumber daya manusia pelaksana program pencetakan sawah baru ini, hal ini dapat diketahui berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh kepala bidang dan kepala seksi dalam uraian diatas, sehingga pada pelaksanaan program ini, pelaksana hanya berpedoman pada Petunjuk teknis dan arahan dari kepala bidang dan kepala seksi.

Dalam pelaksanaan implementasi program ini ketiadaan seksi khusus yang menangani program pencetakan sawah baru ini dikarenakan jumlah sumber daya manusia yang ada sangat minim sehingga para pelaksana program ini belum fokus dalam menjalankan program tersebut. Belum fokusnya sumber daya manusia yang ada dikarenakan pekerjaan yang harus mereka kerjakan bukan hanya melaksanakan program pencetakan sawah baru saja, melainkan banyak tugas-tugas lain yang penting dan perlu mereka selesaikan dengan segera serta belum adanya seksi khusus yang menangani program pencetakan sawah baru ini mengakibatkan para staf belum bisa

fokus untuk mempelajari lebih menyeluruh tentang pelaksanaan program pencetakan sawah baru ini.

## **2. Informasi yang Relevan**

Penyampaian informasi yang relevan diperlukan agar program pencetakan sawah baru ini dapat terlaksana dengan baik. Informasi yang diperlukan disini adalah informasi bagaimana melaksanakan program tersebut agar tujuan dapat tercapai dan tidak menyimpang dari yang diharapkan, serta informasi mengenai ketaatan dari organisasi maupun individu terhadap aturan-aturan yang berlaku dalam pelaksanaan program ini.

Berdasar hasil pemantauan peneliti dapat diketahui bahwa informasi tentang bagaimana pelaksanaan program ini telah disampaikan pada tingkat pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian menerbitkan Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2013, Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Pedoman Teknis Perluasan Sawah tahun 2013, serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/1/2013 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2013. Sehingga dengan adanya aturan-aturan tersebut, informasi tentang bagaimana pelaksanaan program pencetakan sawah baru ini oleh pelaksana program juga sudah cukup jelas.

### **3. Wewenang**

Untuk pelaksanaan program ini, wewenang sudah diberikan secara penuh kepada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Kepala Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Peternakan. Dalam pelaksanaan program ini, kelompok-kelompok tani yang mendapatkan bantuan menerima bantuan dalam bentuk bantuan sosial berupa uang yang ditransfer langsung kedalam masing-masing rekening kelompok tani yang telah ditentukan, namun dalam pencairan dana dari bank, Kepala Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Peternakan diberikan kewenangan untuk memberikan rekomendasi pencairan dana setiap kelompok tani menyesuaikan pekerjaan yang telah dilaksanakan dilapangan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati tentang kelompok tani penerima bantuan tersebut. Adanya Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat tentang penetapan kelompok tani penerima bantuan , menunjukkan bahwa wewenang untuk melaksanakan program tersebut benar-benar telah diberikan kepada pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian dan Peternakan khususnya Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Peternakan untuk dapat mensukseskan program tersebut.

### **4. Fasilitas**

Dalam pelaksanaan program kegiatan, fasilitas yang ada perlu diperhatikan. Fasilitas yang baik akan lebih mendukung keberhasilan pelaksanaan suatu program. Agar program pencetakan sawah baru ini dapat

berjalan dengan baik dan optimal, maka beberapa macam fasilitas yang perlu diperhatikan, yaitu:

**a. Lahan Sawah Bukaan Baru**

Pada pelaksanaan program ini fasilitas yang diberikan kepada petani yaitu berupa ketersediaan lahan sawah bukaan baru seluas dan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : UKP.1220/521.a/IV/2013 tanggal 15 April 2013. Lahan sawah bukaan baru ini berupa lahan yang bersih dan siap tanam untuk tanaman padi, sehingga diharapkan dapat langsung dilakukan penanaman pada saat selesainya pelaksanaan kegiatan ini

**b. Benih**

Fasilitas yang disediakan berupa benih padi dalam hal ini benih unggul lokal maupun unggul nasional menyesuaikan dengan keadaan dan permintaan petani di lokasi kegiatan, hal ini mutlak diperlukan mengingat kondisi dan situasi lokasi lahan sawah bukaan baru ini terdiri dari berbagai kondisi tanah, sehingga perlu pemilihan benih padi yang cocok dan sesuai guna pencapaian produksi padi yang optimal dilahan yang tersedia

**c. Herbisida**

Fasilitas yang disediakan berupa herbisida guna pelaksanaan pembudidayaan tanaman padi dilahan tersebut. Pemberian herbisida tersebut merupakan stimulus awal bagi petani yang telah ditentukan lahannya agar segera dapat melaksanakan kegiatan penanaman dan pemeliharaan tanaman padi guna pencapaian produksi padi yang optimal dilahan yang tersedia

#### d. Pupuk

Fasilitas yang disediakan berupa pupuk baik itu pupuk organik maupun pupuk anorganik guna pelaksanaan pembudidayaan tanaman padi dilahan tersebut. Pemberian pupuk tersebut merupakan stimulus awal bagi petani yang telah ditentukan lahannya agar segera dapat melaksanakan kegiatan penanaman dan pemeliharaan tanaman padi guna pencapaian produksi padi yang optimal dilahan yang tersedia

#### e. Alat dan Mesin Pertanian

Fasilitas ini disediakan sesuai dengan kebutuhan kelompok, adapun fasilitas yang dapat disediakan yaitu berupa alat-alat yang belum dimiliki oleh petani yang sekiranya sangat dibutuhkan oleh petani. Dalam program ini fasilitas alat dan mesin yang dapat disediakan yaitu berupa handsprayer (alat semprot manual), pedal threster (alat perontok padi manual), serta seperangkat mesin pompa air. Alat ini mutlak diperlukan guna pelaksanaan kegiatan pada sawah baru yang telah dicetak. Sedangkan untuk alat lainnya yang berupa handtraktor belum tersedia, namun kelompok tani dapat meminjam/ menyewa secara mandiri kepada kelompok tani yang lain disekitar wilayah tersebut, mengingat sudah banyak tersedianya alat tersebut sehingga kelompok tani penerima bantuan pencetakan sawah baru dapat menggarap lahannya tanpa kendala yang berarti.

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dari segi aspek sumberdaya, kondisi sumberdaya manusia yang ada belum bisa optimal mendukung pelaksanaan program pencetakan sawah baru ini. Hal ini dapat dilihat dari jumlah staf yang tersedia, baik dari segi mutu maupun

jumlah yang masih kurang. Sedangkan kondisi informasi, wewenang dan fasilitas pada pelaksanaan program ini cukup tersedia dan mendukung.

Tabel 4.12. Hasil Analisa Tahap Implementasi Kebijakan Ditinjau dari Faktor Sumber Daya.

No	INDIKATOR	HASIL ANALISIS	FAKTOR PENYEBAB
1.	Sumber Daya Manusia (SDM)	Secara jumlah dan mutu, sumber daya manusia yang ada masih perlu ditingkatkan lagi.	Pada pelaksanaan implementasi program ini jumlah staf yang tersedia sangat minim sehingga pada pelaksanaan program ini belum bisa fokus untuk melaksanakan program ini. Belum dapat fokusnya staf yang ada karena beban pekerjaan yang harus diselesaikan bukan hanya pelaksanaan program pencetakan sawah baru ini saja, namun masih banyak tugas yang berasal dari kegiatan lain yang merupakan tugas pokok pada bidang sarana dan prasarana pertanian dan peternakan yang lebih penting untuk mereka selesaikan dan hal ini menyebabkan mereka kurang fokus untuk mempelajari lebih dalam tentang pelaksanaan program pencetakan sawah baru ini.
2	Informasi	Sudah cukup relevan, pelaksana program sudah mengetahui apa yang harus dilakukan dan pelaksanaan berdasarkan peraturan yang telah dibuat.	Pelaksana telah menerima Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2013, Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Pedoman Teknis Perluasan Sawah tahun 2013, serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/1/2013 tentang Pedoman

			Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2013
3	Wewenang	Kewenangan sudah diberikan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah yaitu Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Kepala Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Peternakan	Telah menerima pelimpahan wewenang dari tingkat pusat maupun provinsi untuk dapat melaksanakan Program Pencetakan Sawah Baru ini.
4	Fasilitas	Fasilitas berupa lahan sawah bukaan baru sudah tersedia cukup baik, benih yang tersedia cukup dan baik, herbisida tersedia cukup, pupuk anorganik dan organik sudah tersedia, dan alat dan mesin pertanian yang telah tersedia	Fasilitas berupa lahan sawah bukaan baru sudah tersedia cukup baik namun perlu dilengkapi dengan jaringan jalan usaha tani, untuk benih yang tersedia cukup dan baik, herbisida tersedia cukup, pupuk anorganik dan organik sudah tersedia, dan alat dan mesin pertanian yang telah ada namun belum tercukupi mengingat keterbatasan dana yang tersedia.

### c. Sikap (Dispositions/Attitude)

#### 1. Sikap Implementator

Sikap komitmen pelaksana kebijakan program sangat diperlukan pada suatu implementasi kebijakan. Apabila pelaksana program tidak sungguh-sungguh atau merasa bertolak belakang dengan pembuat program, maka program tersebut tidak akan sesuai dan berhasil dengan tujuan yang telah dicanangkan.

Program Pencetakan Sawah Baru merupakan program yang baik bagi petani dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan petani secara mandiri. Pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sangat mendukung implementasi Program Pencetakan Sawah Baru ini di lapangan, namun dukungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat relatif belum optimal dari segi dana pendamping dari sumber APBD Kabupaten tidak tersedia dan sarana operasional untuk monitoring ke lokasi kegiatan juga tidak tersedia. Untuk program ini, sumber dana yang dipergunakan berasal dari dana APBN. berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di lokasi kegiatan bahwa pelaksanaan Program Pencetakan Sawah Baru di Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat penerima bantuan tersebut. Hal ini terlihat dengan telah terbukanya seluruh areal pencetakan sawah baru di semua lokasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat tanpa adanya halangan yang berarti, namun untuk pemanfaatan lahan sawah yang telah terbuka tersebut masih dirasakan belum optimal, walaupun paket bantuan berupa pupuk, benih, sarana alat dan mesin pertanian telah tercukupi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian dan Peternakan,

*“ Ya, komitmen kita untuk mensukseskan program cetak sawah baru ini dengan cara mengikuti pola yang telah dijabarkan pada petunjuk pelaksanaan yang ada serta melalui pengawasan berkala terhadap kemajuan kegiatan program ini sesuai dengan kewenangan kami. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sangat mendukung dengan adanya Program Pencetakan Sawah Baru ini dalam rangka peningkatan produksi beras di Kabupaten Kotawaringin Barat, walaupun kemampuan*

*SDM petugas, ketersediaan sarana produksi, serta petani pelaksana yang belum lengkap dan memadai, Program Pencetakan Sawah Baru ini baik dan sesuai dengan kebutuhan petani di Kabupaten Kotawaringin Barat yang terbiasa menanam padi dengan membakar lahan dan dengan lahan yang seadanya dengan pengolahan tanah minimal, diharapkan dapat merubah kebiasaan petani tersebut sehingga menghasilkan produksi padi yang mencukupi minimal untuk keluarganya dan syukur-syukur dapat berlebihan dan dijual. Memang dalam program pencetakan sawah baru ini ada beberapa lokasi yang sarana dan prasarananya belum tersedia, misalnya jalan usaha taninya belum terbangun, jaringan tata air yang belum terkoneksi dengan baik, serta sarana dan prasarana pertanian lainnya seperti alat dan mesin pertanian yang masih terbatas dan terpaksa meminjam kepada kelompok tani tetangga, namun di tahun-tahun mendatang, kami berkomitmen untuk dapat melengkapinya guna memacu semangat petani untuk dapat bertanam dan berproduksi padi secara terus menerus”*

Hal ini sesuai dengan pendapat Kepala Seksi Pengembangan Lahan dan Sumber Daya Air

*“ Kami selaku kepala seksi sangat berkomitmen untuk mensukseskan program cetak sawah ini, apalagi program ini berguna untuk mendongkarak produksi padi di Kabupaten Kotawaringin Barat yang selama ini kita ketahui bersama kalau kita hanya mampu 40 % saja memenuhi kebutuhan beras kita, dan sisanya berasal dari luar daerah. Jadi Pemerintah daerah sangat mendukung bantuan yang diberikan dari dana APBN ini. Program ini juga berguna untuk mengurangi kebiasaan petani dalam membuka lahannya dengan cara membakar lahan yang dapat membuat polusi asap ”*

Lebih lanjut seperti yang disampaikan oleh Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kelurahan Mendawai berikut,

*“Program Pencetakan Sawah Baru yang diprogramkan oleh pemerintah ini menurut saya selaku PPL memang cukup baik, dan kami sangat mendukung*

*sekali program ini, karena sangat besar artinya bagi petani, dimana lahan-lahan yang sebelumnya belum optimal digarap oleh petani, dengan masuknya program ini maka lahan dapat digarap dengan relatif optimal dengan petani. Apalagi dengan program ini pembukaan lahannya menggunakan alat berat, sehingga tunggul-tunggul (akar-akar tanaman kayu keras) besar yang sulit lapuk dapat dicabut dan dibersihkan, sehingga lahan sawah petani dapat rata dan bersih untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai lahan bertanam padi. Namun kami juga mengharapkan, terutama saya selaku penyambung lidah anggota kelompok tani memohon agar pemerintah daerah pada tahun-tahun berikutnya tidak langsung meninggalkan kami untuk bertanam secara mandiri, petani kami mengharapkan adanya bantuan/program yang dapat masuk ke lahan sawah baru ini guna melengkapi sarana dan prasarana yang ada sehingga petani bersemangat untuk bertanam padi di lahannya secara berkelanjutan.”*

Sedangkan hasil pendapat ketua kelompok tani di Kelurahan Mendawai yang dijadikan responden mengatakan seperti berikut,

*“ Petani disini cukup antusias dengan adanya program cetak sawah baru ini, dimana seandainya apabila petani sendiri yang disuruh membuka lahan sawah, maka kemampuan dana yang ada tidak mampu untuk membuka secara baik, dan mungkin hanya secara terbatas dengan membakar lahan, tapi sekarang membakar lahan juga sulit karena adanya instruksi dari Bupati melarang membuka lahan sawah dengan membakar. Jadi program ini kami rasa sangat membantu kami dalam bercocok tanam dan meningkatkan produksi padi kami”.*

## **2. Dukungan Pimpinan**

Berdasarkan pengamatan peneliti dilokasi penelitian, pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sangat mendukung dengan adanya Program Pencetakan Sawah Baru ini, hal ini dikarenakan masih minimnya luasan sawah yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat, juga

berguna untuk memenuhi kebutuhan pangan di Kabupaten Kotawaringin Barat dimana baru sekitar 40 % saja kebutuhan pangan daerah dapat dipenuhi oleh produksi lokal, dan sisanya masih mengambil dari daerah lain, walaupun dukungan terhadap pencetakan sawah baru ini belum maksimal seperti penyediaan sarana dan prasarana pertanian berupa jaringan tata air, jalan usaha tani, dan terbatasnya alat dan mesin pertanian yang tersedia. Namun pada tahun anggaran berikutnya Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat akan berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. Hal ini sangat diperlukan karena alat dan mesin pertanian yang ada sangat penting dalam usaha pertanaman padi, mengingat sebagian besar lahan sawah yang tercetak merupakan lahan sawah tadah hujan dan lahan rawa. Berdasarkan pendapat oleh Kepala Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat tersebut kondisi alat dan mesin pertanian di Kabupaten Kotawaringin Barat kurang optimal dan belum dapat mendukung secara maksimal, menurut peneliti hal itu sesuai dengan apa yang peneliti ketahui di lapangan selama peneliti berdiskusi di Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten. Memang sarana berupa alat dan mesin pertanian yang tersedia di lapangan relatif terbatas, sehingga luasan lahan sawah yang dapat diolah relatif belum maksimal. Sedangkan untuk pengolahan lahan secara manual, upah tenaga kerja yang relatif mahal di daerah ini membuat masyarakat masih menerapkan pola bertanam padi dengan seadanya dengan pengolahan tanah minimal, sehingga hasil yang diperoleh kadang-kadang tidak sesuai dengan yang diharapkan petani.

### 3. Insentif bagi pelaksana

Dalam suatu pelaksanaan program, insentif mutlak diperlukan supaya pelaksanaan program akan lebih bersemangat untuk mensukseskan program tersebut. Pada pelaksanaan Program Pencetakan Sawah Baru ini, insentif disediakan untuk tim teknis dengan prosedur penerbitan SK melalui SK Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : UKP.1220/ 819.a/VI/ 2013 tentang Penetapan Tim Teknis Perluasan Sawah Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2013. Dana tersebut bersumber dari APBN yang dituangkan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor DIPA : 018-08.4.149003/2013 tanggal 5 Desember 2012. Hal ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Peternakan yang menyatakan bahwa :

*“Honor untuk petugas yang terlibat dalam kegiatan pencetakan sawah baru ini disesuaikan sesuai dengan beban kerja yang ada, dalam tim ini terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. Untuk ketua tim diisi oleh Kepala Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Peternakan, dan sekretaris diisi oleh Kepala Seksi Pengembangan Lahan dan Sumberdaya Air, Sedangkan anggota tim terdiri dari berbagai macam instansi yang berkaitan yaitu dari Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kehutanan, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Pertanahan Nasional*

*Kabupaten, Kepala Seksi yang berkaitan di Dinas Pertanian dan Peternakan, Serta Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan yang lokasinya terdapat aral pencetakan sawah baru”.*

#### **4. Transparansi**

Selain adanya insentif, sikap/disposisi, dan dukungan dari pemerintah, dalam pelaksanaan program ini juga diperlukan adanya suatu transparansi dari pelaksana program Pencetakan Sawah Baru ini. Transparansi didalam suatu program mutlak diperlukan guna menghindari terjadinya penyimpangan yang terjadi baik sebelum, saat pelaksanaan, maupun pada hasil akhir Program Pencetakan Sawah Baru ini, sehingga tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dapat dicapai secara optimal. Transparansi dapat ditunjukkan salah satunya dengan membuat laporan tertulis dan foto-foto perkembangan tentang kegiatan yang telah dilaksanakan dilapangan serta jumlah dana yang telah digunakan dan akan digunakan untuk penyelesaian kegiatan dilapangan.

Para pelaksana secara umum telah melaksanakan program dengan cukup transparan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan yang menyatakan bahwa pelaksanaan Program Pencetakan Sawah Baru ini sangat transparan, keseluruhan kegiatan dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan awal, laporan perkembangan dan laporan akhir kegiatan pelaksanaan program, sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Peternakan berikut

*“Kami selaku pelaksana inti Program Pencetakan Sawah Baru ini selalu membuat laporan baik itu ke Provinsi maupun ke Pusat (Jakarta) secara berkala sesuai dengan petunjuk teknis yang ada, sehingga baik pada awal program, pelaksanaan maupun akhir program ini tidak ada celah yang kami tutup-tutupi. Kami bersikap transparan ini bukan tanpa sebab, karena banyaknya pengawasan dari berbagai pihak dalam pelaksanaan dan penyelesaian program cetak sawah baru ini, sehingga transparansi mutlak diperlukan dalam pelaksanaan program ini.”*

- Hasil Analisis

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap pelaksana program baik di lingkup Dinas Pertanian dan Peternakan maupun Diluar Dinas Pertanian dan Peternakan serta masyarakat penerima program, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah beserta masyarakat penerima program tersebut dapat menerima dengan cukup baik program Pencetakan Sawah Baru tersebut baik itu dari segi dukungan pimpinan, sikap/disposisi, transparansi dan insentif. Pendapat yang dikemukakan oleh masing-masing informan sangat mendukung dengan adanya Program Pencetakan Sawah Baru yang telah dicanangkan. Kepala Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Peternakan mengemukakan bahwa sangat menerima adanya program ini dikarenakan kondisi pangan di Kabupaten Kotawaringin Barat khususnya ketersediaan beras yang hanya 40% mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga perlu adanya tambahan produksi, salah satunya melalui Program Pencetakan Sawah Baru ini. Disamping itu kurangnya luasan lahan sawah yang dimiliki oleh Kabupaten Kotawaringin Barat serta kemampuan petani yang masih terbatas dalam pembukaan sawah baru untuk bercocok tanam membuat program ini sangat diperlukan baik oleh pemerintah, terlebih lagi oleh petani pemilik sawah

baru. Ditambahkan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian dan Peternakan bahwa memang untuk lahan Program Pencetakan Sawah Baru ini masih terdapat banyak kekurangan seperti jaringan tata air, jalan usaha tani, dan alat dan mesin pertanian pendukung kegiatan budidaya padi, namun untuk tahun-tahun mendatang akan dilengkapi melalui dana dari APBD kabupaten maupun dari dana APBN Pusat. Dari pendapat yang disampaikan diatas, menyatakan bahwa tidak ada pendapat yang menyatakan bahwa menolak dengan adanya Program Pencetakan Sawah Baru yang telah dibuat oleh pemerintah untuk peningkatan produksi padi dan masyarakat penerima program batuan mempunyai komitmen yang kuat untuk dapat mensukseskan program Pencetakan Sawah Baru ini, namun dengan adanya keterbatasan seperti jaringan tata air, jalan usaha tani, dan alat dan mesin pertanian pendukung membuat pengaruh yang cukup besar terhadap produksi padi.

Jadi dari beberapa pendapat yang telah disampaikan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa komitmen untuk mensukseskan Program Pencetakan Sawah Baru ini sangat besar dari pihak-pihak yang terlibat karena menganggap bahwa program ini sangat baik untuk mereka dalam rangka meningkatkan produktivitas dan produksi padi di Kabupaten Kotawaringin Barat, namun dengan keterbatasan jaringan tata air, jalan usaha tani, dan alat dan mesin pertanian pendukung membuat pelaksanaan serta keberlanjutan program ini sedikit terhambat, akan tetapi dengan komitmen dari Kepala Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Peternakan untuk berupaya melengkapinya di tahun-tahun

mendatang membuat petani menjadi optimis untuk berusaha tani secara berkelanjutan dilahan yang ada.

Tabel 4.13. Hasil Analisa Tahap Implementasi Kebijakan Ditinjau dari Faktor Sikap (Disposisi).

No	INDIKATOR	HASIL ANALISIS	FAKTOR PENYEBAB
1	Sikap Impelementor terhadap kebijakan	Pelaksana mendukung kebijakan Program Pencetakan Sawah Baru di Kabupaten Kotawaringin Barat	Pelaksana tidak memiliki pandangan yang berbeda dengan pembuat kebijakan
2	Dukungan Pimpinan	Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat mendukung dengan adanya Program Pencetakan Sawah Baru	Penambahan Sawah baru sangat diperlukan untuk meningkatkan produksi padi di Kabupaten Kotawaringin Barat mengingat masih kurang tercukupinya kebutuhan pangan di wilayah Kabupaten
3	Insentif Bagi Pelaksana	Insentif untuk pelaksana yaitu tim teknis telah dianggarkan melalui dana dari APBN Pusat.	Karena adanya SK Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : UKP.1220/ 819.a/VI/ 2013 tentang Penetapan Tim Teknis Perluasan Sawah Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2013
4	Transparansi	Program kegiatan dilakukan secara transparan, dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan berkala kegiatan dilapangan	Karena dipertanggungjawabkan secara tertulis. Laporan yang disampaikan dalam bentuk laporan berkala ke Provinsi dan ke Pusat (Jakarta)

#### **d. Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi suatu kebijakan, hal ini disebabkan struktur birokrasi mendeskripsikan bagaimana kaitan antara satu bagian dengan bagian yang lain dalam lingkungan birokrasi itu sendiri. Arah hubungan, garis komando, dan pola koordinasi antar unit kerja dalam koordinasi menggambarkan adanya suatu struktur birokrasi.

Menurut Teori Edwards III menyatakan bahwa ada 2 karakteristik utama dari struktur birokrasi, yang salah satunya adalah prosedur-prosedur kerja atau *Standart Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi.

##### **1. Ketersediaan SOP (*Standart Operating Procedures*)**

Peneliti mengamati terhadap program Pencetakan Sawah Baru di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2013, unit organisasi pelaksana program yang dalam hal ini Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Peternakan belum memiliki SOP. Hal ini diakui oleh Kepala Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Peternakan berikut,

*“Sebagai Kepala Bidang kami akui jika dalam program pencetakan sawah baru di Kabupaten Kotawaringin Barat ini memang SOP untuk tingkatan Kabupaten belum ada, namun kami hanya mengacu pada petunjuk teknis yang diterbitkan dan dibagikan oleh Kementerian Pertanian kepada kami”*

##### **2. Fragmentasi**

Menurut Kepala Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Peternakan bahwa :

*”Penanggung jawab kegiatan Program Pencetakan Sawah Baru di Kabupaten Kotawaringin Barat berada pada Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan. Sedangkan pelaksana kegiatan berada pada Seksi Pengembangan Lahan dan Sumber Daya Air Distanak, dan tidak adanya seksi khusus yang menangani Program Pencetakan Sawah Baru ini secara spesifik, sehingga fokus kerja dalam menangani program ini sedikit terpecah mengingat seksi ini juga menangani tugas pokoknya untuk menangani kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten, serta jumlah dan mutu sumber daya manusianya yang relatif terbatas sehingga dalam pelaksanaan program ini kami meminta bantuan dari Koordinator dan PPL di lapangan yang kedudukannya di bawah Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan.”*

- Hasil Analisis

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa dari struktur organisasi dalam kondisi yang kurang mendukung yang disebabkan SOP sebagai standar operasional belum dibuat dan tidak adanya seksi yang khusus menangani secara khusus terhadap pelaksanaan Program Pencetakan Sawah Baru ini, sehingga hal ini membuat tidak adanya aturan yang jelas mengenai wewenang dan tanggung jawab dari para pelaksana dilapangan. Tanggung jawab hanya terletak pada Kepala Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Peternakan dan eselon IV beserta staf yang ada pada bidang tersebut. Dengan pembebanan tanggungjawab hanya kepada kepala bidang saja, hal ini dapat berakibat proses pelaksanaan implementasi program Pencetakan Sawah Baru tidak berjalan dengan optimal. Hal ini dikarenakan kurang

fokusnya Kepala bidang tersebut untuk memantau perkembangan pelaksanaan program di lapangan.

Dalam melaksanakan implementasi Program Pencetakan Sawah Baru ini, pelaksana program hanya menggunakan Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis yang ada dan SOP belum ada, sehingga pelaksana program hanya mengacu kepada Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis yang telah ada diberikan oleh Pemerintah Pusat dan pelaksanaan program hanya dibebankan pada Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Peternakan melalui Seksi Pengembangan Lahan dan Sumberdaya Air, sedangkan seksi yang ada disamping harus melaksanakan implementasi Program Pencetakan Sawah Baru mereka juga diharuskan menyelesaikan tugas pokok dan pekerjaan yang berasal dari APBD Kabupaten dan APBN yang ada.

Belum adanya SOP yang ada membuat seksi khusus yang menangani kegiatan Program Pencetakan Sawah Baru ini tidak terbentuk, bila dikaitkan dengan jumlah Sumber Daya Manusia yang ada, apabila sumber daya manusia yang ada berfokus kepada pelaksanaan Program Pencetakan Sawah baru, maka dikhawatirkan akan mengganggu aktivitas kegiatan yang lain. Disamping itu pelaksanaan Program Pencetakan Sawah Baru ini sudah dianggap sebagai tugas rutin yang harus dilaksanakan secara beriringan dan merupakan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Peternakan melalui Seksi Pengembangan Lahan dan Sumberdaya Air, sehingga walaupun tanpa adanya seksi khusus yang menangani Program

Pencetakan Sawah Baru ini, program ini dapat dilaksanakan dengan baik dilapangan.

Dalam pelaksanaan Program Pencetakan Sawah Baru ini, pihak Dinas Pertanian dan Peternakan melakukan koordinasi intensif dengan Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan. Hal ini mutlak diperlukan dikarenakan petugas yang berhubungan langsung dengan petani adalah Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan secara birokrasi, PPL berada di bawah Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan (KPPKP). Bila dilihat dari segi keefektifan kerja maka untuk mengelola program ini kurang optimal, dikarenakan beban kerja PPL di lapangan selain menangani Program Pencetakan Sawah Baru ini, mereka juga dituntut untuk mensukseskan program-program lain yang berasal dari instansi/dinas lain yang berada diwilayah kerja penyuluhan pertanian (WKPP) mereka. Jadi diharapkan secara birokrasi PPL Pertanian berada di bawah Dinas Pertanian dan Peternakan sehingga pelaksanaan program yang ada pada Dinas Pertanian dan Peternakan di lapangan dapat berjalan dengan baik dan maksimal.

Dari berbagai uraian dan pendapat yang telah disampaikan, maka dapat ditarik kesimpulan untuk unsur struktur organisasi terlihat bahwa dalam kondisi yang masih kurang mendukung yang dikarenakan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai standar operasional belum dibuat serta tidak adanya bagian ataupun seksi khusus yang bertanggung jawab dalam implementasi pelaksanaan Program Pencetakan Sawah Baru tersebut.

Tabel 4.14. Hasil Analisa Tahap Implementasi Kebijakan Ditinjau dari Faktor Struktur Birokrasi.

No	INDIKATOR	HASIL ANALISIS	FAKTOR PENYEBAB
1	Ketersediaan SOP	Standar Operasional Prosedur bagi pelaksana kebijakan tidak dibuat	SOP tidak dibuat, karena dianggap sudah ada Pedoman Umum Perluasan Sawah Baru Tahun 2013 dan Petunjuk Teknis Perluasan Sawah Tahun 2013
2	Fragmentasi	Pembagian beban kerja sudah cukup baik, namun belum adanya seksi khusus yang menangani pelaksanaan Program Pencetakan Sawah Baru serta belum adanya pembagian tugas dan wewenang, semua dibawah tanggungjawab Kepala Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Peternakan melalui seksi Pengembangan Lahan dan Sumberdaya Air	Karena sudah dianggap sebagai tugas rutin dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Peternakan.

### C. PEMBAHASAN

Dari uraian mengenai aspek komunikasi maka dapat dijelaskan bahwa kondisi komunikasi baik dari aspek transmisi, kejelasan, konsistensi, dan koordinasi dalam kondisi yang baik. Hal ini sesuai dengan pendapat George C Edwards dalam Agustino (2002) bahwa pada suatu implementasi kebijakan/program, komunikasi yang baik sangat diperlukan sehingga apa yang

harus dilakukan oleh implementator dapat dipahami dengan baik. Indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut, yaitu (a). Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan, (b). Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan, (c). Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan, (d) Koordinasi, agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan koordinasi yang baik antara sesama pelaksana kebijakan dilapangan.

Sedangkan dari segi aspek sumberdaya, kondisi sumberdaya manusia yang ada belum bisa optimal mendukung pelaksanaan program pencetakan sawah baru ini. Hal ini dapat dilihat dari jumlah staf yang tersedia, baik dari segi mutu maupun jumlah yang masih kurang, namun jumlah staf yang tersedia

masih kurang dapat disiasati dengan meminta bantuan penyuluh pertanian lapangan di lokasi kegiatan pencetakan sawah baru untuk memonitor dan membantu mengawasi pelaksanaan program ini sehingga program ini dapat berjalan dengan sukses dan lancar tanpa perlu menambah staf yang ada di Dinas Pertanian dan Peternakan. Sedangkan kondisi informasi, wewenang dan fasilitas pada pelaksanaan program ini cukup tersedia dan mendukung. Edward dalam Agustino (2002) menyatakan bahwa Variabel atau faktor kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumberdaya. Sumberdaya merupakan hal penting lainnya. Indikator sumber-sumberdaya terdiri dari beberapa elemen, yaitu (a). Staf/Sumber Daya Manusia (SDM), sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri,(b). Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap

hukum, (c). Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Disatu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan; tetapi disisi lain, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya, (d). Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Dari segi komitmen untuk mensukseskan Program Pencetakan Sawah Baru ini sangat besar dari pihak-pihak yang terlibat karena menganggap bahwa program ini sangat baik untuk mereka dalam rangka meningkatkan produktivitas dan produksi padi di Kabupaten Kotawaringin Barat, namun dengan keterbatasan jaringan tata air, jalan usaha tani, dan alat dan mesin pertanian pendukung membuat pelaksanaan serta keberlanjutan program ini sedikit terhambat, akan tetapi dengan komitmen dari Kepala Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Peternakan untuk berupaya

melengkapinya di tahun-tahun mendatang membuat petani menjadi optimis untuk berusaha tani secara berkelanjutan dilahan yang ada. Sesuai dengan pendapat Edward dalam Agustino (2002) yang menyatakan bahwa variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah disposisi atau sikap. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi adalah (a). Sikap implementator, untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka diperlukan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan untuk dapat mensukseskan kebijakan tersebut, (b). Dukungan Pimpinan, hal ini sangat diperlukan dalam implementasi suatu program, apabila ada suatu dukungan yang kuat dari pimpinan maka pelaksanaan suatu program akan lebih mantap, (c). Insentif, Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi, (d).

Transparansi, hal ini diperlukan agar dalam pelaksanaan suatu program, tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang berakibat dapat mengganggu dalam melaksanakan program tersebut.

Sedangkan dari unsur struktur organisasi terlihat bahwa dalam kondisi yang masih kurang mendukung yang dikarenakan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai standar operasional belum dibuat serta tidak adanya bagian ataupun seksi khusus yang bertanggung jawab dalam implementasi pelaksanaan Program Pencetakan Sawah Baru tersebut. Sesuai dengan pendapat Edward dalam Agustino (2002) yang menyatakan bahwa. Variabel keempat, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebarkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah lebih baik, adalah melakukan *Standar Operating Procedures (SOPs)* dan melaksanakan *Fragmentasi*. SOPs adalah suatu kegiatan rutin yang

memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administratur/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga). Sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

Guna pencapaian target penambahan luas areal sawah baru sebanyak 500 hektar pada tahun 2013 di Kabupaten Kotawaringin Barat ini, Kementerian Pertanian melalui Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pelaksanaan program kegiatan, fasilitas yang ada dalam kegiatan pencapaian target, pembudidayaan dan keberlanjutan telah dilakukan secara mendetail dan cukup terlengkapi ketersediaan fasilitasnya. Adapun fasilitas yang telah disediakan terdiri dari beberapa macam, yaitu Areal lahan sawah bukaan baru, benih unggul, herbisida, pupuk dan alat dan mesin pertanian. Adapun lahan sawah bukaan baru ini berupa lahan yang bersih dan siap tanam untuk tanaman padi, sehingga diharapkan dapat langsung dilakukan penanaman pada saat selesainya pelaksanaan kegiatan ini. Fasilitas berikutnya yaitu berupa benih unggul dalam hal ini benih unggul lokal maupun unggul nasional menyesuaikan dengan keadaan dan permintaan petani di lokasi kegiatan, hal ini mutlak diperlukan mengingat kondisi dan situasi lokasi lahan sawah bukaan baru ini terdiri dari berbagai kondisi tanah, sehingga perlu pemilihan benih padi yang cocok dan sesuai guna pencapaian produksi padi yang optimal dilahan yang tersedia. Fasilitas yang disediakan berikutnya yaitu berupa herbisida guna pelaksanaan pembudidayaan tanaman padi dilahan tersebut. Pemberian herbisida tersebut merupakan stimulus awal bagi petani

yang telah ditentukan lahannya agar segera dapat melaksanakan kegiatan penanaman dan pemeliharaan tanaman padi guna pencapaian produksi padi yang optimal dilahan yang tersedia. Berikutnya Fasilitas yang disediakan berupa pupuk baik itu pupuk organik maupun pupuk anorganik guna pelaksanaan pembudidayaan tanaman padi dilahan tersebut. Pemberian pupuk tersebut merupakan stimulus awal bagi petani yang telah ditentukan lahannya agar segera dapat melaksanakan kegiatan penanaman dan pemeliharaan tanaman padi guna pencapaian produksi padi yang optimal dilahan yang tersedia. Sedangkan yang terakhir yaitu fasilitas yang berupa alat dan mesin pertanian, fasilitas ini disediakan sesuai dengan kebutuhan kelompok, adapun fasilitas yang dapat disediakan yaitu berupa alat-alat yang belum dimiliki oleh petani yang sekiranya sangat dibutuhkan oleh petani. Dalam program ini fasilitas alat dan mesin yang dapat disediakan yaitu berupa handsprayer (alat semprot manual), pedal threster (alat perontok padi manual), serta seperangkat mesin pompa air. Alat ini mutlak diperlukan guna pelaksanaan kegiatan pada sawah baru yang telah dicetak. Sedangkan untuk alat lainnya yang berupa handtraktor belum tersedia, namun kelompok tani dapat meminjam/ menyewa secara mandiri kepada kelompok tani yang lain disekitar wilayah tersebut, mengingat sudah banyak tersedianya alat tersebut sehingga kelompok tani penerima bantuan pencetakan sawah baru dapat menggarap lahannya tanpa kendala yang berarti. Sedangkan untuk keberlanjutan pelaksanaan program ini, pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat terus berupaya mendampingi dan menjembatani apa-apa saja kebutuhan serta kendala yang dihadapi oleh petani tersebut, guna

diakomodir pada tahun- tahun mendatang agar keberlanjutan pelaksanaan program ini dapat berjalan dengan baik.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dalam penelitian ini memiliki maksud yaitu ingin mengetahui bagaimana Implementasi Keberlanjutan Pelaksanaan Program Pencetakan Sawah Baru Tahun Anggaran 2013 di Kabupaten Kotawaringin Barat. Sehubungan dengan ini maka dapat diambil beberapa hal yang menjadi kesimpulan, seperti sebagai berikut:

1. Pada pelaksanaan Program Pencetakan Sawah Baru ini, aspek komunikasi yang terdiri dari : transmisi, kejelasan, konsistensi, dan koordinasi sangat mendukung, hal ini terlihat dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para informan yang menyatakan bahwa tidak ada pendapat yang saling bertentangan dengan Program Pencetakan Sawah Baru ini. Dengan adanya Pedoman umum Perluasan Sawah dan Petunjuk Teknis Perluasan Areal Sawah menunjukkan bahwa dengan adanya hal tersebut pelaksanaan program ini sudah sangat membantu dalam Realisasi Program Pencetakan Sawah Baru ini dan informasi yang disampaikan ke masing-masing pelaksana sudah sangat jelas. Jadi disimpulkan bahwa faktor komunikasi menurut Teori Edward III sudah sangat baik dalam rangka mensukseskan Program Pencetakan Sawah Baru ini.

2. Pada Pelaksanaan Program Pencetakan Sawah Baru ini, aspek sumber daya yang kurang mendukung adalah sumber daya manusia dan fasilitas berupa jaringan tata air, jalan usaha tani serta alat dan mesin pertanian.
  - a. Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian dan Peternakan berjumlah 11 (sebelas) orang dan sudah termasuk Kepala Bidang dan Kepala Seksi, hal ini memang dapat menjadi kelemahan bagi bidang tersebut, dan seharusnya ada penambahan staf pada bidang ini, khususnya staf bagian lapangan seperti Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Untuk posisi PPL searang ini berada dibawah Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan (KPPKP), bila PPL masuk ke dalam Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan maka diharapkan akan menambah lagi kekuatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan di tingkat lapangan. Bila suatu program/kegiatan bila tidak didukung dengan personil yang memadai memang dapat berjalan namun hasil yang dicapai kurang ataupun bahkan tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan. Memang diperlukan staf atau petugas dilapangan untuk mendampingi dan mengawal setiap program/kegiatan yang ada dikarenakan aplikasi kegiatan pertanian hampir seluruhnya berada di lapangan.
  - b. Jaringan tata air untuk arael persawahan yang baru dibuka mutlak diperlukan karena didalam setiap sistem budidaya tanaman apapun air sangat menjadi kebutuhan pokok, khususnya untuk budidaya tanaman padi . Ketersediaan air untuk pertumbuhan dan hasil optimal untuk

tanaman padi sawah ini harus tepat jumlah dan tepat waktu, sehingga pembangunan jaringan tata air harus diutamakan. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dan wawancara menunjukkan bahwa jaringan tata air yang ada di areal Program Pencetakan Sawah Baru ini memang perlu disempurnakan guna mengoptimalkan hasil produksi padi pada lahan tersebut.

- c. Jalan usaha tani pada areal lahan Program Pencetakan Sawah Baru perlu didukung dan ditingkatkan supaya akses petani menuju ke lahannya tanpa hambatan yang berarti dan untuk pemasaran dan pendistribusian hasil panen pertanian apabila kelak sudah memasuki masa panen dapat lancar dan tanpa kendala.
  - d. Fasilitas alat dan mesin pertanian yang ada harus menjadi pokok perhatian karena untuk lahan pertanian di Kabupaten Kotawaringin Barat umumnya seorang petani memiliki lahan yang relatif luas, sehingga kemampuan petani tanpa menggunakan alat dan mesin pertanian untuk melaksanakan kegiatan pertaniannya akan terbatas, sehingga diperlukan bantuan ataupun stimulan pada tahun-tahun mendatang dari pemerintahan daerah untuk melengkapi alat dan mesin pertanian, sehingga keberlanjutan produksi padi sawah yang telah dicetak dapat berlanjut secara berkesinambungan.
3. Sikap/disposisi pelaksana, insentif petugas, dukungan pimpinan serta transparansi pada Program Pencetakan Sawah Baru ini sudah sangat mendukung untuk mensukseskan program ini yang terlihat berjalan dengan baiknya program ini dilapangan.

4. Unsur struktur birokrasi yang dimiliki belum cukup mendukung dalam pelaksanaan Program Pencetakan Sawah Baru ini khususnya dilihat dari faktor SOP dan fragmentasi. Pada pelaksanaan Program Pencetakan Sawah Baru ini SOP dan seksi yang secara khusus menangani program ini belum ada, yang mengakibatkan tugas serta wewenang masing-masing seksi kurang jelas dan program ini kurang dapat berjalan dengan maksimal dikarenakan beban kerja yang lebih besar diserahkan kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian dan Peternakan
5. Untuk Realisasi Program Pencetakan Sawah Baru di Kabupaten Kotawaringin Barat telah sesuai dengan target yang diharapkan yaitu telah tercetaknya sawah seluas 500 hektar di lokasi yang telah ditentukan sehingga lahan sawah yang telah dicetak tersebut dapat siap ditanami untuk pembudidayaan tanaman pangan khususnya tanaman padi.
6. Untuk membudidayakan sawah baru yang telah ada tercetak, telah diberikan stimulan bantuan berupa benih padi, herbisida, pupuk, dan alat mesin pertanian sederhana guna mendukung pelaksanaan kegiatan Program Pencetakan Sawah Baru. Hal ini diperlukan sebagai stimulan awal guna mendukung dan memotivasi petani agar segera dapat memanfaatkan lahan sawah yang telah tersedia untuk menanam dan memproduksi padi guna peningkatan pemenuhan kebutuhan pangan di Kabupaten Kotawaringin Barat.
7. Keberlanjutan produksi padi pada Program Pencetakan Sawah Baru ini yaitu dengan pembinaan yang intensif oleh penyuluh pertanian lapangan setempat kepada anggota kelompok tani sehingga lahan yang tersedia

dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan, serta adanya komitmen dari pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat pada lahan sawah yang telah dicetak dengan memberikan bantuan dan stimulan berupa alat dan mesin pertanian, beserta sarana produksi lainnya secara berkesinambungan dan terus menerus sampai petani dapat mandiri pada tahun-tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketersediaan dana yang ada.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan yang ada maka terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan dalam proses implementasi Program Pencetakan Sawah Baru sebagai berikut:

1. Jumlah dan Kualitas Sumber daya manusia pada pelaksanaan program ini perlu ditingkatkan supaya pelaksanaan Program Pencetakan Sawah Baru di tahun-tahun mendatang dapat memperoleh hasil yang optimal. Ketersediaan personel dapat dipenuhi dengan merekrut pegawai baru ataupun dengan mengambil dari bidang lain yang relatif berlebih dan beban kerjanya relatif sedikit untuk dapat diberdayakan pada Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian dan Peternakan khususnya untuk menangani Program Pencetakan Sawah baru ini agar supaya hasil yang diperoleh dapat optimal. Sedangkan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan singkat kepada pegawai yang ada supaya dapat lebih mamahami mengenai tujuan beserta sasaran yang ingin dicapai dalam Program Pencetakan Sawah Baru ini.

2. Fasilitas berupa jaringan tata air, jalan usaha tani serta alat dan mesin pertanian harus menjadi perhatian pokok karena unsur-unsur inilah yang menjadi kendala yang dihadapi oleh sebagian petani penerima Program Pencetakan Sawah Baru di Kabupaten Kotawaringin Barat. Dari wawancara yang peneliti lakukan dilapangan menunjukkan bahwa jaringan tata air serta alat dan mesin pertanian perlu ditingkatkan kuantitas maupun kualitasnya guna mendukung terlaksana secara berkelanjutannya produksi padi di lahan sawah baru yang telah dicetak tersebut.
3. Pada pelaksanaan Program Pencetakan Sawah Baru di tahun-tahun mendatang , diharapkan adanya dukungan dari APBD Kabupaten dalam pemberian tambahan insentif selain yang sudah diberikan melalui dana dari APBN Pusat, sehingga pembinaan yang dilakukan oleh petugas lapangan dapat lebih intensif dalam memotivasi petani untuk bertanam tanaman pangan (khususnya padi) sehingga hasil yang diperoleh dapat optimal
4. Diperlukan adanya seksi khusus dan pembuatan SOP yang jelas untuk menangani Program Pencetakan Sawah Baru ini, sehingga diharapkan dengan dibentuknya seksi khusus tersebut dan adanya SOP yang jelas diharapkan petugas yang ada didalamnya dapat lebih fokus bekerja, sehingga hasil pelaksanaan program yang diharapkan dapat diperoleh dengan baik.
5. Diharapkan dengan telah selesainya Program Pencetakan Sawah Baru, pemerintah daerah agar memvalidasi lahan sawah yang telah tercetak tersebut untuk mohon ditetapkan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan sesuai Undang-undang nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam bentuk peraturan daerah, sehingga lahan-lahan

sawah yang telah tercetak tidak beralih fungsi menjadi lahan non pertanian tanaman pangan.

6. Diharapkan pemerintah daerah dapat memberikan stimulan lanjutan pada tahun-tahun mendatang kepada lahan sawah yang baru dicetak ini, sehingga petani termotivasi untuk menanam dan memproduksi padi guna peningkatan pemenuhan kebutuhan pangan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous.2008. *Operasional Pelayanan Prima*. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Jakarta
- , 2008. *Isu Aktual Sesuai Tema*. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Jakarta
- , 2008. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Abdul Wahab.S. 2011. *Analisis Kebijakan Publik*. UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang. UNM Press Malang.
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-dasar Kebijakan publik*. Alfabeta. Bandung.
- Arikunto,S. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.
- BBSDLP. 2008. *Policy Brief. Keragaan dan Ketersediaan Sumberdaya Lahan Untuk Pembangunan Pertanian*. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian. Bogor.
- Bungin Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Airlangga University Press. Surabaya.
- Chalid, Pheni. 2010. *Teori dan Isu Pembangunan*. Universitas Terbuka. Jakarta.
- Dwiyanto, Agus dkk. 2012. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Elu, Wilfridus.dkk.2010. *Inovasi dan Perubahan Organisasi*. Universitas Terbuka; Jakarta.
- Handary, MF Anita Widhy. 2012. *Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan di Kabupaten Magelang*. Tesis Program PascaSarjana Universitas Diponegoro. Semarang
- Irawan, Prasetyo. 2010. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Universitas Terbuka. Jakarta.
- Istianda, Meita. 2009. *Studi Mandiri*. Universitas Terbuka. Jakarta
- Mardiasmo.2004. *Otonom dan Manajemen Keuangan Daerah*. CV Andi Offset. Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosdakarya. Bandung
- Nelson,AC. 1992. *Preserve Prime Farmland In The Face of Urbanization*. Journal of The American Planning Association; Autumn 1992, Vol 58 Issue 4, Page 467, 22 Page

- Nuhfil Hanani, AR. 2010. *Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pertanian dalam rangka Ketahanan Pangan Daerah di Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar*. STPP Malang Press.
- Rosidi, Imron. 2009. *Sukses Menulis Karya Ilmiah*. Pustaka Sidogiri. Pasuruan.
- Sitorus SRP. 2004. *Evaluasi Sumberdaya Lahan*. Penerbit Tarsito. Bandung.
- Sumardjo. 2009. *Strategi Pemecahan Masalah Ketahanan Pangan dari Sisi Produksi dan Distribusi Pangan*. Di dalam : Sumardjo, Burbayanto A Sutjahjo SH, Budiono A, Toharmat T, Muntasib EKSH, Mandang T, Hartana A, Sinaga BM (Editor). *Peranan Ipteks dalam Pengelolaan Pangan, Energi, SDM dan Lingkungan yang Berkelanjutan*. IPB Press. Bogor.
- Suryana A. 2005. *Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional*. Makalah Seminar Pada Simposium Nasional Ketahanan dan Keamanan Pangan pada Era Otonomi dan Globalisasi pada Tanggal 22 November 2005. Dilaksanakan oleh Fakultas Pertanian IPB. Bogor.
- Syahrial. 2011. *Analisis Akses Petani Terhadap Lahan Cetak Sawah Baru Pada Program Perluasan Lahan Sawah di Kenagarian Tapakis Kabupaten Padang Pariaman*. Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Padang.
- Rustiadi E, Wafda R. 2008. *Urgensi Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Abadi dalam Perspektif Ketahanan Pangan*. Di dalam: Sitanala A. Rustiadi E (Editor). *Penyelamatan Tanah, Air dan Lingkungan*. Crestpent Press dan Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Rustiadi E, Barus B, Selari M. 2010. *Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Penataan Ruang*. Makalah Seminar pada Semiloka Koordinasi Kebijakan Pengelolaan dan Penyediaan Lahan Untuk Pertanian : Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada tanggal 14 April 2010. Dilaksanakan oleh menko perekonomian dan P4W-IPB Bogor.

**Lampiran 1****PEDOMAN WAWANCARA**

Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PROGRAM PENCETAKAN SAWAH BARU DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Nama Mahasiswa : HAJAR SUGIHANDOYO

No Mahasiswa : 018788318

Program Studi : Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka

Nama Informan : I (Kepala Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Peternakan)

1. Apakah pemerintah sudah memberikan informasi mengenai Undang-undang no. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ? jika sudah, jelaskan melalui apa peraturan- peraturan tersebut diberikan.
2. Apakah menurut Saudara ruang lingkup Program Pencetakan Sawah Baru untuk Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat
3. Selain Dinas Pertanian dan Peternakan, apakah ada dinas/ instansi/ lembaga lain yang terkait dalam Program tersebut ?
4. Bagaimana koordinasi antar dinas/ instansi/ lembaga lain yang terkait dengan peraturan ini?
5. Apakah dari segi kuantitas dan kualitas, SDM pelaksana dari Program Pencetakan Sawah Baru untuk Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sudah mencukupi?
6. Apakah ada koordinasi antar dinas/instansi/lembaga terkait dengan Program Pencetakan Sawah Baru untuk Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat?
7. Bagaimana tanggapan Saudara dengan adanya Program Pencetakan Sawah Baru untuk Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat?

8. Bagaimana pemahaman Saudara secara umum mengenai program tersebut yang menjadi tugas saudara untuk mengimplementasikannya, jika belum paham, hal- hal apa saja yang belum Saudara pahami dan menjadi kendala?
9. Bagaimana dukungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten terhadap Program Pencetakan Sawah Baru untuk Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat?
10. Apakah unit organisasi pelaksana program ini memiliki SOP yang jelas, jika ada, apakah setiap pelaksana kebijakan sudah memahami dan melaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada?
11. Apakah sudah ada transparansi dari pelaksanaan program ini?
12. Apakah ada seksi khusus atau bagian yang mengurus program tersebut?
13. Apakah Saudara memiliki komitmen yang kuat untuk mengimplementasikan program tersebut? Jika ya, jelaskan dengan apa komitmen tersebut ditunjukkan.
14. Apakah sudah ada aturan yang jelas mengenai wewenang dan tanggungjawab dari masing- masing pelaksana? Jika sudah ada, apakah pelaksanaan sudah sesuai dengan aturan yang ada.
15. Apakah tugas dalam mengimplementasikan Program Pencetakan Sawah Baru untuk Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat sudah ada penugasan berupa surat/SK dari Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan abupaten Kotawaringin Barat?
16. Menurut Saudara apakah Program Pencetakan Sawah Baru untuk Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat sudah sesuai dan tepat dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat?
17. Menurut Saudara apakah fasilitas/sarana prasarana untuk menunjang pelaksanaan kebijakan ini sudah cukup dan memadai?
18. Apakah pernah masyarakat mengusulkan Pencetakan Sawah Baru untuk Pemenuhan Kebutuhan Pangan di tanah yang dimilikinya di Kabupaten Kotawaringin Barat?
19. Menurut Saudara apa upaya Dinas Pertanian dan Peternakan untuk mengimplementasikan Program Pencetakan Sawah Baru untuk

Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat? Bagaimana strategi agar masyarakat mau dan mampu bertahan untuk mengembangkan lahan pertanian pangan mereka?

20. Apakah target Saudara sebagai kepala bidang tentang program pencetakan sawah baru ini
21. Apa upaya saudara sebagai kepala bidang untuk mengoptimalkan budidaya sawah yang baru dicetak ini?
22. Bagaimana saudara sebagai kepala bidang untuk dapat mengawal dan membantu petani dalam keberlanjutan menanam tanaman padi sawah di lahan program pencetakan sawah baru ini?

## PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PROGRAM PENCETAKAN SAWAH BARU DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Nama Mahasiswa : HAJAR SUGIHANDOYO

No Mahasiswa : 018788318

Program Studi : Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka

Nama Informan : II (Kepala Seksi Pengembangan Lahan dan Sumberdaya Air Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat)

1. Apakah Saudara mengetahui Program Pencetakan Sawah Baru untuk Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat? Jika ya, kapan dan dari mana Saudara mengetahuinya?
2. Apakah Saudara tahu apa tujuan dan sasaran program tersebut?
3. Apakah ada koordinasi dengan instansi terkait dalam hal pelaksanaan program tersebut
4. Menurut Saudara apakah fasilitas/ sarana prasarana untuk menunjang pelaksanaan program tersebut sudah cukup dan memadai?
5. Bagaimana tanggapan dari instansi Saudara dengan adanya Program Pencetakan Sawah Baru untuk Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat?
6. Bagaimana pemahaman Saudara secara umum mengenai program tersebut?
7. Apakah Saudara mempunyai komitmen yang kuat untuk ikut mensukseskan program tersebut?
8. Menurut Saudara apakah program ini baik untuk dilaksanakan?
9. Bagaimana dengan petugas pelaksana di bidang saudara, apakah dari kuantitas dan kualitas sudah memadai?
10. Apakah target Saudara sebagai kepala seksi tentang program pencetakan sawah baru ini

11. Apa upaya saudara sebagai kepala seksi untuk mengoptimalkan budidaya sawah yang baru dicetak ini?
12. Bagaimana saudara sebagai kepala seksi untuk dapat mengawal dan membantu petani dalam keberlanjutan menanam tanaman padi sawah di lahan program pencetakan sawah baru ini?

## PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PROGRAM PENCETAKAN SAWAH BARU DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
Nama Mahasiswa : HAJAR SUGIHANDOYO  
No Mahasiswa : 018788318  
Program Studi : Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka  
Nama Informan : III (Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan/ PPL)

1. Apakah Saudara mengetahui Program Pencetakan Sawah Baru untuk Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat? Jika ya, kapan dan darimana mengetahuinya?
2. Apakah Saudara tahu apa tujuan Program Pencetakan Sawah Baru untuk Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat?
3. Apakah Saudara mendukung dan apa tanggapan instansi saudara dengan adanya program ini?
4. Bagaimana pemahaman Saudara mengenai Program Pencetakan Sawah Baru untuk Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat?
5. Menurut Saudara apakah peraturan ini baik untuk dilaksanakan?
6. Apakah Saudara mempunyai komitmen untuk mensukseskan Program Pencetakan Sawah Baru untuk Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat?
7. Apakah program ini menurut Saudara sudah tepat dan bermanfaat untuk dilaksanakan?
8. Apakah target Saudara tentang program pencetakan sawah baru ini
9. Apa upaya saudara sebagai PPL untuk mengoptimalkan budidaya sawah yang baru dicetak ini?

10. Bagaimana saudara sebagai PPL untuk dapat mengawal dan membantu petani dalam keberlanjutan menanam tanaman padi sawah di lahan program pencetakan sawah baru ini?

## PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PROGRAM PENCETAKAN SAWAH BARU DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Nama Mahasiswa : HAJAR SUGIHANDOYO

No Mahasiswa : 018788318

Program Studi : Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka

Nama Informan : IV (Ketua Kelompok Tani Program Pencetakan Sawah Baru untuk Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat)

1. Apakah Saudara mengetahui Program Pencetakan Sawah Baru untuk Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat? Jika ya, kapan dan darimana mengetahuinya?
2. Apakah saudara tahu apa tujuan Program Pencetakan Sawah Baru untuk Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat?
3. Apakah Saudara pernah mengikuti sosialisasi/ pelatihan dari Dinas terkait tentang program tersebut?
4. Menurut Saudara apakah petugas sudah cukup menjelaskan tentang peraturan ini?
5. Apakah program ini baik dan bermanfaat bagi petani?
6. Apakah Saudara mendukung lahan pertanian saudara ditetapkan pada Program Pencetakan Sawah Baru untuk Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat?
7. Apakah target Saudara tentang program pencetakan sawah baru ini
8. Apa upaya saudara sebagai Petani dalam mengoptimalkan budidaya padi sawah pada lahan yang baru dicetak ini?
9. Bagaimana saudara sebagai ketua kelompok tani/petani untuk dapat lanjut menanam tanaman padi sawah di lahan program pencetakan sawah baru ini di tahun-tahun mendatang?

## Lampiran 2

## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan : Kepala Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana  
Pertanian dan Peternakan

Tempat : Pangkalan Bun

Pewawancara : Peneliti

Hasil :

1.

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah pemerintah sudah memberikan informasi mengenai Undang-undang no. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ? jika sudah, jelaskan melalui apa peraturan- peraturan tersebut diberikan.	Kementerian Pertanian selaku pembuat kebijakan telah memberi informasi yang jelas mengenai tujuan dari program pencetakan sawah baru ini melalui pemberian Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pencetakan Sawah yang mencakup tujuan, sasaran, spesifikasi teknis, lokasi, dan kriteria penerima bantuan Program Pencetakan Sawah Baru, dan juga telah dilakukan sosialisasi melalui rapat-rapat dan pertemuan di Tingkat Provinsi
2	Apakah menurut Saudara ruang lingkup Program Pencetakan Sawah Baru untuk Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat	Sudah, Kementerian Pertanian telah memberikan penjelasan dalam petunjuk teknis dan kami rasa sudah cukup jelas dengan adanya juknis tersebut.yang didalamnya tercantum tujuan, sasaran, spesifikasi teknis, lokasi, dan kriteria penerima Cetak Sawah
3	Selain Dinas Pertanian dan Peternakan, apakah ada dinas/ instansi/ lembaga lain yang terkait dalam Program tersebut ?	Saya selaku Kepala Bidang sangat konsisten mendukung program ini. Dengan adanya program ini maka kebiasaan petani untuk membuka lahan pertaniannya dengan cara membakar dapat secara signifikan dikurangi. Dari segi keuangan daerah, program ini sangat membantu daerah dalam kemampuan daerah mencetak sawah melalui APBD Kabupaten. Memang setiap tahun kami dari APBD Kabupaten juga menganggarkan program pencetakan sawah baru juga, namun jumlahnya sangat sedikit luasannya dibandingkan dengan luasan yang dicetak melalui anggaran

		kementerian pertanian. Jadi bila dilihat dari tujuan program ini, program ini sangat baik dan perlu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh
4	Bagaimana koordinasi antar dinas/ instansi/ lembaga lain yang terkait dengan peraturan ini?	dalam pelaksanaan program cetak sawah baru di Kabupaten Kotawaringin Barat ini, koordinasi antar instansi sudah cukup baik, terutama koordinasi dengan instansi KPPKP dengan rutusnya pertemuan yang dilakukan baik di Dinas Pertanian maupun di tiap BPP kecamatan
5	Apakah dari segi kuantitas dan kualitas, SDM pelaksana dari Program Pencetakan Sawah Baru untuk Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sudah mencukupi?	Dari segi jumlah dan mutu, sumber daya manusia yang terdapat dalam bidang ini sangat minim, sedangkan pekerjaan yang harus dilaksanakan bukan saja pencetakan sawah baru, namun tugas lain berupa tugas rutin yang lain juga harus dilakukan, sehingga dengan tugas lain yang harus dilaksanakan oleh staf yang tersedia, maka dalam melaksanakan pekerjaan program pencetakan sawah baru ini masih belum fokus
6	Apakah ada koordinasi antar dinas/instansi/lembaga terkait dengan Program Pencetakan Sawah Baru untuk Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat?	Koordinasi telah kita lakukan melalui pertemuan-pertemuan baik itu di Kantor Dinas Pertanian maupun dengan melakukan koordinasi dengan pihak petani yang dalam hal ini yaitu ketua kelompok taninya, serta dengan camat maupun kepala desa di wilayah yang terdapat program apabila adanya permasalahan.
7	Bagaimana tanggapan Saudara dengan adanya Program Pencetakan Sawah Baru untuk Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat?	Tanggapan kami selaku pelaksana program ini yaitu program cetak sawah ini cukup baik dilaksanakan dimasyarakat, dan cukup membantu masyarakat dalam mengusahakan lahannya karena bila biasanya masyarakat bertanam padi dengan membakar lahannya, namun dengan adanya program ini pembakaran lahan dapat dikurangi seminimal mungkin.
8	Bagaimana pemahaman Saudara secara umum mengenai program tersebut yang menjadi tugas saudara untuk mengimplementasikannya, jika belum paham, hal-hal apa saja yang belum Saudara	Untuk pemahaman program ini secara garis besarnya kami cukup memahami program ini mengacu kepada pedoman umum, serta petunjuk teknis yang telah ada, sehingga aplikasi program dilapangan dapat terlaksana dengan baik sesuai petunjuk yang ada.

	pahami dan menjadi kendala?	
9	Bagaimana dukungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten terhadap Program Pencetakan Sawah Baru untuk Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat?	Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sangat mendukung adanya program ini. Hal ini diwujudkan dengan pemberian Honor untuk petugas yang terlibat dalam kegiatan pencetakan sawah baru ini disesuaikan sesuai dengan beban kerja yang ada, dalam tim ini terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. Untuk ketua tim diisi oleh Kepala Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Peternakan, dan sekretaris diisi oleh Kepala Seksi Pengembangan Lahan dan Sumberdaya Air, Sedangkan anggota tim terdiri dari berbagai macam instansi yang berkaitan yaitu dari Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kehutanan, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten, Kepala Seksi yang berkaitan di Dinas Pertanian dan Peternakan, Serta Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan yang lokasinya terdapat aral pencetakan sawah baru
10	Apakah unit organisasi pelaksana program ini memiliki SOP yang jelas, jika ada, apakah setiap pelaksana kebijakan sudah memahami dan melaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada?	Sebagai Kepala Bidang kami akui jika dalam program pencetakan sawah baru di Kabupaten Kotawaringin Barat ini memang SOP untuk tingkatan Kabupaten belum ada, namun kami hanya mengacu pada petunjuk teknis yang diterbitkan dan dibagikan oleh Kementerian Pertanian kepada kami
11	Apakah sudah ada transparansi dari pelaksanaan program ini?	Kami selaku pelaksana inti Program Pencetakan Sawah Baru ini selalu membuat laporan baik itu ke Provinsi maupun ke Pusat (Jakarta) secara berkala sesuai dengan petunjuk teknis yang ada, sehingga baik pada awal program, pelaksanaan maupun akhir program ini tidak ada celah yang kami tutup-tutupi. Kami bersikap transparan ini bukan tanpa sebab, karena banyaknya pengawasan dari berbagai pihak dalam pelaksanaan dan penyelesaian program cetak sawah baru

		ini, sehingga transparansi mutlak diperlukan dalam pelaksanaan program ini
12	Apakah ada seksi khusus atau bagian yang mengurus program tersebut?	Seksi yang khusus menangani program ini belum ada dikarenakan keterbatasan SDM pada bidang kami, sehingga program ini diurus oleh seksi Pengembangan Lahan dan Sumberdaya Air
13	Apakah Saudara memiliki komitmen yang kuat untuk mengimplementasikan program tersebut? Jika ya, jelaskan dengan apa komitmen tersebut ditunjukkan.	Ya, komitmen kita untuk mensukseskan program cetak sawah baru ini dengan cara mengikuti pola yang telah dijabarkan pada petunjuk pelaksanaan yang ada serta melalui pengawasan berkala terhadap kemajuan kegiatan program ini sesuai dengan kewenangan kami. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sangat mendukung dengan adanya Program Pencetakan Sawah Baru ini dalam rangka peningkatan produksi beras di Kabupaten Kotawaringin Barat, walaupun kemampuan SDM petugas, ketersediaan sarana produksi, serta petani pelaksana yang belum lengkap dan memadai, Program Pencetakan Sawah Baru ini baik dan sesuai dengan kebutuhan petani di Kabupaten Kotawaringin Barat yang terbiasa menanam padi dengan membakar lahan dan dengan lahan yang seadanya dengan pengolahan tanah minimal, diharapkan dapat merubah kebiasaan petani tersebut sehingga menghasilkan produksi padi yang mencukupi minimal untuk keluarganya dan syukur-syukur dapat berlebihan dan dijual. Memang dalam program pencetakan sawah baru ini ada beberapa lokasi yang sarana dan prasarannya belum tersedia, misalnya jalan usaha taninya belum terbangun, jaringan tata air yang belum terkoneksi dengan baik, serta sarana dan prasarana pertanian lainnya seperti alat dan mesin pertanian yang masih terbatas dan terpaksa meminjam kepada kelompok tani tetangga, namun di tahun-tahun mendatang, kami berkomitmen untuk dapat melengkapinya guna memacu semangat petani untuk dapat bertanam dan berproduksi padi secara terus menerus
14	Apakah sudah ada aturan	Penanggung jawab kegiatan Program

	<p>yang jelas mengenai wewenang dan tanggungjawab dari masing-masing pelaksana? Jika sudah ada, apakah pelaksanaan sudah sesuai dengan aturan yang ada.</p>	<p>Pencetakan Sawah Baru di Kabupaten Kotawaringin Barat berada pada Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan. Sedangkan pelaksana kegiatan berada pada Seksi Pengembangan Lahan dan Sumber Daya Air Distanak, dan tidak adanya seksi khusus yang menangani Program Pencetakan Sawah Baru ini secara spesifik, sehingga fokus kerja dalam menangani program ini sedikit terpecah mengingat seksi ini juga menangani tugas pokoknya untuk menangani kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten, serta jumlah dan mutu sumber daya manusianya yang relatif terbatas sehingga dalam pelaksanaan program ini kami meminta bantuan dari Koordinator dan PPL di lapangan yang kedudukannya di bawah Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan.</p>
15	<p>Apakah tugas dalam mengimplementasikan Program Pencetakan Sawah Baru untuk Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat sudah ada penugasan berupa surat/SK dari Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat?</p>	<p>Sudah ada, yaitu berupa SK Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat</p>
16	<p>Menurut Saudara apakah Program Pencetakan Sawah Baru untuk Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat sudah sesuai dan tepat dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat?</p>	<p>Program Pencetakan sawah baru ini sudah sesuai dan tepat dengan kebutuhan petani dan mereka cukup terbantu dengan adanya program ini</p>
17	<p>Menurut Saudara apakah fasilitas/sarana prasarana untuk menunjang pelaksanaan kebijakan ini sudah cukup dan memadai?</p>	<p>Sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan program ini saya kira belum memadai sehingga masih harus ditambah serta ditingkatkan di tahun-tahun berikutnya</p>

18	Apakah pernah masyarakat mengusulkan Pencetakan Sawah Baru untuk Pemenuhan Kebutuhan Pangan di tanah yang dimilikinya di Kabupaten Kotawaringin Barat?	Pernah, terutama masyarakat dari desa yang memiliki lahan yang dirasakan cocok dan sesuai untuk pengembangan tanaman padi sawah.
19	Menurut Saudara apa upaya Dinas Pertanian dan Peternakan untuk mengimplementasikan Program Pencetakan Sawah Baru untuk Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat? Bagaimana strategi agar masyarakat mau dan mampu bertahan untuk mengembangkan lahan pertanian pangan mereka?	Upaya dari kami yaitu melakukan koordinasi baik itu ke tingkat atas yaitu provinsi dan pusat, koordinasi antar instansi kabupaten, maupun koordinasi ke tingkat bawah yaitu camat, kepala desa, PPL desa, maupun ketua kelompok tani yang ada agar masyarakat mau dan mampu bertahan untuk mengembangkan lahan pertanian pangan mereka guna mensukseskan program ini. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat terus berupaya mendampingi dan menjembatani apa-apa saja kebutuhan serta kendala yang dihadapi oleh petani tersebut, guna diakomodir pada tahun-tahun mendatang agar keberlanjutan pelaksanaan program ini dapat berjalan dengan baik.
20	Apakah target Saudara sebagai kepala bidang tentang program pencetakan sawah baru ini	Target kami sebagai pelaksana program yaitu mensukseskan program ini sehingga dapat langsung dimanfaatkan oleh petani
21	Apa upaya saudara sebagai kepala bidang untuk mengoptimalkan budidaya sawah yang baru dicetak ini?	Upaya kami yaitu dengan mengkoordinasikan dengan kepala seksi maupun kepala dinas agar hambatan-hambatan yang ada mengenai program ini dapat teratasi dan berjalan dengan lancar
22	Bagaimana saudara sebagai kepala bidang untuk dapat mengawal dan membantu petani dalam keberlanjutan menanam tanaman padi sawah di lahan program pencetakan sawah baru ini?	Upaya kami yaitu selain melakukan koordinasi dengan dengan memonitoring kegiatan yang berjalan dilapangan dan melakukan evaluasi bagaimana program ini dapat berjalan dengan baik, sehingga keberlanjutan program ini dapat berjalan berkesinambungan.

## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan : Kepala Seksi Pengembangan Lahan dan Sumberdaya Air  
Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin  
Barat

Tempat : Pangkalan Bun

Pewawancara : Peneliti

Hasil :

1.

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Saudara mengetahui Program Pencetakan Sawah Baru untuk Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat? Jika ya, kapan dan dari mana Saudara mengetahuinya?	Ya, saya mengetahui adanya program cetak sawah baru dan informasi ini kami dapat dari sosialisasi yang dilakukan sebelum program ini berjalan melewati Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
2	Apakah Saudara tahu apa tujuan dan sasaran program tersebut?	Kami selaku pelaksana program dilapangan dengan adanya program ini sangat baik dan menerima, hal ini dikarenakan sangat membantu petani dengan adanya program ini. Disamping program ini merupakan salahsatu dari Tupoksi saya selaku kepala seksi, sehingga kami berkeinginan kuat untuk mensukseskan program cetak sawah ini
3	Apakah ada koordinasi dengan instansi terkait dalam hal pelaksanaan program tersebut	kami telah melaksnakan koordinasi secara intensif dengan instansi terkait dalam melaksanakan program cetak sawah ini, seperti Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan (KPPKP) dikarenakan pelaksanaan program dilapangan berkaitan dengan instansi ini khususnya petugas yang berada di bawah naungannya yaitu Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) agar pelaksanaan program ini tidak rancu dilapangan
4	Menurut Saudara apakah fasilitas/ sarana prasarana untuk menunjang pelaksanaan program tersebut sudah cukup dan memadai?	Sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan program ini dilapangan dirasakan belum cukup memadai yaitu pada point jaringan tata air dan jalan usaha tani. Kedua bagian ini mutlak diperlukan guna mensukseskan program ini, sehingga

		sebagai jalan keluar untuk sementara secara swadaya petani membuat sendiri jaringan tata air dan jalan usaha tani semampunya, sambil menunggu program bantuan dari pemerintah daerah dilaksanakan. Sedangkan untuk sarana seperti benih padi, pupuk, herbisida, dan alsintan telah siap dilokasi persawahan, sehingga petani dapat langsung memanfaatkan lahan sawah yang ada.
5	Bagaimana tanggapan dari instansi Saudara dengan adanya Program Pencetakan Sawah Baru untuk Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat?	Instansi kami menanggapi dan menerima dengan baik adanya program ini. Hal ini memang sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah untuk mencapai swasembada pangan, dan menciptakan petani yang tangguh dan mandiri serta sejahtera.
6	Bagaimana pemahaman Saudara secara umum mengenai program tersebut?	Setelah kami membaca dan menelaah pedoman umum dan petunjuk teknis yang diberikan dan menjadi acuan kami, saya rasa saya cukup memahami dan mengerti tentang tujuan dan sasaran dari program ini
7	Apakah Saudara mempunyai komitmen yang kuat untuk ikut mensukseskan program tersebut?	Kami selaku kepala seksi sangat berkomitmen untuk mensukseskan program cetak sawah ini, apalagi program ini berguna untuk mendongkarak produksi padi di Kabupaten Kotawaringin Barat yang selama ini kita ketahui bersama kalau kita hanya mampu 40 % saja memenuhi kebutuhan beras kita, dan sisanya berasal dari luar daerah. Jadi Pemerintah daerah sangat mendukung bantuan yang diberikan dari dana APBN ini. Program ini juga berguna untuk mengurangi kebiasaan petani dalam membuka lahannya dengan cara membakar lahan yang dapat membuat polusi asap
8	Menurut Saudara apakah program ini baik untuk dilaksanakan?	Menurut pendapat saya, program ini baik sekali dilaksanakan karena dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, terutama petani itu sendiri, dan syukur-syukur dapat berlebih sehingga dapat memenuhi kebutuhan pangan wilayah desa maupun kecamatan tersebut
9	Bagaimana dengan petugas pelaksana di bidang saudara,	masalah sumber daya manusia yang ada masih kurang dan perlu adanya

	apakah dari kuantitas dan kualitas sudah memadai?	penambahan staf lagi mengingat tugas yang ada cukup berat dikarenakan medan dari program ini yang tersebar di beberapa kecamatan, sehingga perlu kontrol yang intensif demi suksesnya program ini
10	Apakah target Saudara sebagai kepala seksi tentang program pencetakan sawah baru ini	Target kami sebagai pengawas kegiatan ini yaitu agar 500 hektar alokasi lahan sawah yang masuk dalam program ini dapat terbuka dan dimanfaatkan oleh masyarakat petani.
11	Apa upaya saudara sebagai kepala seksi untuk mengoptimalkan budidaya sawah yang baru dicetak ini?	Upaya kami sebagai kepala seksi yaitu dengan memonitoring bantuan berupa sarana produksi pertanian berupa bibit, pupuk, herbisida, alsintan langsung dapat diterima oleh anggota kelompok tani secara langsung dan tanpa tersendat, sehingga lahan yang ada dapat langsung dibudidayakan tanaman padi sawah
12	Bagaimana saudara sebagai kepala seksi untuk dapat mengawal dan membantu petani dalam keberlanjutan menanam tanaman padi sawah di lahan program pencetakan sawah baru ini?	Kami sebagai kepala seksi dalam membantu petani untuk dapat berlanjut bertanam padi yaitu dengan hanya menjembatani PPL dan dinas pertanian agar memberikan stimulan lanjutan agar petani bersemangat untuk bertanam padi di lahan yang ada.

## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan : Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan Kelurahan Mendawai  
 Tempat : Kelurahan Mendawai  
 Pewawancara : Peneliti  
 Hasil :

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Saudara mengetahui Program Pencetakan Sawah Baru untuk Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat? Jika ya, kapan dan darimana mengetahuinya?	saya mendapatkan informasi program ini dari petugas dari dinas pertanian dan peternakan melalui sosialisasi dan pertemuan yang dilaksanakan sebelum dan pada saat program ini dilaksanakan, sehingga secara umum kami cukup memahami tujuan dari program ini. Disamping itu pada pertemuan bulanan di BPP Arut Selatan, kami juga dijelaskan oleh koordinator BPP Arut Selatan akan pentingnya program ini, terutama dari faktor teknis kesiapan lokasi di lapangan
2	Apakah Saudara tahu apa tujuan Program Pencetakan Sawah Baru untuk Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat?	Ya saya mengetahuinya, tujuan program ini yaitu untuk meningkatkan produksi padi guna peningkatan ketahanan pangan daerah
3	Apakah Saudara mendukung dan apa tanggapan instansi saudara dengan adanya program ini?	Saya cukup mendukung dengan adanya program cetak sawah baru ini, untuk instansi kami saya rasa juga mendukung.
4	Bagaimana pemahaman Saudara mengenai Program Pencetakan Sawah Baru untuk Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat?	Saya rasa cukup paham karena program ini sudah sering disampaikan pada pertemuan-pertemuan di tingkat kabupaten baik itu di dinas pertanian maupun di kantor penyuluhan.
5	Menurut Saudara apakah peraturan ini baik untuk dilaksanakan?	Saya kira cukup baik, sehingga dapat dilanjutkan ditahun-tahun mendatang mengingat lahan potensial di wilayah desa kami masih relatif luas.

6	Apakah Saudara mempunyai komitmen untuk mensukseskan Program Pencetakan Sawah Baru untuk Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat?	Kami berkomitmen untuk mensukseskan program ini, mengingat banyaknya lahan-lahan tidur yang ada diwilayah kami sehingga dengan adanya program ini dapat membuka lahan tersebut dan menjadi lebih bermanfaat.
7	Apakah program ini menurut Saudara sudah tepat dan bermanfaat untuk dilaksanakan?	Bermanfaat dan sudah tepat, sehingga diharapkan ditahun-tahun mendatang dapat ditambah areal yang dibuka serta dilengkapi fasilitas yang ada guna keberlanjutan program ini.
8	Apakah target Saudara tentang program pencetakan sawah baru ini	Target saya yaitu sesuai dengan SK yang ada saya berkewajiban untuk memonitoring dan mengawasi pekerjaan penyelesaian pencetakan sawah baru di wilayah kerja saya seluas 40 hektar yaitu kelompok tani klampan sejahtera
9	Apa upaya saudara sebagai PPL untuk mengoptimalkan budidaya sawah yang baru dicetak ini?	Upaya kami yaitu dengan berkoordinasi dan berkomunikasi secara intensif dengan anggota kelompok tani klampan sejahtera agar dapat langsung memanfaatkan lahan sawah yang telah dicetak untuk pembudidayaan tanaman padi, sehingga lahan tidak sempat terbengkalai.
10	Bagaimana saudara sebagai PPL untuk dapat mengawal dan membantu petani dalam keberlanjutan menanam tanaman padi sawah di lahan program pencetakan sawah baru ini?	Kami sebagai PPL dalam mengawal dan membantu petani untuk keberlanjutan menanam tanaman padi sawah di lahan program pencetakan sawah baru ini yaitu dengan melakukan koordinasi aktif kepada instansi terkait agar dapat memberikan bantuan berupa sarana produksi pertanian serta fasilitas seperti jaringan tata air dan jalan usaha tani dilahan yang telah dicetak ini, mengingat selama ini petani menuju ke lahan harus menggunakan sampan, dikarenakan belum adanya jembatan-jembatan kecil penghubung ke lokasi sawah baru ini, meskipun jalan sudah ada. Disamping itu kami juga memberikan peringatan kepada petani apabila ada petani yang dengan sengaja ditahun berikutnya untuk tidak bertanam padi atau bertanam selain tanaman pangan dilahan sawahnya maka dia akan dikeluarkan dari daftar kepemilikan lahan di wilayah tersebut.

### TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan : Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Kubu  
 Tempat : Desa Kubu, Kecamatan Kumai  
 Pewawancara : Peneliti  
 Hasil :

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Saudara mengetahui Program Pencetakan Sawah Baru untuk Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat? Jika ya, kapan dan darimana mengetahuinya?	informasi yang kami dapatkan sebagai PPL yaitu melalui sosialisasi dan pertemuan yang diadakan pihak dinas pertanian dan peternakan kabupaten sebelum program ini dilaksanakan dan kami tindaklanjuti dengan pertemuan didesa binaan kami untuk mempersiapkan kelompok-kelompok mana yang telah siap dan mampu untuk melaksanakan rogram ini
2	Apakah Saudara tahu apa tujuan Program Pencetakan Sawah Baru untuk Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat?	Saya mengetahuinya, tujuan program ini yaitu mencetak sawah baru untuk segera berproduksi padi dengan efek yaitu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani
3	Apakah Saudara mendukung dan apa tanggapan instansi saudara dengan adanya program ini?	Saya pribadi mendukung program ini, dan instansi kami juga mendukung adanya program ini
4	Bagaimana pemahaman Saudara mengenai Program Pencetakan Sawah Baru untuk Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat?	Saya memahami program ini, karena telah disampaikan oleh atasan kami di pertemuan- pertemuan bulanan yang diadakan di kecamatan maupun kabupaten.
5	Menurut Saudara apakah peraturan ini baik untuk dilaksanakan?	Baik, dan petani memang memerlukannya dan mengharapkan penambahan kelengkapan fasilitas ditahun-tahun berikutnya agar lebih bersemangat dalam bercocok tanam
6	Apakah Saudara mempunyai komitmen untuk	Saya selalu berkomitmen untuk mensukseskan program ini, dikarenakan

	mensukseskan Program Pencetakan Sawah Baru untuk Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat?	diwilayah kami didominasi oleh masyarakat lokal yang masih sedikit sekali mengenal dengan persawahan, menjadi tantangan kami sebagai penyuluh pertanian untuk mensukseskan program ini dengan melakukan penyuluhan secara intensif.
7	Apakah program ini menurut Saudara sudah tepat dan bermanfaat untuk dilaksanakan?	Cukup tepat dan bermanfaat bagi petani, karena disamping sebagai lahan pembelajaran kepada petani lokal, juga dapat memperoleh hasil yang positif berupa hasil panen padi.
8	Apakah target Saudara tentang program pencetakan sawah baru ini	Harapan kami bahwa realisasi tanam padi sdi kelompok tani penerima yaitu terbitan baru dan harapan kita yang masing-masing dengan luas areal 40 dan 20 hektar dapat tertanam padi sawah.
9	Apa upaya saudara sebagai PPL untuk mengoptimalkan budidaya sawah yang baru dicetak ini?	Upaya kami yaitu sebagaimana PPL yang lain yaitu berusaha dan memotivasi petani di kedua kelompok tersebut untuk segera bertanam padi sawah setelah lahannya selesai dicetak.
10	Bagaimana saudara sebagai PPL untuk dapat mengawal dan membantu petani dalam keberlanjutan menanam tanaman padi sawah di lahan program pencetakan sawah baru ini?	Berhubung wilayah kami ini bertani merupakan kegiatan sampingan, memang agak susah untuk mengajak petani agar dapat terus menerus bertanam padi dilahan yang ada, namun kami sebagai PPL berupaya minimal 1 kali dalam setahun agar lahan yang ada dapat ditanamai tanaman padi sawah, sehingga lahan yang telah dicetak dengan biaya yang relatif mahal ini tidak mubazir.

### TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan : Ketua Kelompok Tani Kelurahan Mendawai  
 Tempat : Kelurahan Mendawai  
 Pewawancara : Peneliti  
 Hasil :

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Saudara mengetahui Program Pencetakan Sawah Baru untuk Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat? Jika ya, kapan dan darimana mengetahuinya?	kami diberitau ibu PPL kalo ada program cetak sawah untuk kelompok tani kami, penjelasan lengkap sudah dijelaskan oleh ibu PPL, jadi kami mengerti dan menyiapkan hal-hal yang diperlukan untuk mengikuti program ini
2	Apakah saudara tahu apa tujuan Program Pencetakan Sawah Baru untuk Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat?	Tujuannya yaitu untuk memproduksi padi guna meningkatkan ketahanan pangan daerah.
3	Apakah Saudara pernah mengikuti sosialisasi/ pelatihan dari Dinas terkait tentang program tersebut?	Pernah, itu sosialisasi di tingkat kabupaten, dan kami sebagai ketua kelompok yang mewakilinya, dan setelah selesai sosialisasi, kami bersama PPL bersama-sama menjelaskan kepada anggota kelompok tani kami tentang program tersebut supaya tidak terjadi kesalahpahaman dikemudian hari.
4	Menurut Saudara apakah petugas sudah cukup menjelaskan tentang peraturan ini?	Ya sudah cukup, yaitu dengan rutusnya pelaksanaan pertemuan kelompok yang dihadiri oleh PPL setempat guna menjelaskan berbagai persoalan pertanian yang ada.
5	Apakah program ini baik dan bermanfaat bagi petani?	Ya, sangat bermanfaat apalagi apabila Jalan usaha tani dan jaringan tata airnya dibanahi, maka sawah tersebut menjadi sedikit kendala/persoalan yang dihadapi.
6	Apakah Saudara mendukung lahan pertanian saudara ditetapkan pada Program	Sangat mendukung sekali, karena pada pelaksanaan program ini kami sebagai petani kecil dirasakan sangat terbantu

	Pencetakan Sawah Baru untuk Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat?	sekali, mengingat modal yang ada sehingga biasanya kami hanya bertanam padi semampu kami saja, dan sisa lahan yang ada kami biarkan, namun dengan adanya pembukaan lahan menggunakan alat berat ini membuat lahan-lahan kami menjadi terbuka seluruhnya dan kami dapat memanfaatkan keseluruhan lahan yang kami miliki untuk bertanam padi.
8	Apakah target Saudara tentang program pencetakan sawah baru ini	Target kami yaitu lahan yang telah terbuka di kelompok tani kami dapat tertanami seluruhnya dengan tanaman padi
9	Apa upaya saudara sebagai Petani dalam mengoptimalkan budidaya padi sawah pada lahan yang baru dicetak ini?	Upaya kami yaitu dengan melakukan pengolahan lahan, pemupukan, dan pengendalian hama penyakit tanaman agar tanaman padi kami dapat menghasilkan hasil panen yang memuaskan
10	Bagaimana saudara sebagai ketua kelompok tani/petani untuk dapat lanjut menanam tanaman padi sawah di lahan program pencetakan sawah baru ini di tahun-tahun mendatang?	Ya dengan melakukan koordinasi dengan teman-teman yang lain untuk dapat terus kompak bertanam padi dan juga koordinasi dengan ibu PPL untuk dapat menjembatani kami dalam mendapatkan bantuan dari dinas terkait agar kami dapat semangat terus bertanam padi

**Lampiran 3.****DOKUMENTASI PENELITIAN**

**Gambar 1. Peneliti Sedang melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian dan Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat.**



**Gambar 2. Peneliti Sedang melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian dan Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat.**



**Gambar 3. Gambaran Awal Lahan Pencetakan Sawah Baru sebelum dilakukan kegiatan Pembukaan Lahan**



**Gambar 4. Alat berat (excavator) sedang membuka dan membersihkan lahan cetak sawah**



**Gambar 5. Jaringan Kuarter di areal program cetak sawah, masih diperlukan jaringan tata air berupa parit-parit cacing dan pintu air disekitar lahan pertanian guna mengatur keadaan air yang diperlukan untuk bertanam padi sawah**



**Gambar 6. Foto PPL dan Petani dilokasi Program cetak sawah baru**



Gambar 7. Alat semprot (Handsprayer) yang didistribusikan kepada kelompok tani cetak sawah baru



Gambar 8. Pupuk anorganik yang didistribusikan kepada petani cetak sawah baru

